

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmat Nya, sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang menggambarkan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se-Sulawesi Selatan tahun 2024, dapat diselesaikan. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini meliputi bidang teknis yudisial, pengawasan internal, pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan administrasi. Disamping memberikan informasi sebagai bentuk pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugas, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan di masa mendatang agar kinerja Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se-Sulawesi Selatan menjadi lebih baik, untuk dapat mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2024 telah diupayakan secara optimal dan objektif, namun apabila masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu adanya saran yang konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak, untuk kesempurnaan laporan dan peningkatan kinerja yang lebih baik lagi.

Akhirnya, dengan tersusunnya laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 kami memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada segenap Tim Penyusun dan semua warga Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se- Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar yang telah mendukung penyusunan laporan ini dan melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh, dengan semangat demi terwujudnya Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se-Sulawesi Selatan yang Agung.

Makassar, 22 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Makassar

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 VISI dan MISI 5

 A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum..... 7

 1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama 7

 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding..... 11

 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 13

 4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali..... 14

 B. Penyelesaian Perkara..... 16

 1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus 16

 2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu 17

 3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK 18

 4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Melalui Mediasi..... 20

 5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi..... 20

 C. Capaian Prioritas Nasional..... 21

 1. POSBAKUM..... 21

 2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu..... 21

 3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)..... 21

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA..... 27

 A. MUTASI..... 28

 B. PROMOSI..... 44

 C. PENSIUN..... 51

 D. DIKLAT 53

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI..... 54

 A. Pengelolaan Keuangan 54

 B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana..... 56

 C. Pengelolaan Teknologi Informasi 67

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK..... 69

 A. Akreditasi Penjaminan Mutu 69

 B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 70

 C. Inovasi Pelayanan Publik..... 71

BAB VI PENGAWASAN..... 83

 A. Internal..... 83

 B. Evaluasi..... 89

BAB VII PENUTUP 90

 A. Kesimpulan..... 90

 B. Rekomendasi..... 91

DAFTAR TABEL

1	Tabel II.1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2024	7
2	Tabel II.2. Keadaan Perkara Tingkat Banding Tahun 2024	11
3	Tabel II.3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Tahun 2024	13
4	Tabel II.4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali Tahun 2024	14
5	Tabel II.5. Rekapitulasi Sisa Perkara yang Diputus Tahun 2024	16
6	Tabel II.6. Rekapitulasi Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2024	17
7	Tabel II.7. Rekapitulasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	18
8	Tabel II.8. Rekapitulasi Perkara Perdata yang Berhasil Melalui Mediasi	20
9	Tabel II.9. Rekapitulasi Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	23
10	Tabel II.10. Realisasi Anggaran POSBAKUM	22
11	Tabel II.11. Alokasi dan Realisasi Anggaran Sidang Keliling Tahun 2024	24
12	Tabel II.12. Alokasi dan Realisasi Anggaran Prodeo Tahun 2024	26
13	Tabel III.1. Rekap Personil Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2024	27
14	Tabel III.2. Rekap Mutasi Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2024	28
15	Tabel III.3. Mutasi Keluar Tahun 2024	29
16	Tabel III.4. Mutasi Masuk Tahun 2024	36
17	Tabel III.5. Promosi Jabatan Tahun 2024	44
18	Tabel III.6. Pensiun Tahun 2024	51
19	Tabel III.7. Tenaga Tehnis Yang Pernah Mengikuti Diklat	53
20	Tabel IV.1. LRADIPA 01 PT Makassar dan PN Se-Sulawesi Selatan Tahun 2024	55
21	Tabel IV.2. LRADIPA 03 PT Makassar dan PN Se-Sulawesi Selatan Tahun 2024	56
22	Tabel IV.3. Sarana/Prasarana Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar	57
23	Tabel IV.4. Data Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan Tahun 2024	57
24	Tabel IV.5 Data Kendaraan Dinas Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan Tahun 2024	62
25	Tabel V.1. Daftar predikat Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar	69
26	Tabel V.2. Daftar Inovasi pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar	72
27	Tabel VI.1. Data Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar	83

BAB I PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 1 dan 2 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pada lingkungan Peradilan Umum, Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

Pengadilan Tinggi Makassar mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana, perkara perdata, perkara tipikor di tingkat banding serta mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi juga mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan di wilayah hukumnya, melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan di wilayah hukumnya, menyusun laporan hasil pengawasan, menyusun laporan perkara, menyusun statistik perkara serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari semua pengadilan negeri di wilayah hukum pengadilan tinggi dan salah satunya adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung mempunyai yurisdiksi yang sangat luas dengan wilayah yurisdiksi 23 (dua puluh tiga) satuan kerja Pengadilan Negeri yang tersebar di Kota dan Kabupaten se Sulawesi Selatan.



Pengadilan Tinggi Makassar mengharapkan terwujudnya transparansi peradilan dan pelayanan publik yang baik guna mendukung transparansi peradilan yang sangat ditunggu dan didambakan oleh masyarakat pencari keadilan di Makassar.



Sejalan dengan itu seluruh satuan kerja Peradilan Negeri se Sulawesi Selatan telah mengelola website sebagai sarana penunjang kemudahan untuk memperoleh layanan informasi dan selain itu transparansi seluruh Pengadilan Negeri se Sulawesi Selatan diwajibkan untuk mengelola meja informasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai garda depan untuk memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan, serta mewajibkan seluruh aparat Peradilan untuk meng-input data perkara kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Bahwa sejalan dengan transparansi Informasi melalui Informasi Teknologi (IT) Pengadilan Tinggi Makassar tetap berupaya untuk melakukan upaya mendukung Pembaruan di Mahkamah Agung, sebagaimana yang digariskan didalam Cetak Biru Pembaruan Badan Peradilan 2010-2035 yang berisi langkah-langkah dan upaya pengadilan unggul meliputi 7 (tujuh) area yang harus dikembangkan yaitu:

1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan;
2. Kebijakan-kebijakan Pengadilan;
3. Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Anggaran;
4. Penyelenggaraan Persidangan;
5. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Keadilan;
6. Pelayanan Pengadilan yang terjangkau;
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan;

Bahwa sebagai wujud konkrit Pengadilan Tinggi Makassar sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, telah melakukan langkah-langkah kongkrit yaitu:

1. Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman, terus meningkatkan ketaatan pada asas dan peraturan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, dengan lebih memperhatikan hal-hal yang sudah diatur dalam peraturan. Asas-asas penyelenggaraan peradilan adalah sebagai berikut:
 - a. Semua pengadilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
 - b. Peradilan dilakukan **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA KUASA”**.
 - c. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - d. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- e. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- f. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- g. Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang.
- h. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- i. Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- j. Sidang dibantu oleh seorang Panitera atau seseorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
- k. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- l. Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.
- m. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- n. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- o. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- p. Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- q. Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- r. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.
- s. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- t. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang dan Hakim Anggota yang memutus dan juga oleh Panitera yang membantu persidangan.
- u. Setiap Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan PP.
- v. Setiap hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- w. Di dalam menjalankan tugasnya, setiap hakim harus memperhatikan hak, kewajiban dan kewenangannya sebagaimana di atur dalam peraturan-perundangan yang berlaku.
- x. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Panitera dan Juru Sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
- y. Dan dalam melaksanakan Putusan Pengadilan, harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.
- z. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

2. Di dalam Menyusun Suatu Perencanaan, harus lebih meningkatkan dan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:
 - a. Asas stabilitas (*principle of planning stability*), artinya perencanaan diadakan untuk masa mendatang yang penuh perubahan dan ketidakpastian, dan karena kondisi yang penuh perubahan maka perlu adanya stabilitas, baik program kegiatan, *schedule/jadwal* maupun anggarannya.
 - b. Asas rasional, yaitu berdasarkan pemikiran-pemikiran dan perhitungan secara rasional, logis, bukan sekedar ramalan dan bukan sekedar atas kebiasaan yang telah dilakukan selama ini.
 - c. Asas kontinyu, yaitu mempunyai wawasan ke masa depan yang diinginkan atau berkelanjutan. Artinya perencanaan harus terus menerus dibuat dan berkelanjutan. Tidak sekali saja dibuat untuk seumur hidup organisasi.
 - d. Asas alternatif (*principle of present choices*). Perlu menentukan pilihan sejak awal, yang disusun sekarang. Oleh karena itu: orang, biaya, metoda, dan lain-lain, ditentukan untuk ikut menentukan hasilnya nanti.
 - e. Asas perkiraan (*principle of positive action*). Untuk tidak gagal dalam mendapatkan hasil di masa datang, harus menyusun/membuat rencana sekarang yang tepat (*sound plan*) dan yang dapat direalisasikan secara positif.
 - f. Asas keseimbangan (*principle of common surate effort*). Perencanaan harus mengarah kepada usaha-usaha yang serasi/seimbang. Jadi, tidak mengedepankan masalah teknis yudisial saja, akan tetapi juga memikirkan pula masalah non teknis yudisial.
 - g. Asas fleksibel/lentur (*principle of resistance to change*). Mengikut sertakan untuk melakukan perubahan melalui perencanaan, artinya luwes, dimanapun dalam hal apapun, serta bila manapun perencanaan itu cocok dapat dilaksanakan. Jadi dapat diterapkan pada tempat, waktu dan keadaan bagaimanapun juga.
 - h. Asas Manfaat, artinya perencanaan itu betul-betul memberikan manfaat dalam pencapaian tujuan organisasi, menghilangkan ketidakpastian dan membentuk hari depan yang lebih baik.
3. Meningkatkan peran serta seluruh aparaturnya / komponen Pengadilan, yaitu Hakim, Pejabat Struktural, pejabat fungsional kepaniteraan / kejurusitaan dan staf, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan;
4. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, melalui Standard Operasional Procedure (SOP) dengan baik;
6. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab aparaturnya Pengadilan/seluruh komponen Pengadilan.
7. Membuat penetapan kinerja bagi seluruh Pejabat Pengadilan dan pejabat-pejabat di bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat .
8. Melaporkan harta kekayaan seluruh aparaturnya Pengadilan yang terkena peraturan untuk itu, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
9. Mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Pengadilan.
10. Pengadilan Tinggi Makassar terus meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh kinerja aparaturnya Peradilan dibawahnya, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pembinaan

Bahwa jadwal kunjungan kerja disetiap Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, dengan didampingi oleh Hakim Tinggi, Panitera, dan Sekretaris. Selain Pembinaan dengan kunjungan langsung ke Pengadilan Negeri juga dilakukan pembinaan melalui *teleconference*.

b. Pengawasan

Bahwa jadwal kunjungan kerja disetiap Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dengan didampingi oleh Pejabat struktural dan Pejabat fungsional kepaniteraan yang ditunjuk, dengan melakukan pemeriksaan terhadap bidang Kepaniteraan dan bidang Kesekretariatan.

11. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan, seiring dengan berjalannya waktu maka di akhir penghujung tahun 2015, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, tentang **ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN** yang berlaku sejak tanggal di Undangkan.

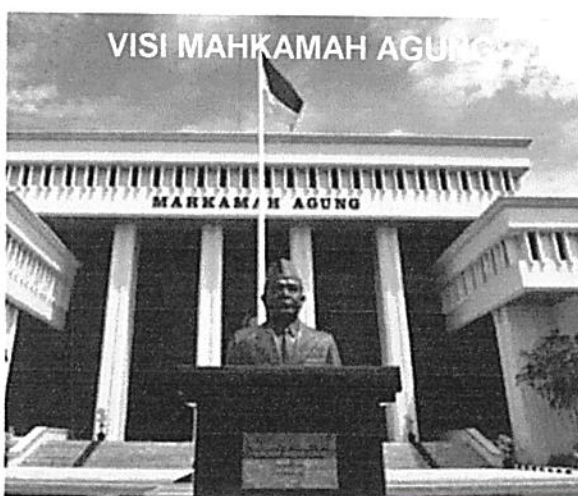
12. Dalam pengelolaan keuangan negara, Pengadilan Tinggi Makassar, telah meningkatkan:

- a. Kualitas dalam tata cara dan keterampilan dalam penyusunan perencanaan anggaran (RKA-KL) yang aspiratif (memenuhi standar kebutuhan Pengadilan), partisipatif (melibatkan seluruh komponen pengadilan), didasarkan argumentasi, parameter yang obyektif dan skala prioritas.
- b. Kualitas dalam pengelolaan anggaran, mulai dari pemenuhan kebutuhan anggaran pengadilan, adanya revisi anggaran, proses pencairan anggaran yang lebih terjadwal, adanya penentuan skala prioritas penggunaan anggaran dan lain sebagainya.

VISI dan MISI

Salah satu syarat agar organisasi Mahkamah Agung ini dapat berjalan dengan baik adalah adanya suatu **VISI dan MISI**.

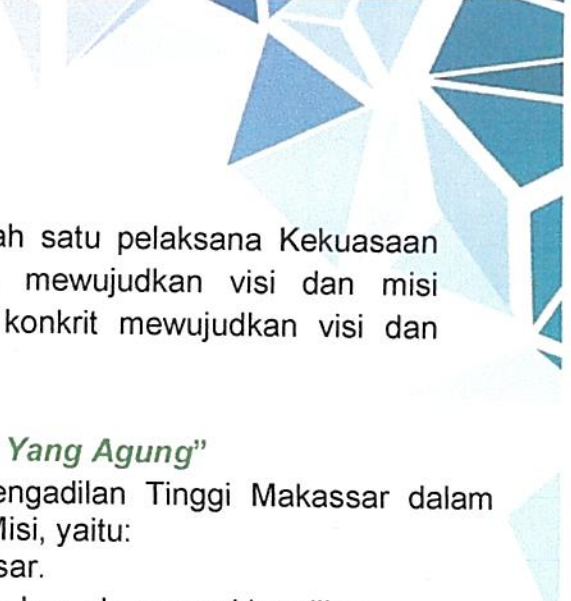
Adapun **Visi Mahkamah Agung RI** (yang juga merupakan penegasan dan perwujudan kehendak atau cita-cita rakyat Indonesia di bidang pelaksanaan kekuasaan kehakiman) telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung sebagai berikut:



“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

MISI MAHKAMAH AGUNG:

1. Mengadili pada tingkat kasasi
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
3. Membina keseragaman dalam penerapan hukum
4. Menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara adil, tepat, dan benar



Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam menunjang dan mendukung serta mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung, telah melakukan langkah-langkah konkrit mewujudkan visi dan misinya, yaitu:

Visi Pengadilan Tinggi Makassar adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Makassar Yang Agung”

Sedangkan bersamaan dengan visi tersebut, Pengadilan Tinggi Makassar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya juga mempunyai Misi, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Makassar.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Makassar
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Makassar

BAB II

KEADAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA
DI PERADILAN UMUM

A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) dan Mahkamah

Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya)

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Berikut ini rincian keadaan perkara Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2024.

Tabel II.1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2024

NO	SATKER	PERKARA	SISA PERKARA 2023	PERKARA MASUK 2024	PUTUS 2024	SISA
1	PN MAKASSAR	Pidana Biasa	359	1617	855	336
	KELAS I A KHUSUS	Pidana Singkat	0	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	48	48	0
		Pidana Lalu Lintas	0	15400	15400	0
		Pidana Khusus Tipikor	51	120	129	42
		Pidana Khusus Anak	1	53	47	6
		Pidana Pra Peradilan	5	27	24	3
		Perdata Gugatan	183	512	479	216
		Perdata Permohonan	26	779	756	49
		Perdata Khusus Kepailitan	3	3	6	0
		Perdata Khusus Niaga PKPU	2	14	14	2
		Perdata Khusus Niaga HKI	0	1	1	0
		Perdata Khusus Niaga Lain	1	4	4	1
		Perdata Khusus PHI	3	39	34	8
		Perdata Perlawanan	11	32	27	16
		Perdata Gugatan Sederhana	9	63	66	6
		Perdata Eksekusi	167	70	120	117
2	PN SUNGGUMINASA	Pidana Biasa	90	382	422	50
	KELAS I A	Pidana Singkat	0	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	3	3	0
		Pidana Lalu Lintas	0	7264	7264	0
		Pidana Khusus Anak	2	15	17	0
		Pidana Pra Peradilan	3	3	6	0
		Perdata Gugatan	42	100	98	44
		Perdata Permohonan	9	282	286	5
		Perdata Perlawanan	2	6	6	2
		Perdata Gugatan Sederhana	0	12	10	2
		Perdata Eksekusi	16	22	25	13
3	PN WATAMPONE	Pidana Biasa	21	382	384	19
	KELAS I A	Pidana Singkat	0	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	2	2	0

		Pidana Lalu Lintas	0	2634	2364	0
		Pidana Khusus Anak	0	11	10	1
		Pidana Pra Peradilan	0	2	1	1
		Perdata Gugatan	18	63	64	17
		Perdata Permohonan	1	153	154	0
		Perdata Gugatan Sederhana	1	11	12	0
		Perdata Eksekusi	27	3	12	18
4	PN MAROS	Pidana Biasa	5	138	123	20
	KELAS I B	Pidana Singkat	0	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	3	3	0
		Pidana Lalu Lintas	0	4301	4301	0
		Pidana Khusus Anak	0	5	5	0
		Pidana Pra Peradilan	0	1	0	1
		Perdata Gugatan	12	51	40	23
		Perdata Permohonan	4	46	50	0
		Perdata Perlawanan	0	1	1	0
		Perdata Gugatan Sederhana	0	7	0	7
		Perdata Eksekusi				
5	PN MAKALE	Pidana Biasa	16	152	163	5
	KELAS I B	Pidana Singkat	0	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	4	4	0
		Pidana Lalu Lintas	0	359	359	0
		Pidana Khusus Anak	3	17	17	3
		Pidana Pra Peradilan	0	1	1	0
		Perdata Gugatan	55	267	275	47
		Perdata Permohonan	1	141	141	1
		Perdata Perlawanan	0	0	0	0
		Perdata Gugatan Sederhana	0	2	2	0
		Perdata Eksekusi	11	8	8	11
6	PN PALOPO	Pidana Biasa	24	162	148	38
	KELAS I B	Pidana Singkat	0	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	4	4	0
		Pidana Lalu Lintas	0	70	70	0
		Pidana Khusus Anak	1	12	13	0
		Perdata Gugatan	14	42	41	15
		Perdata Permohonan	3	135	136	2
		Perdata Perlawanan	0	1	1	0
		Perdata Gugatan Sederhana	0	4	4	0
		Perdata Eksekusi	3	8	1	10
7	PN SENGKANG	Pidana Biasa	34	212	196	50
	KELAS I B	Pidana Singkat	0	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	36	36	0
		Pidana Lalu Lintas	0	3,031	3031	0
		Pidana Khusus Anak	0	5	5	0
		Perdata Gugatan	20	41	39	22
		Perdata Permohonan	1	67	67	1
		Perdata Gugatan Sederhana	0	0	0	0
		Perdata Eksekusi	2	4	2	2
8	PN BULUKUMBA	Pidana Biasa	34	195	214	15
	KELAS I B	Pidana Singkat	0	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	3	3	0
		Pidana Lalu Lintas	0	746	746	0
		Pidana Khusus Anak	1	8	9	0
		Pidana Pra Peradilan	0	1	1	0
		Perdata Gugatan	6	24	14	13
		Perdata Permohonan	10	233	236	2
		Perdata Gugatan Sederhana	0	4	3	1
		Perdata Eksekusi	9	2	1	10
9	PN PANGKAJENE	Pidana Biasa	20	102	115	7
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	2	2	0
		Pidana Lalu Lintas	0	228	228	0
		Pidana Khusus Anak	0	4	4	0

		Perdata Gugatan	11	22	21	10
		Perdata Permohonan	0	18	18	0
		Perdata Gugatan Sederhana	0	4	4	0
		Perdata Eksekusi	5	4	2	7
10	PN BARRU	Pidana Biasa	14	74	87	1
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	1	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	1202	1202	0
		Pidana Khusus Anak	0	1	1	0
		Pidana Pra Peradilan	0	0	0	0
		Perdata Gugatan	6	25	23	8
		Perdata Permohonan	2	127	129	0
		Perdata Gugatan Sederhana	0	5	5	0
		Perdata Eksekusi	1	0	1	0
11	PN PAREPARE	Pidana Biasa	5	237	213	24
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	2	2	0
		Pidana Lalu Lintas	0	582	582	0
		Pidana Khusus Anak	0	2	2	0
		Perdata Gugatan	10	40	40	10
		Perdata Permohonan	0	98	98	0
		Perdata Perlawanan	0	2	2	0
		Perdata Gugatan Sederhana	0	4	4	0
		Perdata Eksekusi	4	8	4	8
12	PN SIDENRENG RAPPANG	Pidana Biasa	49	231	261	19
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	2	2	0
		Pidana Lalu Lintas	0	4290	4290	0
		Pidana Pra Peradilan	0	1	1	0
		Perdata Gugatan	14	66	63	17
		Perdata Permohonan	2	57	57	2
		Perdata Gugatan Sederhana	0	7	7	0
		Perdata Eksekusi	10	12	8	14
13	PN PINRANG	Pidana Biasa	41	230	232	39
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	6	6	0
		Pidana Lalu Lintas	0	291	291	0
		Pidana Khusus Anak	0	12	12	0
		Pidana Pra Peradilan	0	6	6	0
		Perdata Gugatan	17	25	29	13
		Perdata Permohonan	0	81	80	1
		Perdata Perlawanan	1	3	3	1
		Perdata Gugatan Sederhana	0	30	27	3
		Perdata Eksekusi	11	5	7	9
14	PN TAKALAR	Pidana Biasa	11	93	92	12
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	4	4	0
		Pidana Lalu Lintas	0	879	879	0
		Pidana Khusus Tipikor	0	0	0	0
		Pidana Khusus Anak	0	8	8	0
		Pidana Pra Peradilan	0	2	2	0
		Perdata Gugatan	16	36	39	13
		Perdata Permohonan	0	46	44	2
		Perdata Perlawanan	0	2	2	0
		Perdata Gugatan Sederhana	0	5	4	1
		Perdata Eksekusi	6	5	4	7
15	PN JENEPONTO	Pidana Biasa	15	110	110	15
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	5	5	0
		Pidana Lalu Lintas	0	429	429	0
		Pidana Khusus Anak	0	3	3	0
		Perdata Gugatan	14	32	34	12

		Perdata Permohonan	0	36	33	3
		Perdata Gugatan Sederhana	0	4	4	0
		Perdata Eksekusi	14	1	0	15
16	PN BANTAENG	Pidana Biasa	2	113	111	4
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	3	3	0
		Pidana Lalu Lintas	0	703	703	0
		Pidana Khusus Anak	0	6	6	0
		Pidana Pra Peradilan	0	2	2	0
		Perdata Gugatan	4	6	9	1
		Perdata Permohonan	0	83	83	0
		Perdata Gugatan Sederhana	0	3	3	0
		Perdata Eksekusi	6	7	3	10
17	PN SINJAI	Pidana Biasa	15	149	150	14
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	11	11	0
		Pidana Lalu Lintas	0	128	128	0
		Pidana Khusus Anak	0	3	3	0
		Perdata Gugatan	3	9	10	2
		Perdata Permohonan	0	89	89	0
		Perdata Eksekusi	1	1	0	2
18	PN WATANSOPPENG	Pidana Biasa	5	83	87	1
	KELAS II	Pidana Singkat	0	4	4	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	3	3	0
		Pidana Lalu Lintas	0	324	324	0
		Pidana Khusus Anak	0	0	0	0
		Perdata Gugatan	3	16	14	5
		Perdata Permohonan	0	70	70	0
		Perdata Gugatan Sederhana	0	1	1	0
		Perdata Eksekusi	0	2	1	1
19	PN SELAYAR	Pidana Biasa	2	39	38	3
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	12	12	0
		Pidana Lalu Lintas	0	191	191	0
		Pidana Khusus Anak	0	3	3	0
		Pidana Pra Peradilan	0	0	0	0
		Perdata Gugatan	2	9	8	3
		Perdata Permohonan	0	105	105	0
		Perdata Perlawanan	0	0	0	0
		Perdata Gugatan Sederhana	0	5	5	0
		Perdata Eksekusi	1	0	1	0
20	PN MALILI	Pidana Biasa	23	169	173	19
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	2	2	0
		Pidana Lalu Lintas	0	154	154	0
		Pidana Khusus Anak	0	9	9	0
		Pidana Pra Peradilan	0	2	2	0
		Perdata Gugatan	12	85	77	20
		Perdata Gugatan Sederhana	0	6	6	0
		Perdata Permohonan	6	104	110	0
		Perdata Eksekusi	1	5	3	3
21	PN MASAMBA	Pidana Biasa	14	138	135	17
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	6	6	0
		Pidana Lalu Lintas	0	324	324	0
		Pidana Khusus Anak	1	2	3	0
		Pidana Pra Peradilan	0	0	0	0
		Perdata Gugatan	5	50	43	12
		Perdata Permohonan	0	58	57	1
		Perdata Gugatan Sederhana	0	6	6	0
		Perdata Eksekusi	46	2	46	2
22	PN ENREKANG	Pidana Biasa	13	54	67	0
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	0

		Pidana Cepat/Ringan	0	2	2	0
		Pidana Lalu Lintas	0	8	8	0
		Pidana Khusus Anak	0	3	3	0
		Pidana Pra Peradilan	0	2	2	0
		Perdata Gugatan	8	32	22	15
		Perdata Permohonan	3	41	44	0
		Perdata Gugatan Sederhana	0	0	0	0
		Perdata Eksekusi	7	6	8	5
23	PN BELOPA	Pidana Biasa	26	141	132	35
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	1	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	2194	2194	0
		Pidana Khusus Anak	0	3	3	0
		Pidana Pra Peradilan	0	4	4	0
		Perdata Gugatan	10	48	38	15
		Perdata Permohonan	0	36	36	0
		Perdata Gugatan Sederhana	0	3	3	0
		Perdata Eksekusi	1	3	0	3

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar menerima, meneliti, memeriksa dan memutus perkara banding pidana, perdata dan perkara Tindak pidana korupsi yang diajukan, oleh Pengadilan Negeri Se Sulawesi Selatan terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Satker. Berkas perkara yang dimohon banding adalah Perkara Perdata Gugatan, untuk Perkara Pidana terdiri Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana Cepat/Ringan/Lalu Lintas serta Pidana Khusus Tipikor.

Berikut ini rincian keadaan perkara Tingkat Banding di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2024.

Tabel II.2. Keadaan Perkara Tingkat Banding Tahun 2024

NO	SATUAN KERJA		TINGKAT BANDING			
			SISA 2023	MASUK 2024	PUTUS 2024	SISA 2024
1	Pengadilan Negeri Makassar	Pidana	6	568	550	3
		Pidana Anak	0	7	7	0
		Pidana Tipikor	0	65	60	5
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	23	151	157	17
		PHI	0	0	0	0
2	Pengadilan Negeri Sungguminasa	Pidana	29	118	140	7
		Pidana Anak	0	2	2	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	9	46	50	5
3	Pengadilan Negeri Pangkajene	Pidana	0	16	15	0
		Pidana Anak	0	1	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	2	10	7	5
4	Pengadilan Negeri Barru	Pidana	2	12	11	3
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	9	8	2
5	Pengadilan Negeri Takalar	Pidana	2	11	12	1
		Pidana Anak	1	0	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	2	23	20	5
6	Pengadilan Negeri Maros	Pidana	6	10	11	5
		Pidana Anak	0	1	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	8	17	15	10
7		Pidana	2	37	37	1
		Pidana Anak	0	0	0	0

	Pengadilan Negeri Jeneponto	Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	4	10	14	0
8	Pengadilan Negeri Pare-Pare	Pidana	12	117	119	10
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	4	10	11	3
9	Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang	Pidana	13	172	162	23
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	4	17	19	2
10	Pengadilan Negeri Pinrang	Pidana	5	105	97	13
		Pidana Anak	0	1	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	2	11	11	2
11	Pengadilan Negeri Watampone	Pidana	5	45	42	8
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	37	27	10
12	Pengadilan Negeri Watansoppeng	Pidana	3	26	27	3
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	2	8	9	1
13	Pengadilan Negeri Sengkang	Pidana	7	95	87	15
		Pidana Anak	0	1	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	4	15	17	2
14	Pengadilan Negeri Bantaeng	Pidana	7	25	26	5
		Pidana Anak	0	1	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	3	3	5	1
15	Pengadilan Negeri Sinjai	Pidana	0	60	50	10
		Pidana Anak	0	3	3	0
		Pidana Lalu Lintas	0	128	128	0
		Perdata	1	3	4	0
16	Pengadilan Negeri Bulukumba	Pidana	13	91	94	10
		Pidana Anak	0	2	2	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	3	4	0
17	Pengadilan Negeri Selayar	Pidana	1	10	8	3
		Pidana Anak	0	1	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	3	2	5	0
18	Pengadilan Negeri Palopo	Pidana	4	26	23	5
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	3	8	11	0
19	Pengadilan Negeri Makale	Pidana	4	9	8	9
		Pidana Anak	2	1	1	2
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	22	35	42	15
20	Pengadilan Negeri Masamba	Pidana	0	18	17	1
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	5	3	2
21	Pengadilan Negeri Malili	Pidana	13	57	41	16
		Pidana Anak	0	2	2	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	6	4	9	1
22	Pengadilan Negeri Belopa	Pidana	8	19	27	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	7	5	1
23	Pengadilan Negeri Enrekang	Pidana	1	15	12	4
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	2	12	14	0

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Berikut ini rincian keadaan perkara Tingkat Kasasi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2024.

Tabel II.3. Keadaan Perkara Tingkat Banding Tahun 2024

NO	SATUAN KERJA		TINGKAT KASASI			
			SISA 2023	MASUK 2024	PUTUS 2024	SISA 2024
1	Pengadilan Negeri Makassar	Pidana	95	375	181	185
		Pidana Anak	0	5	3	1
		Pidana Tipikor	23	78	209	1
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	24	122	132	14
		Niaga	0	6	4	2
		PHI	3	15	5	2
2	Pengadilan Negeri Sungguminasa	Pidana	30	68	77	21
		Pidana Anak	0	1	0	1
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	26	29	36	19
3	Pengadilan Negeri Pangkajene	Pidana	0	13	5	6
		Pidana Anak	0	1	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	8	2	6	4
4	Pengadilan Negeri Barru	Pidana	3	8	9	1
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	7	5	7	5
5	Pengadilan Negeri Takalar	Pidana	0	4	2	1
		Pidana Anak	1	1	2	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	17	3	14
6	Pengadilan Negeri Maros	Pidana	2	6	4	4
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	4	8	8	4
7	Pengadilan Negeri Jeneponto	Pidana	2	29	23	8
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	6	8	7	7
8	Pengadilan Negeri Pare-Pare	Pidana	1	97	75	23
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	6	9	8	7
9	Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang	Pidana	32	134	130	46
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	17	11	20	8
10	Pengadilan Negeri Pinrang	Pidana	55	81	81	54
		Pidana Anak	0	1	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	6	6	1	10
11	Pengadilan Negeri Watampone	Pidana	3	20	10	13
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	15	22	24	13
12	Pengadilan Negeri Watansoppeng	Pidana	4	24	10	18
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	1	1	1
13	Pengadilan Negeri Sengkang	Pidana	16	88	78	26
		Pidana Anak	0	1	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	9	8	11	6
14		Pidana	5	9	9	1
		Pidana Anak	0	1	1	0

	Pengadilan Negeri Bantaeng	Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	5	4	5	4
15	Pengadilan Negeri Sinjai	Pidana	20	39	38	21
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	2	3	1	4
16	Pengadilan Negeri Bulukumba	Pidana	23	85	77	31
		Pidana Anak	0	1	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	7	0	6	1
17	Pengadilan Negeri Selayar	Pidana	1	6	3	4
		Pidana Anak	0	0	1	1
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	8	2	4	6
18	Pengadilan Negeri Palopo	Pidana	7	14	15	6
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	8	9	10	7
19	Pengadilan Negeri Makale	Pidana	5	6	6	5
		Pidana Anak	1	0	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	31	26	25	32
20	Pengadilan Negeri Masamba	Pidana	4	7	8	3
		Pidana Anak	2	0	2	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	2	1	2
21	Pengadilan Negeri Malili	Pidana	6	18	14	10
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	7	4	7	4
22	Pengadilan Negeri Belopa	Pidana	11	13	19	4
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Perdata	5	4	5	4
23	Pengadilan Negeri Enrekang	Pidana	5	10	12	2

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali
 Berikut ini rincian keadaan perkara Tingkat Peninjauan Kembali di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2024.

Tabel II.4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali Tahun 2024

NO	SATUAN KERJA		TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI			
			SISA 2023	MASUK 2024	PUTUS 2024	SISA 2024
1	Pengadilan Negeri Makassar	Pidana	1	12	8	4
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Tipikor	0	19	4	4
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Niaga	0	0	0	0
		Perdata	6	35	27	14
		PHI	0	0	0	0
2	Pengadilan Negeri Sungguminasa	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	6	16	12	10
3	Pengadilan Negeri Pangkajene	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	3	2	2
4	Pengadilan Negeri Barru	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	3	2	3	2
5		Pidana	0	0	0	0

	Pengadilan Negeri Takalar	Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	5	4	2
6	Pengadilan Negeri Maros	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	7	3	4
7	Pengadilan Negeri Jeneponto	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	2	6	4	4
8	Pengadilan Negeri Pare- Pare	Pidana	0	2	0	2
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	2	1	3	0
9	Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang	Pidana	0	2	0	2
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	3	8	7	4
10	Pengadilan Negeri Pinrang	Pidana	0	2	1	1
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	1	1	1
11	Pengadilan Negeri Watampone	Pidana	0	0	1	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	6	9	12	3
12	Pengadilan Negeri Watansoppeng	Pidana	0	1	1	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	1	0	1
13	Pengadilan Negeri Sengkang	Pidana	0	11	2	9
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	3	5	3	5
14	Pengadilan Negeri Bantaeng	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	3	3	1
15	Pengadilan Negeri Sinjai	Pidana	15	149	150	14
		Pidana Anak	0	6	3	3
		Pidana Lalu Lintas	0	128	128	0
		Perdata	0	1	0	1
16	Pengadilan Negeri Bulukumba	Pidana	1	1	1	1
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	5	4	2
17	Pengadilan Negeri Selayar	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata		3	0	3
18	Pengadilan Negeri Palopo	Pidana	2	4	3	3
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	2	1	2	0
19	Pengadilan Negeri Makale	Pidana	1	1	1	1
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	7	14	6	15
20	Pengadilan Negeri Masamba	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	0	0	0
21	Pengadilan Negeri Malili	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	2	1	2

22	Pengadilan Negeri Belopa	Pidana	0	1	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	1	1	1
23	Pengadilan Negeri Enrekang	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	1	0	1

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Tahun 2024 keadaan sisa perkara yang diputus pada Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel II. 5. Rekapitulasi Sisa Perkara yang Diputus Tahun 2024

No.	PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN 2024	
		TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU
1	PN MAKASSAR		
	PIDANA	855	0
	PERDATA	439	67
	TIPIKOR	129	0
	NIAGA	29	0
	PHI	34	0
2	PN SUNGGUMINASA		
	PIDANA	421	1
	PERDATA	345	55
3	PN WATAMPONE		
	PIDANA	384	0
	PERDATA	62	2
4	PN MAROS		
	PIDANA	131	0
	PERDATA	102	0
5	PN MAKALE		
	PIDANA	554	0
	PERDATA	366	52
6	PN PALOPO		
	PIDANA	213	0
	PERDATA	160	5
7	PN SENGKANG		
	PIDANA	196	0
	PERDATA	10	29
8	PN BULUKUMBA		
	PIDANA	973	973
	PERDATA	253	8
9	PN PANGKAJENE		
	PIDANA	122	0
	PERDATA	45	15
10	PN BARRU		
	PIDANA	89	1
	PERDATA	153	2
11	PN PAREPARE		
	PIDANA	213	0
	PERDATA	42	0
12	PN SIDENRENG RAPPANG		
	PIDANA	261	0
	PERDATA	127	0
13	PN PINRANG		
	PIDANA	232	0
	PERDATA	107	0
14	PN TAKALAR		
	PIDANA	106	0

	PERDATA	92	
15	PN JENEPONTO		
	PIDANA	110	0
	PERDATA	29	5
16	PN BANTAENG		
	PIDANA	111	0
	PERDATA	9	0
17	PN SINJAI		
	PIDANA	164	0
	PERDATA	10	0
18	PN WATANSOPPENG		
	PIDANA	82	0
	PERDATA	14	0
19	PN SELAYAR		
	PIDANA	53	0
	PERDATA	13	13
20	PN MALILI		
	PIDANA	163	0
	PERDATA	76	2
21	PN MASAMBA		
	PIDANA	144	0
	PERDATA	105	1
22	PN ENREKANG		
	PIDANA	82	0
	PERDATA	74	0
23	PN BELOPA		
	PIDANA	140	0
	PERDATA	82	0

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Dalam Tahun 2024 keadaan perkara Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar yang diputus tepat waktu secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel II.6. Rekapitulasi Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2024

No.	PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN 2024	
		TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU
1	PN MAKASSAR		
	PIDANA	855	0
	PERDATA	439	67
	TIPIKOR	129	0
	NIAGA	29	0
	PHI	34	0
2	PN SUNGGUMINASA		
	PIDANA	421	1
	PERDATA	345	55
3	PN WATAMPONE		
	PIDANA	384	0
	PERDATA	62	2
4	PN MAROS		
	PIDANA	131	0
	PERDATA	102	0
5	PN MAKALE		
	PIDANA	554	0
	PERDATA	366	52
6	PN PALOPO		
	PIDANA	213	0
	PERDATA	160	5
7	PN SENGKANG		
	PIDANA	196	0
	PERDATA	10	29
8	PN BULUKUMBA		
	PIDANA	973	973

	PERDATA	253	8
9	PN PANGKAJENE		
	PIDANA	122	0
	PERDATA	45	15
10	PN BARRU		
	PIDANA	89	1
	PERDATA	153	2
11	PN PAREPARE		
	PIDANA	213	0
	PERDATA	42	0
12	PN SIDENRENG RAPPANG		
	PIDANA	261	0
	PERDATA	127	0
13	PN PINRANG		
	PIDANA	232	0
	PERDATA	107	0
14	PN TAKALAR		
	PIDANA	106	0
	PERDATA	92	
15	PN JENEPONTO		
	PIDANA	110	0
	PERDATA	29	5
16	PN BANTAENG		
	PIDANA	111	0
	PERDATA	9	0
17	PN SINJAI		
	PIDANA	164	0
	PERDATA	10	0
18	PN WATANSOPPENG		
	PIDANA	82	0
	PERDATA	14	0
19	PN SELAYAR		
	PIDANA	53	0
	PERDATA	13	13
20	PN MALILI		
	PIDANA	163	0
	PERDATA	76	2
21	PN MASAMBA		
	PIDANA	144	0
	PERDATA	105	1
22	PN ENREKANG		
	PIDANA	82	0
	PERDATA	74	0
23	PN BELOPA		
	PIDANA	140	0
	PERDATA	82	0

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Dalam Tahun 2024 keadaan perkara Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel II.7. Rekapitulasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

No.	PERKARA	PUTUS TAHUN 2024	TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM		
			BANDING	KASASI	PK
1	PN MAKASSAR				
	PIDANA	855	287	480	0
	PERDATA	506	355	233	198
	TIPIKOR	129	64	51	110
	NIAGA	28	0	28	0

	PHI	34	0	21	0
2	PN SUNGGUMINASA				
	PIDANA	422	305	375	422
	PERDATA	104	58	29	22
3	PN WATAMPONE				
	PIDANA	384	339	364	384
	PERDATA	64	27	5	13
4	PN MAROS				
	PIDANA	131	10	4	0
	PERDATA	102	17	8	7
5	PN MAKALE				
	PIDANA	544	534	3	6
	PERDATA	418	383	16	19
6	PN PALOPO				
	PIDANA	213	192	209	210
	PERDATA	165	163	164	165
7	PN SENGKANG				
	PIDANA	196	101	108	185
	PERDATA	39	15	8	5
8	PN BULUKUMBA				
	PIDANA	973	880	887	973
	PERDATA	261	258	4	6
9	PN PANGKAJENE				
	PIDANA	115	16	13	0
	PERDATA	23	10	2	3
10	PN BARRU				
	PIDANA	89	77	81	0
	PERDATA	23	14	3	5
11	PN PAREPARE				
	PIDANA	213	120	140	2
	PERDATA	42	32	1	32
12	PN SIDENRENG RAPPANG				
	PIDANA	261	172	134	2
	PERDATA	127	110	7	11
13	PN PINRANG				
	PIDANA	232	127	24	79
	PERDATA	12	20	5	0
14	PN TAKALAR				
	PIDANA	92	81	87	92
	PERDATA	41	20	4	0
15	PN JENEPONTO				
	PIDANA	110	73	81	0
	PERDATA	34	24	26	34
16	PN BANTAENG				
	PIDANA	111	87	102	111
	PERDATA	9	3	3	0
17	PN SINJAI				
	PIDANA	164	60	37	6
	PERDATA	10	7	7	0
18	PN WATANSOPPENG				
	PIDANA	87	58	59	86
	PERDATA	11	7	7	0
19	PN SELAYAR				
	PIDANA	53	11	6	0
	PERDATA	13	2	6	3
20	PN MALILI				
	PIDANA	163	106	145	163
	PERDATA	77	73	73	75
21	PN MASAMBA				
	PIDANA	144	126	137	144
	PERDATA	106	101	104	106
22	PN ENREKANG				

	PIDANA	82		72	82
	PERDATA	66	54	58	65
23	PN BELOPA				
	PIDANA	140	121	133	139
	PERDATA	82	76	79	82

4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Melalui Mediasi

Dalam Tahun 2024 keadaan perkara Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar yang berhasil melalui mediasi secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel II.8. Rekapitulasi Perkara Perdata yang Berhasil Melalui Mediasi

No.	SATUAN KERJA	JUMLAH PERKARA PERDATA YANG MEDIASI	MEDIASI		KET
			BERHASIL	GAGAL	
1	PN MAKASSAR	364	13	351	
2	PN SUNGGUMINASA	79	2	77	
3	PN WATAMPONE	53	2	47	4 mediasi masih berjalan
4	PN MAROS	36	3	33	
5	PN MAKALE	79	3	72	1 tidak dapat dilaksanakan, 3 mediasi berjalan
6	PN PALOPO	19	1	12	6 Mediasi Masih berjalan
7	PN SENGKANG	28	0	25	3 mediasi masih berjalan
8	PN BULUKUMBA	20	0	20	
9	PN PANGKAJENE	22	1	21	
10	PN BARRU	25	2	21	2 medisi tidak dapat dilaksanakan
11	PN PAREPARE	24	2	21	1 mediasi masih berjalan
12	PN SIDENRENG RAPPANG	30	2	27	1 mediasi berjalan
13	PN PINRANG	27	1	15	5 tidak mediasi, 6 Masih pemanggilan para pihak
14	PN TAKALAR	29	1	15	2 mediasi tidak dapat dilaksanakan 1 mediasi berjalan
15	PN JENEPONTO	29	0	29	3 mediasi berjalan
16	PN BANTAENG	6	0	6	
17	PN SINJAI	8	0	8	
18	PN WATANSOPPENG	14	0	14	
19	PN SELAYAR	9	1	8	
20	PN MALILI	23	2	21	2 mediasi masih berjalan
21	PN MASAMBA	11	0	11	-
22	PN ENREKANG	22	0	21	1 mediasi masih berjalan
23	PN BELOPA	18	2	16	

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Dalam Tahun 2024 keadaan perkara anak Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar yang berhasil melalui diversi secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel II.9. Rekapitulasi Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

No.	SATUAN KERJA	JUMLAH PERKARA ANAK MELALUI DIVERSI	DIVERSI		KET
			BERHASIL	GAGAL	
1	PN MAKASSAR	9	4	5	

2	PN SUNGGUMINASA	4	0	4	-
3	PN WATAMPONE	4	2	2	-
4	PN MAROS	0	0	0	Kesepakatan Diversi telah diselesaikan di tingkat Penyidik
5	PN MAKALE	3	1	2	
6	PN PALOPO	3	1	2	
7	PN SENGKANG	5	1	4	
8	PN BULUKUMBA	3	2	1	
9	PN PANGKAJENE	0	0	0	
10	PN BARRU	1	0	1	
11	PN PAREPARE	6	2	0	4 perkara tidak dapat di diversi karena tidak memenuhi syarat
12	PN SIDENRENG RAPPANG	0	0	0	
13	PN PINRANG	3	3	0	
14	PN TAKALAR	1	0	1	Diversi gagal
15	PN JENEPONTO	2	0	2	Tidak sepakat melaksanakan diversi
16	PN BANTAENG	2	1	1	
17	PN SINJAI	0	0	0	Nihil
18	PN WATANSOPPENG	0	0	0	NIHIL
19	PN SELAYAR	0	0	0	NIHIL
20	PN MALILI	2	0	2	
21	PN MASAMBA	0	0	0	NIHIL
22	PN ENREKANG	0	0	0	Nihil
23	PN BELOPA	2	0	2	

C. Capaian Prioritas Nasional

1. POSBAKUM

Layanan POSBAKUM yang diberikan tetap berpegang teguh kepada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014.

Dengan memanfaatkan fasilitas posbakum, masyarakat kurang mampu dapat melakukan konsultasi hukum, menerima advis hukum ataupun memperoleh bantuan mendapatkan draft hukum serta memperoleh informasi mengenai Organisasi Bantuan Hukum yang dapat memberika layanan hukum secara gratis, dating ke Posbakum Pengadilan Negeri Setempat. Semoga layananan posbakum ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat pencari keadilan, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor pengadilan.

1. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu.
2. Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:
 - bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
 - bantuan pembuatan dokumen hukum;
 - advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;

- rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;
 - rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.
3. Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak pihak tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim.
 4. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.

Adapun Satuan Kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar untuk Tahun 2024 yang mendapat alokasi dan Realisasi Anggaran Posbakum adalah sebagai berikut:

Tabel II.10. Realisasi Anggaran POSBAKUM

NO	NAMA SATKER	JUMLAH LAYANAN TAHUN 2024	PAGU ANGGARAN		PERSEN REALISASI
			PAGU	REALISASI	
			(Rp)	(Rp)	
1	PN MAKASSAR	720JL	72,000,000	71,928,000	99.90%
2	PN SUNGGUMINASA	360 JL	36,000,000	36,000,000	100%
3	PN TAKALAR	360 JL	36,000,000	35,742,000	99.28%
4	PN JENEPONTO	360 JL	36,000,000	36,000,000	100%
5	PN BANTAENG	360 JL	36,000,000	36,000,000	100%
6	PN MAROS	280 O JL	28,000,000	27,600,000	99%
7	PN PANGKAJENE	280 OJ	28,000,000	28,000,000	100%
8	PN BARRU	360 JL	36,000,000	36,000,000	100%
9	PN PAREPARE	360 JL	36,000,000	36,000,000	100%
10	PN SIDRAP	280 JL	28,000,000	28,000,000	100%
11	PN PINRANG	160 JL	36,000,000	36,000,000	100%
12	PN ENREKANG	360 JL	36,000,000	36,000,000	100%
13	PN WATANSOPPENG	360 JL	36,000,000	36,000,000	100%
14	PN BULUKUMBA	300 JL	30,000,000	30,000,000	100%
15	PN SELAYAR	360 OJL	36,000,000	36,000,000	100%
16	PN SINJAI	360 JL	36,000,000	36,000,000	100%
17	PN WATAMPONE	360 JL	36,000,000	36,000,000	100%
18	PN SENKANG	360 JL	36,000,000	36,000,000	100%
19	PN PALOPO	360 JL	36,000,000	36,000,000	100%

20	PN MAKALE	360 JL	36,000,000	36,000,000	100%
21	PN MALILI	360 JL	36,000,000	36,000,000	100%
22	PN MASAMBA	360 JL	36,000,000	36,000,000	100%
23	PN BELOPA	280 JL	28,000,000	28,000,000	100%

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Sidang Keliling (circuit court) merupakan persidangan (layanan sidang) di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Sidang Keliling merupakan salah satu bentuk dari Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu atau sulit menjangkau Pengadilan karena hambatan tertentu. Sidang Keliling juga merupakan salah satu program unggulan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan peradilan yang berada di bawahnya. Sidang Keliling merepresentasikan access to justice for all. Prosedur Sidang Keliling mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Prosedur dimaksud diatur dalam Pasal 14 - Pasal 21.

1. Prosedur Layanan Sidang Keliling

- Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang keliling (sidang di luar gedung Pengadilan) berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara dan keterjangkauan wilayah;
- Lokasi penyelenggaraan sidang keliling dapat ditetapkan melalui koordinasi antara Pengadilan Negeri dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain;
- Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menyelenggarakan sidang keliling secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan;
- Dalam menyelenggarakan sidang keliling secara terpadu, Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Instansi lain (Pemerintah Daerah/ Kementerian/ Lembaga Lain) yang berwenang untuk keperluan penerbitan dokumen-dokumen sebagai akibat dari putusan pengadilan pada sidang keliling tersebut;
- Sidang keliling dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum. Pengadilan dan Posbakum Pengadilan melakukan pendataan kebutuhan dan koordinasi penyelenggaraan sidang keliling dimaksud

2. Ruang Lingkup Sidang Keliling

Pengadilan Negeri dapat menyelenggarakan sidang keliling khususnya untuk perkara- perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana.

3. Pengamanan Sidang Keliling

- Penyelenggaraan sidang keliling di daerah yang memiliki risiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan (Polri, TNI, atau unit pengamanan lainnya);
- Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi lain atau unit keamanan setempat.

4. Lokasi sidang keliling
 - a. Sidang keliling dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang di tempat sidang tetap atau sidang keliling pada kantor pemerintah setempat;
 - b. Dalam hal tersedia fasilitas tempat siding tetap atau tempat siding keliling permanen yang dimiliki Pengadilan Negeri, sidang keliling juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut;
 - c. Ruangan dan lokasi sidang keliling harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan lanjut usia.
5. Petugas sidang keliling
 Petugas sidang keliling terdiri dari:
 - Hakim; dan
 - Panitera Pengganti
 Pelaksanaan sidang keliling juga dapat diikuti oleh Hakim Mediator / Mediator Independen, Jurusita, Satuan Pengamanan, Pejabat, Staf Pengadilan, dan Unsur Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sesuai kebutuhan.
6. Pembiayaan dan Penganggaran sidang keliling
 - a. Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada Anggaran Satuan Pengadilan atau DIPA Pengadilan Negeri dan terdiri dari:
 - Biaya tempat persidangan (jika diperlukan);
 - Biaya perlengkapan sidang (jika diperlukan);
 - Biaya perjalanan dinas Hakim, Panitera, Jurusita, dan petugas lainnya.
 - b. Dalam hal sidang keliling mengikut sertakan petugas Posbakum Pengadilan Negeri, maka biaya perjalanan dinas mencakup juga untuk petugas Posbakum Pengadilan.
 - c. Dalam hal ada petugas atau pihak lain selain petugas Posbakum Pengadilan yang ingin ikut dalam sidang keliling memberikan penyuluhan hukum, maka biaya perjalanan ditanggung sendiri oleh orang atau pihak lain tersebut
7. Mekanisme penggunaan anggaran sidang keliling
 - a. Untuk kepentingan perencanaan, setiap Pengadilan Negeri menentukan anggaran sidang keliling berdasarkan perkiraan satuan biaya dan jumlah perkara dalam sidang keliling;
 - b. Untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan Negeri dapat menggunakan anggaran sidang keliling berdasarkan biaya aktual selama tidak kurang dari target jumlah sidang keliling dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran sidang keliling yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan atau DIPA Pengadilan Negeri;
 - c. Bendahara Pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai pertanggungjawaban keuangan dan mencatat setiap pengeluaran dalam buku yang disediakan untuk itu.

Untuk wilayah pengadilan Tinggi Makassar Satuan Kerja yang mendapatkan anggaran untuk biaya Sidang Keliling/Pelayanan terpadu ada 9 (sembilan) Pengadilan Negeri yaitu:

Tabel II.11. Alokasi dan Realisasi Anggaran Sidang Keliling Tahun 2024

NO	NAMA SATKER	JUMLAH PERKARA MELALUI SIDANG KELILING TAHUN 2024	PAGU ANGGARAN		PERSEN REALISASI
			PAGU	REALISASI	
			(Rp)	(Rp)	
1	PN SUNGGUMINASA	58	19,273,000	18,900,000	98.06%
2	PN PANGKAJENE	13	16,060,000	11,550,000	71.92%

3	PN PAREPARE	11	4,000,000	4,000,000	100%
4	PN SELAYAR	35	74,949,000	74,949,000	100%
5	PN SINJAI	8	6,424,000	6,424,000	100.00%
6	PN WATAMPONE	10	10,707,000	10,700,500	99.94%
7	PN SENGKANG	25	38,550,000	36,125,172	93.71%
8	PN MAKALE	8	25,000,000	25,000,000	100%
9	PN MALILI	27	28,909,000	28,570,000	98.83%

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Perdata (Prodeo)

a. Pengadilan Negeri setempat memberikan pelayanan permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) kepada pihak-pihak yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan:

- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
- Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau
- Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat.

b. Prosedur permohonan pembebasan biaya perkara:

- Permohonan diajukan secara tertulis oleh Penggugat/Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan sebelum perkaranya didaftar dan diregister di Kepaniteraan Muda Perdata.
- Untuk permohonan pembebasan biaya perkara perdata yang diajukan oleh Tergugat/Termohon dapat diajukan sebelum yang bersangkutan mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
- Jika berkas permohonan pembebasan biaya perkara dianggap telah lengkap dan memenuhi persyaratan, Ketua Pengadilan Negeri setelah memperhatikan pertimbangan Panitera, segera menerbitkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada tanggal yang sama dengan diajukan surat permohonannya.
- Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan Penggugat/Pemohon ditolak, maka Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan penolakannya sehingga proses perkara baru dapat dilaksanakan setelah Penggugat/Pemohon membayar panjar biaya perkara;
- Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang telah diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri tersebut berlaku pula untuk perkara yang sama apabila Pemohon mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.

- Apabila permohonan pembebasan biaya perkara tersebut baru diajukan untuk pertama kalinya oleh Pemohon pada tingkat banding, kasasi atau Peninjauan Kembali, maka:
1. Permohonan pembebasan biaya perkara pada tingkat banding harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat melalui Panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan atau diberitahukan kepadanya;
 2. Permohonan pembebasan biaya perkara pada tingkat kasasi harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat melalui Panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat banding diberitahukan kepadanya;
 3. Permohonan pembebasan biaya perkara pada tingkat Peninjauan Kembali harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat melalui Panitera dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan undang-undang terkait pengajuan Peninjauan Kembali.

Untuk wilayah pengadilan Tinggi Makassar Satuan Kerja yang mendapatkan anggaran untuk Prodeo ada 16 (enam belas) Pengadilan Negeri yaitu:

Tabel II.12. Alokasi dan Realisasi Anggaran Prodeo Tahun 2024

NO	NAMA SATKER	JUMLAH PERKARA PRODEO TAHUN 2024	PAGU ANGGARAN		PERSEN REALISASI
			PAGU	REALISASI	
			(Rp)	(Rp)	
1	PN MAKASSAR	6	1,340,000	640,000	47.76%
2	PN SUNGGUMINASA	22	2,680,000	2,610,000	97.39%
3	PN TAKALAR	3	2,185,000	600,000	27.46%
4	PN MAROS	4	450,000	412,000	91.56%
5	PN PANGKAJENE	1	670,000	125,000	18.66%
6	PN BARRU	1	120,000	120,000	100.00%
7	PN PAREPARE	3	510,000	240,000	47.06%
8	PN SIDRAP	1	670,000	142,000	21.19%
9	PN PINRANG	6	670,000	600,000	89.55%
10	PN ENREKANG	2	1,340,000	240,000	17.91%
11	PN WATANSOPPENG	2	1,340,000	1,040,000	77.61%
12	PN BULUKUMBA	7	670,000	595,000	88.81%
13	PN WATAMPONE	2	3,350,000	200,046	5.97%
14	PN SENGKANG	4	1,116,000	644,000	57.71%
15	PN PALOPO	2	1,340,000	330,000	24.63%
16	PN BELOPA	1	670,000	480,000	71.64%

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Tinggi Makassar, sebagai lembaga Pengadilan Tingkat Banding, berdasarkan Peraturan Perundangan yang ada, diberi beban untuk melakukan pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia bagi aparat Peradilan Umum yang ada di Sulawesi Selatan, baik yang menyangkut tenaga Teknis Yudisial maupun tenaga Non Teknis Yudisial.

Secara keseluruhan, jumlah personil yang menjadi binaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Makassar **1147** (seribu seratus empat puluh tujuh) orang, dengan rekapitulasinya adalah sebagai berikut :

Tabel III.1. Rekap Personil Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2024

NO.	URAIAN JABATAN	JUMLAH		KET
		TERISI	KOSONG	
1	Pimpinan Pengadilan (Ka / Wk)	43	5	
2	Hakim Tinggi / Hakim / Cakim	220	-	
3	Struktural Kepaniteraan	92	8	
4	Panitera Pengganti	141	-	
5	Kejurusitaan (JS / JSP)	80	-	
6	Struktural Sekretariat	85	12	
7	Fungsional tertentu	47	-	
8	Staf	161	-	
9	Tenaga Honorer	278	-	
JUMLAH		1147	25	

Dari Tabel III.1 tersebut, maka dapatlah diketahui perbandingan jumlah tenaga Hakim dengan jumlah tenaga Fungsional Kepaniteraan dan Kejurusitaan, sebagaimana tersebut pada Tabel. Dan dari Tabel ini, maka dengan berpedoman kepada Peraturan yang ada (Nomor: 140/KMA/ SK/VIII/2013), yang menyebutkan bahwa Rasio Formasi perbandingan antara Majelis Hakim (artinya 3 orang Hakim) dengan Panitera Pengganti (Pejabat Fungsional Kepaniteraan).

Maka usulan dari Pengadilan Negeri untuk pengangkatan Panitera Pengganti baru yang melebihi rasio penanganan perkara akan ditolak, demikian pula sebaliknya, bila berdasarkan data yang ada jumlah Panitera Pengganti masih kurang dan beban perkaranya relatif banyak, maka usulan tersebut akan diterima dan diteruskan ke Mahkamah Agung untuk diproses lebih lanjut/dimintakan persetujuan untuk pengangkatannya.

Berikut ini rekapitulasi mutasi pada wilayah Pengadilan Tinggi Makassar selama Tahun 2024 sebagai berikut :

A. MUTASI

Tabel III.2. Rekap Mutasi Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2024

NO	SATKER	MUTASI PIMPINAN			MUTASI HAKIM/HAKIM TINGGI			MUTASI KEPANITERAAN			MUTASI KEJURU SITAAN			MUTASI KESEKRETARIATAN		
		MASUK	KELUAR	PENSIUN	MASUK	KELUAR	PENSIUN	MASUK	KELUAR	PENSIUN	MASUK	KELUAR	PENSIUN	MASUK	KELUAR	PENSIUN
1	PT MAKASSAR	1	1	-	11	15	-	5	2	4	-	-	3	1	-	1
2	PN MAKASSAR	2	1	-	6	6	-	4	7	-	1	1	-	2	-	1
3	PN SUNGGUMINASA	-	-	-	1	2	-	13	4	-	-	-	-	-	-	1
4	PN WATAMPONE	1	1	-	-	2	-	10	4	-	-	1	-	1	-	-
5	PN MAROS	1	1	-	-	4	-	5	7	-	-	-	1	4	1	-
6	PN MAKALE	2	2	-	3	2	-	2	2	-	-	-	5	3	-	-
7	PN PALOPO	2	2	-	1	1	-	4	3	-	-	-	-	1	-	1
8	PN SENGKANG	1	1	-	1	1	-	4	4	-	-	-	1	-	1	1
9	PN BULUKUMBA	-	-	-	1	1	-	3	-	-	1	-	1	-	-	-
10	PN PANGKAJENE	2	1	-	-	3	-	4	1	1	-	-	1	-	-	-
11	PN BARRU	1	1	-	1	3	-	1	1	-	-	-	1	3	1	1
12	PN PAREPARE	2	2	-	1	1	-	2	4	1	-	-	1	1	1	-
13	PN SIDENRENG RAPPANG	1	1	-	2	-	-	4	1	-	-	-	1	1	-	2
14	PN PINRANG	1	1	-	1	1	-	4	4	1	-	-	-	2	-	-
15	PN TAKALAR	1	1	-	1	1	-	2	3	1	-	-	-	-	1	1
16	PN JENEPONTO	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
17	PN BANTAENG	1	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-
18	PN SINJAI	2	2	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-
19	PN WATANSOPPENG	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	1	1	1	-	1
20	PN SELAYAR	1	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-
21	PN MALILI	-	1	-	-	1	-	2	3	-	-	-	4	1	-	-
22	PN MASAMBA	1	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	1
23	PN ENREKANG	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
24	PN BELOPA	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	1

Mutasi Keluar

Yang dimaksud mutasi keluar adalah pindahan dari keluar Sulawesi Selatan atau keluar PN dalam wilayah Sulawesi Selatan akan tetapi dengan kedudukan yang sama di PN yang lama maupun yang baru.

Tabel III.3. Mutasi Keluar Tahun 2024

NO	SATUAN KERJA	NAMA	PANGKAT	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA
1	PT MAKASSAR	Dr. DJANI KO M.H.GIRSANG, S.H., M.Hum.	Pembina Utama (IV/e)	Wakil Ketua	PT Makassar
		Dr. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H.	Pembina Utama (IV/e)	Hakim Tinggi PT Banten	Hakim Tinggi PT Makassar
		TAHSIN, S.H., M.H.	Pembina Utama (IV/e)	HT PT Jakarta	Hakim Tinggi PT Makassar
		Dr. TAMRIN TARIGAN, S.H., M.H., M.M.	Pembina Utama (IV/e)	H PT Surabaya	Hakim Tinggi PT Makassar
		HASTOPO, S.H., M.H.	Pembina Utama (IV/e)	HT PT Jawa Tengah	Hakim Tinggi PT Makassar
		MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., S.H., M.H.	Pembina Utama (IV/e)	Panitera Pt Surabaya	Hakim Tinggi PT Makassar
		BHASKARA PRABA BHARATA, S.H.	Pembina Utama (IV/e)	HT PT Jawa Tengah	Hakim Tinggi PT Makassar
		HARI WIDODO, S.H., M.H.	Pembina Utama (IV/e)	HT PT Surabaya	Hakim Tinggi PT Makassar
		Dr. H. SULTHONI, S.H., M.H.	Pembina Utama (IV/e)	HT PT Jakarta	Hakim Tinggi PT Makassar
		GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.	Pembina Utama (IV/e)	HT PT Medan	Hakim Tinggi PT Makassar
		JHON HALASAN BUTAR BUTAR, S.H., M.Si., M.H.	Pembina Utama (IV/e)	HT PT Jawa Tengah	Hakim Tinggi PT Makassar
		PUDJI TRI RAHADI, S.H.	Pembina Utama (IV/e)	HT PT Surabaya	Hakim Tinggi PT Makassar
		BAMBANG SETIYANTO, S.H.	Pembina Utama (IV/e)	HT PT Jawa Tengah	Hakim Tinggi PT Makassar
		MUstari, S.H.	Pembina Utama (IV/e)	HT PT Surabaya	Hakim Tinggi PT Makassar
		TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum	Pembina Utama (IV/e)	HT PT Yogyakarta	Hakim Tinggi PT Makassar
2	PN MAKASSAR	Hendri Tobing, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua PN Jakarta Pusat	Ketua PN Makassar
		Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim Tinggi PT Makassar	Ketua PN Makassar
		Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.	Pembina Utama Muda, IV/c	Hakim Tingkat Pertama PN Surabaya	Hakim Tingkat Pertama PN Makassar
		Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim Tingkat Pertama PN Surabaya	Hakim Tingkat Pertama PN Makassar
		Punwanto s. Abdullah, S.H., M.H	Pembina Tk.I, IV/b	Hakim Tingkat Pertama PN Jakarta Pusat	Hakim Tingkat Pertama PN Makassar
		Royke Harold Inkiwang, S.H	Pembina Tk.I, IV/b	Wakil Ketua PN Limboto	Hakim Tingkat Pertama PN Makassar

		Dr. Ahyar Parmika, S.H., M.H		Pembina Tk.I, IV/b	Panitera PN Semarang	Panitera PN Makassar
		Sugeng, S.H., M.H		Pembina, IV/a	Panitera Muda Tipikor PT Makassar	Panitera Muda Pidana PN Makassar
		A Baso Habibi, S.E., S.H		Penata Tk. I, III/d	Panitera Pengganti PN Maros	Jurusita PN Makassar
		Ardiansyah, S.H		Penata Muda, III/a	Panitera Pengganti PN Maros	Jurusita PN Makassar
		Sandi, S.H		Penata, III/c	Panitera Muda Pidana PN Maros	Panitera Pengganti PN Makassar
		Tinna Simangunsong, SKM		Penata Tk. I, III/d	Arsiparis Ahli Muda PN Surabaya	Arsiparis Ahli Muda PN Makassar
		Lydia Siagian, S.H.Int.,M.M		Penata Muda Tk. I, III/b	Operator - Penata Layanan Operasional PN Sidoarjo	Operator - Penata Layanan Operasional PN Makassar
		Jihan Hasmin, S.H		Penata, III/c	Panitera Pengganti PN Jakarta Utara	Panitera Pengganti PN Makassar
		Abd. Gani, S.H		Penata Tk. I, III/d	Panitera Pengganti PT Sulbar	Panitera Pengganti PN Makassar
		Burhanuddin, S.H., M.H.		Pembina, IV/a	Panitera Pengganti PT Sulbar	Panitera Pengganti PN Makassar
		Rosanny Novianty Nika, A.Md.Kom, S.H.,M.H.		Penata Tk. I, III/d	Panitera Pengganti PN Manado	Panitera Pengganti PN Makassar
3	PN SUNGGUMINASA	Hasanuddin m., SH., MH.		Pembina Utama Muda IV/c	Wakil Ketua PN Cibinong	Wakil Ketua PN Sungguminasa
		Benyamin, SH.		Pembina Utama Muda IV/c	Hakim PN Palngkaraya	Hakim PN Sungguminasa
		Makmur, SH., MH.		Pembina / IV/a	Panitera Muda Pidana PN Makale	Panitera Pengganti
		Nuriya Awad, SH.		Penata Tk. I, III/d	Panitera Muda Hukum PN Makassar	Panitera Muda Perdata PN Sungguminasa
		Musdalifah, SH., MH.		Pembina / IV/a	Panitera Muda Pidana PN Makassar	Panitera Muda Pidana PN Sungguminasa
		Wahyu Mulyadi A. Md.		Penata Muda / III/a	Panitera Pengganti PN Pinrang	Jurusita PN Sungguminasa
4	PN WATAMPONE	H. Sulaiman, S.H		III/d	Panitera PN Belopa	Panmud Pidana PN Watampone
		Armansyah, S.H., M.H.		III/d	Panmud Hukum PN Sengkang	Panitera Pengganti PN Watampone
		Vanny Febrianti, A.Md.		III/c	Pengelola Data dan Informasi Badium MA	Pengelola BMN PN Watampone
		Ibnu Rusydi, S.H.		IV/b	Hakim Yustisi PT Makassar	Hakim Tingkat Pertama PN Watampone
		Novie Ermawati, S.H., M.H.		IV/b	Hakim Tingkat Pertama PN Bale Bandung	Hakim Tingkat Pertama PN Watampone
		Safri, S.H., M.H.		IV/c	Ketua Pengadilan Negeri Kendari	Ketua Pengadilan Negeri Watampone
		Wahida Achmad, S.H.		Penata Tingkat I, III/d	Panitera PN Sinjai	Panmud Pidana PN Watampone
		Harly Yunus, S.H.		Pembina Tingkat I, IV/b	Panitera PT Sulawesi Barat	Panitera PN Watampone
5	PN MAROS	Khairul, SH., MH.		Pembina Tk. I / IV/b	Ketua PN Kediri	Ketua PN Maros

	Firdaus Zainal, SH., MH.		Pembina / IV/a	Wakil Ketua PN Jenepono	Hakim PN Maros
	Abdul Hakim, SH., MH.		Penata Tk. I, III/d	Hakim PN Palu	Hakim PN Maros
	Sulasmy Tri Juniarty, SH.		Pembina / IV/a	Hakim PN Kendari	Hakim PN Maros
	Wiryawan Hadi Kusuma, SH.		Penata Tk. I, III/d	Hakim Yustisi PT Kendari	Hakim PN Maros
	Muhammad Ilyas, SH.		Penata Tk. I / III/d	Panitera Pengganti PN Jakarta Barat	Panitera Muda Pidana PN Maros
	Afandi, SH.		Penata Tk. I / III/d	Panitera Muda Hukum PN Sungguminasa	Panitera Muda Perdata PN Maros
	Hernawati, SH.		Penata Tk. I / III/d	Panitera Pengganti PN Palu	Panitera Pengganti PN Maros
	Dian Adriana Wahid, SH.		Penata / III/c	Panitera Pengganti PN Kraksaan	Panitera Pengganti PN Maros
	A. Wiwik Pratiwi, SH.		Penata / III/c	Panitera Muda PN Pangkajene	Panitera Pengganti PN Maros
	Sangkala, SH.		Penata / III/c	Panitera Pengganti PN Pangkajene	Jurusita PN Maros
	Hartati, SH.		Penata Muda Tk. I / III/b	Panitera Pengganti PN Sengkang	Jurusita Pengganti PN Maros
	Intanghidayanti Saleh, ST.		Penata / III/c	Klerik-Penelaah Teknis Kebijakan PA Jakarta Pusat	Klerik-Penelaah Teknis Kebijakan PN Maros
	Hapipah Masnaeni, SE.		Penata Muda Tk. I / III/b	Operator-Penata Layanan Operasional PT Makassar	Operator-Penata Layanan Operasional PN Maros
	Andi Mihrum Andi Miri, SH., MH.		Penata Muda Tk. I / III/b	Panitera Pengganti PN Sengkang	Analisis Perkara Peradilan PN Maros
	Dhea Ananda Nabella, A.Md.		Pengatur / III/c	Arsiparis PN Bantul	Arsiparis PN Maros
6	1. WAHIDA ACHMAD, S.H.		PENATA TINGKAT I (III/d)	PANITERA MUDA PERDATA PN SENGKANG	PANITERA MUDA PIDANA PN WATAMPONE
	2. FAJAR ADI NURSASONGKO, S.H.		PENATA MUDA (III/a)	ANALIS PERKARA PERADILAN PN SENGKANG	CALON HAKIM PA SEMARANG
	3. ANDI ROBANSAH, S.H.		PENATA MUDA (III/a)	ANALIS PERKARA PERADILAN PN SENGKANG	CALON HAKIM PA SEMARANG
	4. HASRAWATI YUNUS, S.H., M.H.		PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	KETUA PN SENGKANG	KETUA PN PEMALANG
	5. ERWAN, S.H., M.H.		PENATA TINGKAT I (III/d)	HAKIM PN SENGKANG	HAKIM PN SINGKAWANG
	6. NURFATIMAH, S.H.		PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	ANALIS PERKARA PERADILAN PN SENGKANG	PANITERA PENGGANTI PN ENREKANG
7	1. EKO WIRANDA SIMBOLON, SH		Penata Muda (III/a)	ANALIS PERKARA PERADILAN PN BULUKUMBA	CALON HAKIM PN INDRAMAYU
	2. JOSUA NAVIRIO PARDEDE, SH		Penata Muda (III/a)	ANALIS PERKARA PERADILAN PN BULUKUMBA	CALON HAKIM TUBAN
	3. MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, SH, MH		Penata Tk. I (III/d)	HAKIM PN BULUKUMBA	HAKIM PN SINGKAWANG
8	Galih Dewi Inanti Akhmad, SH		Pembina Tk. I (IV/b)	KPN Pangkajene	Hakim PN Serang

		Benny Haninta Surya, SH	Penata Muda Tk.I (III/b)	Hakim PN Pangkajene	Hakim PN Bangkalan
		Tiara Khurin In Firdaus, SH	Penata Muda Tk.I (III/b)	Hakim PN Pangkajene	Hakim PN Kab Madiun
		Titites Asrida, SH	Penata Muda Tk.I (III/b)	Hakim PN Pangkajene	Hakim PN Kuningan
		Irdin Riandi Thahir, SH	Penata Tk. I (III/d)	PP PN Pangkajene	PP PN Sungguminasa
9	PN BARRU	1. ANDI ILHAM TAUFIK RAMLI, SH	Penata (III/a)	Analisis Perkara Peradilan /Cakim PN.Makassar	Analisis Perkara Peradilan PN.Barru
		2. DIANITA JEANNETTE HILLARY PANGARIBUAN, S.H.	Penata (III/a)	Analisis Perkara Peradilan/ Cakim PN.Makassar	Analisis Perkara Peradilan PN.Barru
		3. SURAHMI NIHAYA, S.H.,M.H.	Penta (III/c)	Panitera Muda PN,Pare-pare	Panitera Pengganti PN.Barru
		4. FATCHUR ROCHMAN, SH.	Penta Tk.I (III/b)	Hakim PN. Sampang	Hakim PN.Barru
		5. ADITYA YUDI TAURISANTO, SH	Penta Tk.I (III/b)	Hakim PN.Kuningan	Hakim PN.Barru
		6. FIRMANSYAH TAUFIK,S.H.	Penta Tk.I (III/b)	Hakim.PN. Ngawi	Hakim.PN. Barru
		7. Hj. NUR AFAH, S.H.	Pembina (IV/a)	Ketua PN.Takalar	Wakil Ketua PN.Barru
		8. RESTU CHARUNIA RANAFITRI, A.Md	Pengatur Tk.I (II/d)	Arsiparis PN Pekalongan	Arsiparis PN.Barru
10	PN PAREPARE	1. KHUSNUL KHAMIMAH, S.H.MM.H	Pembina (IV/b)	WKPN Wates	KPN Parepare
		2. MINARTI, S.H.,M.H	Penata (III/c)	Panmud Hukum PN Barru	PP PN Parepare
		3. HERLINA RAHMAN,S.H	Penata (III/c)	PP PN Pangkajene	Staf Kepaniteraan Perdata (Kasir) PN Pare-Pare
		4. ANDI FIRMAN QHADAFI, S.H	Penata (III/c)	PP PN Pinrang	JS PENGGANTI PN.PARE-PARE
		5. FAUSIAH, S.H.,M.H	Pembina (IV/a)	KPN Enrekang	WKPN Parepare
		6. NI KADEK YULIANTI, S.H.,M.H.	Penata (III/d)	Panmud Hukum PN Amlapura	Panmud Hukum PN Parepare
		7. ROSIANA DEWI, S.H	Penata MUDA (III/a)	Calon Hakim	Analir Perkara PN Parepare
		8. WAHYU NENGSIH, A.Md	Pengatur (II/c)	Arsiparis Dirjen Badilum	Arsiparis PN Parepare
		9. BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.,M.H	Penata (III/d)	Hakim PN Maros	Hakim PN Parepare
		10. NOPVI SEDYA NINGSIH, A.Md	Pengatur (II/c)	Pengelola Penanganan Perkara PN Pati	Pengelola Penanganan Perkara PN Parepare
11	PN SIDENRENG RAPPANG	1. Jumadi Apri Ahmad, SH, MH	Pembina Tk. I IV/b	Ketua PN. Sidrap	Wakil Ketua PN. Maros
		2. Kamil, SE	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris PN. Sidrap	Sekretaris PN. Maros
		3. Dewi Satriani Yusuf, SH	Penata Muda Tk. I III/b	Panitera Pengganti PN. Sidrap	Panmud Hukum PN Parepare
12	PN PINRANG	1. DONDY HOSEA PANGIHUTAN, S.H.	PENATA MUDA/III.a	ANALIS PERKARA PN. PINRANG	CALON HAKIM PN.CIAMIS
		2. ANDREAS SAUT MANGALAN, S.H.	PENATA MUDA/III.a	ANALIS PERKARA PN. PINRANG	CALON HAKIM PN PANGKAL PINANG

	3. HAMZAH, SH		PENATA Tk. I (III/d)	PANITERA MUDA PN. PINRANG	PANITERA MUDA PN MAMUJU KELAS I.A
	4. H. AMIR MAHMUD, SH.		PENATA Tk. I (III/d)	PANITERA PN PINRANG	PANITERA PN PALOPO KLS 1.B
	5. SAHESTI NINGTYAS, A.Md		PENGATUR (II/c)	ARSIPARIS TERAMPIL PN PINRANG	ARSIPARIS TERAMPIL PN DEMAK
	6. YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.		PENATA MUDA Tk. I (III.b)	HAKIM PN PINRANG	HAKIM PN. MAKALE
	7. NOVIYANTO HERMAWAN, SH		Pembina Tk.I / IV/b	KETUA PN PINRANG	WAKIL KETUA PN. KRAKSAAN Kls 1B
	8. MUWAFIQAH, SH		PENATA (III/c)	KASUBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA PN.PINRANG	KASUBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA PN.BULUKUMBA
13	1. TRIADI AGUS PURWANTO, S.H., M.H.		1. Pembina Tk.IV/b	1. Wakil Ketua PN Bengkalis	1. Ketua Pengadilan Negeri Takalar
	2. LAURENT ENRICO ADITYA WAHYU SAPUTRA, S.H., M.H.		2. Penata Tk.I/III/c	2. Hakim Pengadilan Negeri Takalar	2. Hakim Pengadilan Negeri Takalar
	3. Drs. Andi Baso Opu, S.H.		3. PENATA Tk. I (III/d)	3. Panitera Pengadilan Negeri Selayar	3. Pamitera Pengadilan Negeri Takalar
	4. MANGGALA WIDI ADIANTO, S.H.		4. PENATA MUDA/III.a	4. Cakim Pengadilan Negeri Mungkid	4. Analisis Perkara PN Takalar
	5. FRANSISKUS XAVERIUS RIO PANANGIAN GULTOM, S.H.		5. PENATA MUDA/III.a	5. Cakim Pengadilan Negeri Bantul	5. Analisis Perkara PN Takalar
14	1. ENDAH SRI ANDRIYATI, S.H., M.H.		Pembina Tk.I /IV/b	KETUA PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SENGKANG Kls 1B
	2. ENDRATNO RAJAMAI, S.H., M.H.		Pembina /IV/a	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK
	3. ST. USHBUL AINI, S.H., M.H.		Penata Muda Tk. I / III/b	HAKIM PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	HAKIM PENGADILAN NEGERI TAKALAR
	4. BILDEN, S.H.		Penata Muda Tk. I / III/b	HAKIM PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	HAKIM PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
	5. ILHAM NAKIB, SE.		Penata III/d	SEKRETARIS PN JENEPONTO	SEKRETARIS PN BARRU
15	1. MARHANI M, S.H., M.H.		Pembina (IV/a)	PANITERA PENGADILAN NEGERI SENGKANG	PANITERA PENGADILAN NEGERI BANTAENG
	2. RACHMAT R, S. Kom.		Penata Tk. I (III/d)	SEKRETARIS PN JENEPONTO	KASUBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA PN BANTAENG
	3. NUURHIKMAH, SH		Penata Tk. I (III/d)	PANITERA MUDA PIDANA PN BULUKUMBA	PANITERA MUDA PIDANA PN BANTAENG
	4. HARMAWATI, SH		Penata Muda Tk. I (III/b)	PANITERA PENGGANTI PN BULUKUMBA	PANITERA PENGGANTI PN BANTAENG
16	1. SIGIT SUSANTO,S.H.,M.H.		Pembina Tk.I/IV/b	HAKIM PENGADILAN NEGERI BANDUNG	KETUA PENGADILAN NEGERI SINJAI
	2. ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H.		Pembina Tk.I/IV/b	KETUA PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SINJAI
	3. ERWIN SISWANTO, S.H.		Penata Tk.I/III/c	SEKRETARIS PN SIDENRENG RAPPANG	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
	4. SYAMSUL BAHRI, SH		Penata Tk.I/III/d	PANITERA PENGGANTI PN BULUKUMBA	PANITERA PENGGANTI PN SINJAI

		5.RODDING, SH		Penata Tk.I/III/d	PANITERA PENGGANTI PT MAKASSAR	PANITERA PN SINJAI
		6.UMI AFROKAH, A.Md.,A.B		Pengatur/III/c	ARSIPARIS PN BATANG KELAS II	ARSIPARIS PN SINJAI
17	PN WATANSOPPENG	1. MUHAMMAD AQWAM THARIQ, S.H.		Penata Muda (III/a)	CAKIM PA MALANG	ANALIS PERKARA PERADILAN PN WATANSOPPENG
		2. GILANG TAUFIK HERNAWAN, S.H.		Penata Muda (III/a)	CAKIM PN SALATIGA	ANALIS PERKARA PERADILAN PN WATANSOPPENG
		3. IKA NURJANNAH, ST		Penata Muda (III/a)	PRANATA KOMPUTER PN KEBUMEN	PRANATA KOMPUTER PN WATANSOPPENG
		4. ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, S.H., M.H.		Penata Muda Tk. I (III/b)	HAKIM PN RABA BIMA	HAKIM PN WATANSOPPENG
18	PN SELAYAR	AGUNG BUDIANTO, S.Kom		Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama PN Banyumas	Pranata Komputer Ahli Pertama PN Selayar
19	PN MALILI	HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.		Pembina Tk. I (IV/b)	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar	Ketua Pengadilan Negeri Malili
		HARIS FAWANIS, S.H.		Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim Pengadilan Negeri Penajam	Hakim Pengadilan Negeri Malili
		AHMAD AMIN, S.H.		Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang	Panitera Pengadilan Negeri Malili
		LEMAN, S.E., M.M.		Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris Pengadilan Negeri Sengkang	Sekretaris Pengadilan Negeri Malili
		ANDRE WIJAYA, S.H.		Penata Muda (III/a)	Klerik - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Malili
		CORNELIUS CHRISTIAN CHANDRA, S.H.		Penata Muda (III/a)	Klerik - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Malili
20	PN MASAMBA	JUTIAR RONAL, S.H.		PEMBINA Tk.I (IV/b)	KETUA PN MUARA BUNGO	WAKIL KETUA PN MASAMBA
		USMAN, S.H.		PENATA Tk. I (III/d)	PANITERA PN PINRANG	PANITERA PN MASAMBA
		INDRA HERIYANTO, S.H.		PENATA Tk. I (III/d)	PANITERA MUDA HUKUM PN WATAMPONE	PANITERA MUDA PERDATA PN MASAMBA
		MELINDA SETIAWATI, S.H.		PENATA MUDA (III/a)	PANITERA PENGGANTI PN WATANSOPPENG	ANALIS PERKARA PERADILAN PN MASAMBA
		ESCHER KALAPADANG, S.T., M.T.		PENATA (III/c)	Pengelola Layanan Pengadaan PN MASAMBA	PENATA LAYANAN OPERASIONAL PN MAKALE
21	PN ENREKANG	1. ARI PRABOWO, S.H., M.H. 2. FITRIAH ADE MAYA, S.H.		1. PEMBINA (IV/b) 2. PEMBINA (IV/b)	1.WAKIL KETUA PN KEBUMEN 2.KETUA PN SIDRAP	1. KETUA PN ENREKANG 2. WAKIL KETUA PN ENREKANG
22	PN BELOPA	1. MUH. ALAUDDIN, S.H.		1. PENATA TK. I (III/d)	1. PANITERA MUDA PERDATA	3. PANITERA MUDA PIDANA PN. PALOPO KELAS I B
23	PN PALOPO	1. I MADE BIMA CAHYADI, S.H.		1. PENATA MUDA (III/a)	1. APP (CAKIM)	1. APP (CAKIM) PN BANYUWANGI
		2. BOY KRESENDO SITUMORANG		2. PENATA MUDA (III/a)	2. APP (CAKIM)	2. APP (CAKIM) PN BOYOLALI
		3. HASMA, H.,S.E.,S.H.		3. PEMBINA (IV/a)	3. PANITERA	3. PANITERA MUDA HUKUM PT.MAKASSAR

		4. YULIANA AMPULEMBANG, S.H.	4. PENATA TK I (III/d)	4. PANITERA MUDA HUKUM	4. PANITERA PN MASAMBA
		5. TOMBI, S.H.	5. PENATA TK I (III/d)	5. PANITERA MUDA PIDANA	5. PANITERA PN MALILI
		6. GIOVANI YOGISWARA, S.E.	6. PENATA MUDA TK. I (III/b)	6. PENATA LAYANAN OPERASIONAL	6. PENATA LAYANAN OPERASIONAL PN KARANG ANYAR
		7. AHMAD ISMAIL, S.H.M.H.	7. PEMBINA TK I (IV/b)	7. KETUA	7. KETUA PN BONDOWOSO
		8. MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H.	8. PEMBINA TK I (IV/b)	8. WAKIL KETUA	8. KETUA PN MAKALE
		9. ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, S.H.M.H.	9. PEMBINA (IV/a)	9. HAKIM	9. HAKIM PN BLITAR
		10. MUH. ALAUDDIN, S.H.	10. PENATA TK I (III/d)	10. PANITERA MUDA PIDANA	11. PANITERA PN SELAYAR
		11. MIRAYATI BOTTO, S.Kom., S.H., M.H.	11. PENATA TK I (III/d)	11. APP	11. PANITERA PENGGANTI PN KEDIRI
24	PN MAKALE	1. RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.	1. PEMBINA TK. I (IV/B)	1. HAKIM PN JAKARTA SELATAN	1. KETUA PN MAKALE
		2. I KOMANG DEDIEK P., A.H., M.H.	2. PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)	2. KETUA PN PALOPO	2. WAKIL KETUA PN MAKALE
		3. RAJA BONAR WANSI SIREGAR, S.H., M.H.	3. PENATA TK. I (III/D)	3. HAKIM PN CIANJUR	3. HAKIM PN MAKALE
		4. HELKA RERUNG, S.H., M.H.	4. PENATA TK. I (III/D)	4. HAKIM PN PALOPO	4. HAKIM PN MAKALE
		5. ANDI MAKMUR, S.H.	5. PEMBINA (IV/A)	5. PANITERA PENGGANTI PT MAKASSAR	5. PANITERA PN MAKALE
		6. KATRINA SURYA SARANGA, S.H.	6. PENATA TK. I (III/D)	6. PANITERA PENGGANTI PT KENDARI	6. PANITERA MUDA HUKUM PN MAKALE
		7. MELIANA BANNE LAYUK, S.H.	7. PENATA MUDA TK. I (III/B)	7. KEPALA SUB BAGIAN PTIP PN ENREKANG	7. OPERATOR PENATA LAYANAN OPERASIONAL PN MAKALE
		8. NUR ROHMAN FAUZI, S.Kom.	8. PENATA MUDA (III/A)	8. KLEREK PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN PN WONOGIRI	8. KLEREK PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN PN MAKALE
		9. ROSARI, S.H.	9. PENATA MUDA (III/A)	9. KLEREK ANALIS PERKARA PERADILAN PN PALU	9. KLEREK ANALIS PERKARA PERADILAN PN MAKALE

Mutasi Masuk

Yang dimaksud mutasi masuk adalah pindahan masuk ke wilayah Sulawesi Selatan atau masuk PN dalam wilayah Sulawesi Selatan akan tetapi dengan kedudukan yang sama di PN yang lama maupun yang baru.

Tabel III.4. Mutasi Masuk Tahun 2024

NO	SATUAN KERJA	NAMA	PANGKAT	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA
1	PT MAKASSAR	NURSYAM, S.H., M.Hum.	Pembina Utama (IV/e)	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
		MERY TAAT ANGGARASIH, SH.MH.	Pembina Utama (IV/e)	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
		STEERY MARLEINE RANTUNG, S.H., M.H.	Pembina Utama (IV/e)	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado
		AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.	Pembina Utama (IV/e)	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar
		Dr. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H., M.H.	Pembina Utama (IV/e)	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	Pengadilan Tinggi Pontianak
		ADHAR, S.H., M.H.	Pembina Utama (IV/e)	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
		MAKMUR, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
		TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
		H. WINARNO, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau
		Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H., M.Hum.	Pembina Utama Madya (IV/e)	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	Ketua Pengadilan Sidoarjo
		IBNU RUSYDI, S.H.	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim Yustisial Pengadilan Tinggi Makassar	Ketua Pengadilan Negeri Makassar
		JABAL NUR AS, S.Sos., M.H.	Pembina Tingkat I (IV/b)	Panitera Pengadilan Tinggi Makassar	Hakim Tingkat Pertama
		SUGENG, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar	Panitera Pengadilan Tinggi Manado
					Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Makassar

	HASMA H, S.E., S.H.		Pembina (IV/a)	Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Makassar	Panitera Pengadilan Negeri Palopo
	MUSLIMIN, S.H., M.H.		Penata Tingkat I (III/d)	Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Makassar	Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
	ANWAR, S.Pd., S.H.		Penata Tingkat I (III/d)	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar	Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
	ANDI MAKHMUR, S.H.		Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar	Panitera Pengadilan Negeri Makale
	RODDING, S.H.		Penata Tingkat I (III/d)	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar	Panitera Pengadilan Negeri Sinjai
	RAJAMUDDIN, S.H.		Penata (III/c)	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
	HAPIPAH MASNAENI, S.E.		Penata Muda Tingkat I (III/b)	Operator - Penata Layanan Operasional PT Makassar	Operator - Penata Layanan Operasional PN Maros
	NURFAIDAH BANGSAWAN, S.E.		Penata Tingkat I (III/d)	Operator - Penata Layanan Operasional PT Makassar	Operator - Penata Layanan Operasional PTUN Makassar
	REZKY AMALIAH, S.H		Penata Muda (III/a)	Klerik - Analis Perkara Peradilan PT Makassar	Pengelola Penanganan Perkara PN Jakarta Timur
2	DR. I Wayan Gede Rumea, S.H., M.H		Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua PN Makassar	Wakil Ketua PN Jakarta Utara
	Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.		Pembina Utama Madya, IV/d	Wakil Ketua PN Makassar	Ketua PN Banyuwangi
	Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum		Pembina Utama Muda, IV/c	Hakim Tingkat Pertama PN Makassar	Hakim Tingkat Pertama PN Jakarta Timur
	Agus Aryanto, S.H		Pembina Utama Muda, IV/c	Hakim Tingkat Pertama PN Makassar	Hakim Tingkat Pertama PT Palembang
	Jimmy Ray le, S.H		Pembina Tk. I, IV/b	Hakim Tingkat Pertama PN Makassar	Ketua PN Penajam
	Haklainul Dunggio, S.H., M.H.		Pembina Tk. I, IV/b	Hakim Tingkat Pertama PN Makassar	Ketua PN Sanggau
	Bintang AL, S.H., M.H		Pembina Utama Muda, IV/c	Hakim Tingkat Pertama PN Makassar	Hakim Tingkat Pertama PN Jakarta Pusat
	Zulkarnaen, S.H		Pembina Tk. I, IV/b	Hakim Tingkat Pertama PN Makassar	Hakim Tingkat Pertama PN Cibinong
	Asri Rahim, S.Kom		-	Hakim Ad Hoc PHI PN Makassar	Hakim Ad Hoc PHI PN Mamuju
	Sapta Putra, S.H		Pembina, IV/a	Panitera PN Makassar	Panitera PN Jember

		Musdalifah Muslimin, S.H.,M.H		Pembina, IV/a	Panitera Muda Pidana PN Makassar	Panitera Muda Pidana PN Sungguminasa
		Nuriya Awad, S.H		Penata Tk.I, III/d	Panitera Muda Hukum PN Makassar	Panitera Muda Perdata PN Makassar
		Narendra Asmoro, S.H		Penata, III/c	Panitera Pengganti PN Makassar	Panitera Muda Hukum PN Sorong
3	PN SUNGGUMINASA	Dyan Martha Budhinugraeny, SH., MH.		Pembina Utama Muda, IV/c	Wakil Ketua PN Sungguminasa	Ketua PN Temanggung
		Andi Marliyanti, SH., MH.		Pembina ? IV/a	Panitera Muda Pidana PN Sungguminasa	Panitera Pengganti PT. Makassar
		Afandi, SH.		Penata Tk. I / III/d	Panitera Muda Hukum	Panitera Muda Hukum PN Maros
		Nodivel Steven Kwaitota, SH.		Penata Muda / III/a	Klerak-Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim)	Analisis Perkara Peradilan PTTUN Makassar
		Muikha Tombi, SH.		Penata Muda / III/a	Klerak-Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim)	Analisis Perkara Peradilan PN Tahuna
		Nur Rusdy Kaldun Kadir, SH.		Penata Muda / III/a	Klerak-Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim)	Analisis Perkara Peradilan PA Semarang
		Akbar Dwi Nugrah Fakhsirie, SH.		Penata Muda / III/a	Klerak-Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim)	Analisis Perkara Peradilan PA Sendawar
		Musakkir, SH.		Penata Muda / III/a	Klerak-Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim)	Analisis Perkara Peradilan PN Sidrap
		Fenita Dhea Ningrumsari, SH.		Penata Muda / III/a	Klerak-Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim)	Analisis Perkara Peradilan PA Tual
		Rudolf Richo Okta FauzanSusanto, SH.		Penata Muda / III/a	Klerak-Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim)	Analisis Perkara Peradilan PA Takalar
		Nefriansa Parapean, SH.		Penata Muda / III/a	Klerak-Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim)	Analisis Perkara Peradilan PN Kotamobagu
		Sri Dewi Sandra, SH.		Penata Muda / III/a	Klerak-Analis Perkara Peradilan	CPNS
		Rofifa Salsabhila M. Andi Lolo, SH.		Penata Muda / III/a	Klerak-Analis Perkara Peradilan	CPNS
		Dwi Astika Nurhidayat, SH.		Penata Muda / III/a	Klerak-Analis Perkara Peradilan	CPNS
4	PN WATAMPONE	Wahida Achmad, S.H		Penata Tingkat I, III/d	Panmud Pidana PN Watampone	
		Adri Inggil Makrifah, S.H.		Penata Muda, III/a	Klerak-Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) PN Watampone	Panmud Perdata PN Sengkang
		Andi Hardianti Sakti, S.H.		Penata Muda, III/a	Klerak-Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) PN Watampone	Klerak-Analisis Perkara Peradilan PN Dataran Hunipopu
		Arif Rachman Nur, S.H.		Penata Muda, III/a	Klerak-Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) PN Watampone	Klerak-Analisis Perkara Peradilan PN Sinjai

		Baginda LM Sibuea, S.H.	Penata Muda, III/a	Klerak-Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) PN Watampone	Klerak-Analis Perkara Peradilan PA Pangkajene
		Daniel Naibaho, S.H.	Penata Muda, III/a	Klerak-Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) PN Watampone	Klerak-Analis Perkara Peradilan PN Pangkajene
		Tri Haryono Patria Mangambe, S.H.	Penata Muda, III/a	Klerak-Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) PN Watampone	Klerak-Analis Perkara Peradilan PN Sinjai
		Yuni Yarni, S.H	Penata Muda, III/a	Klerak-Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) PN Watampone	Klerak-Analis Perkara Peradilan PN Pangkajene
		I Wayan Sukradana, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua Pengadilan Negeri Watampone	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi
		Indra Heriyanto, S.H.	Penata Tingkat I, III/d	Panmud Hukum PN Watampone	Panmud Perdana PN Masamba
		Abdul Kadir, S.H., M.H.	Pembina , IV/a	Panitera Pengadilan Negeri Watampone	Panitera PN Kendal
5	PN MAROS	Jumadi Apri Ahmad, SH., MH.	Pembina Tk. I, IV/b	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros	Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
		Kamil, SE.	Penata Tk. I / III/d	Sekretaris Pengadilan Negeri Maros	Sekretaris Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
		Muhammad Tasnim, SH.	Penata/ III/c	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Maros	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
		Sandi, SH., MH.	Penata/ III/c	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Maros	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar
		A Baso Habibbi, S.E., S.H	Penata Tk. I, III/d	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros	Jurusita Pengadilan Negeri Makassar
		Sumardi M. SH.	Penata / III/c	Jurusita Pengadilan Negeri Maros	Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk
		Ardiansyah, S.H	Penata Muda, III/a	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros	Jurusita Pengadilan Negeri Makassar
6	PN SENGKANG	1. ENDAH SRI ANDRIYATI, S.H., M.H.	Pembina Tk.I (IV/b)	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang	Ketua PN Jeneponto
		2. MARHANI M., S.H., M.H.	Pembina , IV/a	Panitera Pengadilan Negeri Sengkang	Panitera PN Bantaeng
		3. LEMAN, S.E.,M.M.	Penata Tingkat I, III/d	Sekretaris Pengadilan Negeri Sengkang	Sekretaris PN Malli
		4. MUHAMMAD RIZKY SUBARDY, S.H., M.H.	Penata Muda Tk.I (III/b)	Hakim Pengadilan Negeri Sengkang	Hakim PN Payakumbuh
		5. ARMANSYAH, S.H.	Penata (III/c)	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sengkang	Panitera Pengganti PN Watampone

	6. HARTATI, S.H.	Penata (III/c)	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang	Juru Sita Pengganti PN Maros
	7. ANDI MIHRUM ANDI MIRI, S.H., M.H.	Penata Muda Tk.I (III/b)	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang	APP PN Maros
7	PN BULUKUMBA 1. Alfredo Paradeiso, SH 2. Syamsul Bahri, SH 3. Harmawati, SH 4. Nurhikmah, SH 5. Muwafiqah	1. Penata Muda Tk. I (III/b) 2. Penata Tk.I (III/d) 3. Penata Muda (III/b) 4. Penata Tk.I (III/d) 5. Penata (III/c)	1. Hakim 2. Panitera Pengganti 3. Panitera Pengganti 4. Panitera Muda Hukum 5. Kasubag Kepegawaian & Ortala	1. Hakim 2. Panitera Pengganti 3. Panitera Pengganti 4. Panitera Pidana 5. Kasubag Kepegawaian & Ortala
8	PN PANGKAJENE A. Rico H Sitanggang, SH., <u>M.Kn</u> Mohammad fauzi Salam, SH., MH A. Wiwik Pratiwi, SH.,MH Muhammad Ridwan, SH Sangkala, SH Herlina Rahman, SH	Pembina Tk.I (IV/b) Pembina (IV/a) Penata (III/c) Penata Tk.I (III/d) Penata Tk.I (III/d) Penata TK.I (III/d)	KPN Pangkajene WKPN Pangkajene Panmud Hukum PN Pangkajene Panmud Pidana PN Pangkajene PP PN Pangkajene PP PN Pangkajene	WKPN Pangkajene Hakim PN Kolaka PP PN Maros PP PN Sungguminasa PP PN Maros Staf Kepaniteraan Perdana (Kasir) PN Pare-Pare
	Faikatul Khikma S, SH	Penata Muda (III/a)	CPNS PN Pangkajene	Klerak - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pangkajene
9	PN BARRU 1. ILHAM NAKIB, S.E., Ak., C.A. 2. MINARTI, S.H., M.H. 3. KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H., M.H. 4. HESTY AYUNINGTYAS, S.H. 1. ANDI MUSYAFIR, S.H 2. DEWI SATRIANI YUSUF, S.H 3. SURAHMI NIHAYA,S.H.,M.H 4. MUHAMMAD RIDWAN, SP., M.Si 5. ROMI HARDHIKA, S.H., M.H. 6. RUTH MARINA DAMAYANTI SIREGAR, S.H., M.H.	Penta Tk.I (III/d) Penata (III/c) Pembina (IV/a) Penata Muda Tk.I (III/b) Pembina /IV/a Penata Muda Tk.I (III/b) Penata (III/c) Penata Tk.I/III/d Penata Tk.I/III/d pembina, IV/b	Sekretaris Panitera Muda Hukum Wakil Ketua Hakim KPN Parepare Panmud Hukum Panmud Perdana Penata Layanan Operasional Penata Layanan Operasional Wakil Ketua	Sekretaris PN Jenepono Panitera Pengganti PN Pare-pare Hakim PN. Ternate Hakim PN.Manna KPN Masamba PP PN Sidenrenag Rappang PP PN Barru Pemkot Parepare Pemkot Parepare Hakim PN Cibirong
11	PN SIDENRENG RAPPANG 1. fitriah ADE MAYA, SH	Pembina IV/b	Wakil Ketua	Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

	2. ERWIN SISWANTO, SH	Penata III/c	Kasub Bag Kepegawaian dan Ortala	Sekretaris Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
	3. Haryoseno Jati Nugroho, SH	Penata Muda Tk. I III/b	Hakim PN. Polewali	Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
	4. Yasir Adi Pratam, SH	Penata Muda Tk. I III/b	Hakim PN. Selayar	Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
	5. Mardianto, SH	Penata III/c	Panitera Pengganti PN. Belopa	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
12	PN PINRANG	1. Penata Muda Tk. I/III/b 2. Penata/III/c 3. Penata Muda /III/a 4. Pembina Tk. I /IV/b 5. Penata Tk. I/III/d 6. Penata Tk. I/III/d	HAKIM PN ENDE JS PENGGANTI PN.PARE-PARE JURUSITA PN. SUNGGUMINASA	HAKIM PN. PINRANG PANITERA PENGGANTI PN. PINRANG PANITERA PENGGANTI PN. PINRANG
			HAKIM PN BOGOR Kls 1A	PANITERA PENGGANTI PN. PINRANG
			PANMUD PN.POLEWALI	WAKIL KETUA PN. PINRANG
			PANITERA PN. MASAMBA	PANMUD PN. PINRANG
13	PN TAKALAR	1. Pembina (IV/a) 2. Penata Muda Tingkat I (III/b) 3. Penata Tingkat I (III/d) 4. Penata Muda (III/a)	1. Ketua Pengadilan Negeri Takalar 2. Hakim Pengadilan Negeri Takalar 3. Panitera Pengadilan Negeri Takalar 4. Analisis Perkara	1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barro 2. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto 3. Panitera Pengadilan Negeri Melonguane 4. CPNS
			WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SINJAI	KETUA PENGADILAN NEGERI JENEPONTO
14	PN JENEPONTO	Pembina Tk. I /IV/b Pembina /IV/a Penata III/d	HAKIM PENGADILAN NEGERI MAROS KASUBAG ORTALA PN BANTAENG	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI JENEPONTO SEKRETARIS PN JENEPONTO
			Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng	Panitera Pengadilan Negeri Selayar
15	PN BANTAENG	1. Penata Tk. I (III/d) 2. Pembina / IV/a	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng	Hakim Pengadilan Negeri Tondano
			KETUA PENGADILAN NEGERI SINJAI	WAKIL PENGADILAN NEGERI AMURANG
16	PN SINJAI	Pembina, IV/a		

		2. SUCI ASTRI PRAMAWATI, SH. M.Hum		pembina, IV/b	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SINJAI	HAKIM PN SUKOHARJO
		3. WAHIDA ACHMAD, SH.		Penata Tk. I/III/d	PANITERA PENGADILAN NEGERI SINJAI	PANMUD PIDANA PN WATANPONE
		4. MARLINA, S. Kep. Ns		Penata /III/c	PENATA LAYANAN OPERASIONAL PN SINJAI	UPTD RSUD SINJAI
17	PN WATANSOPPENG	1. ANDI DAMAR WIJAKSONO, S.H		Penata Muda Tk. I (III/b)	PENATA LAYANAN OPERASIONAL PN WATANSOPPENG	PENATA LAYANAN OPERASIONAL PN AMBON
		2. VINCENTIUS SATRIO RAJA, S.H		Penata Muda (III/a)	Klerak-Analis Perkara Peradilan	CPNS
		3. MELINDA SETIAWATI, S.H		Penata Muda (III/a)	PANITERA PENGGANTI PN WATANSOPPENG	Klerak-Analis Perkara Peradilan PN Masamba
18	PN SELAYAR	HARWANSAH, S.H., M.H.		Pembina/IV/a	KETUA PN SELAYAR	WAKIL KETUA PN BELOPA
		MUH. ALAUDDIN, S.H		Penata TK. I/III/d	PANITERA PN SELAYAR	PANITERA MUDA PIDANA PN BELOPA
19	PN MALILI	TOMBI, S.H.		Penata (III/c)	Panitera Pengadilan Negeri Malili	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Palopo
		AL MUNIR IDRIS, S.H.		Penata Tk. I (III/d)	Operator - Penata Layanan Operasional Pengadilan Negeri Malili	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur
		ARSIL SAAT, S.H., S.E.		Penata Tk. I (III/d)	Operator - Penata Layanan Operasional Pengadilan Negeri Malili	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo
		IIN SUNARNI, S.Sos.		Penata (III/c)	Operator - Penata Layanan Operasional Pengadilan Negeri Malili	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Utara
		IRMAH, S.H.		Penata Muda Tk. I (III/b)	Operator - Penata Layanan Operasional Pengadilan Negeri Malili	Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara
		FAHMI RIZAL FAUZI, S.H.		Penata Muda (III/a)	Klerak - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Malili	CPNS
20	PN MASAMBA	YANTO ARIYANTO, S.H., M.H.		PEMBINA (IV/a)	KETUA PENGADILAN NEGERI MASAMBA	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG
		YULIANA AMPULEMBANG, S.H.		PENATA TK. I (III/d)	PANITERA PN MASAMBA	PANITERA MUDA HUKUM PN. PALOPO

21	PN ENREKANG	1. FAUSIAH, S.H., M.H. 2. NURFATIMAH, S.H. 3. MELIANA BANNIE LAYUK, S.H.	1. PEMBINA (IV/a) 2. PENATA MUDA TK. I (III/b) 3. PENATA (III/c)	1. KETUA 2. PANITERA PENGGANTI 3. KASUBBAG PTIP	1. WAKIL KETUA PN PARE PARE 2. ANALIS PERKARA PERADILAN PN SENGKANG 3. BENDAHARA PN MAKALE
22	PN BELOPA	1. SULAEMAN, S.H.	1. PENATA TK. I (III/d)	1. PANITERA	1. PANMUD. PIDANA PN. WATAMPONE
		2. IRWAN, S.H., M.H.	2. PENATA TK. I (III/d)	2. PANITERA MUDA PIDANA	2. PANITERA PENGGANTI PN. NABIRE
		3. SYAYYED ASFAR ZAINAL, S.H.	3. PENATA (III/c)	3. OPERATOR PELAYANAN OPERASIONAL	3. PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
		4. SYARIEF, S.E.	4. PENATA (III/c)	4. KASUBAG KEUANGAN DISPORA LUWU	4. PEMDA LUWU
23	PN PALOPO	1. AMIR MAHMUD, SH.	1. PENATA TK. I (III/d)	1. PANITERA	1. PANITERA PN. PINRANG
		2. MUH. ALAUDDIN, S.H.	2. PENATA TK. 1 (II. d)	2. PANITERA MUDA PIDANA	2. PANITERA MUDA PERDATA PN BELOPA
		3. A.MUH.IRHAM IDRIS, S.H.	3. PENATA (III/c)	3. PANITERA PENGGANTI	3. JURUSITA PENGGANTI PN.MAKASSAR
		4. SELMIATI LAME PAINTU, S.H.M.H.	4. PENATA TK. 1 (III.d)	4. PANITERA MUDA HUKUM	4. PANITERA MUDA
		5. I KOMANG DEDIEK PRAYOGA, S.H., M.Hum.	5. PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	5. KETUA	5. WAKIL KETUA PN MAKALE
		6. AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H.M.H.	6. PEMBINA TK.I (IV/c)	6. WAKIL KETUA	6. KETUA PN PUTUSSIBAU
		7. HELKA RERUNG, S.H.M.H.	7. PENATA TK.1 (III. d)	7. HAKIM	7. HAKIM PN MAKALE
24	PN MAKALE	1. MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H.	1. PEMBINA TK. I (IV/B)	1. KETUA PN MAKALE	1. WAKIL KETUA PN PALOPO
		2. FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H.	2. PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)	2. WAKIL KETUA PN MAKALE	2. HAKIM PN MAKASSAR
		3. DANIEL NATANIEL MORIOLKOSSU, S.H., M.H.	3. PEMBINA (IV/A)	3. PANITERA PN MAKALE	3. PANMUD PIDANA PT AMBON
		4. MUHAMMAD LARRY IZMI, S.H., M.H.	4. PENATA MUDA TK. I (III/B)	4. HAKIM PN MAKALE	4. HAKIM PN BENGKAYANG
		5. HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN, S.H., M.H.	5. PENATA MUDA TK. I (III/B)	5. HAKIM PN MAKALE	5. HAKIM PN PASIR PANGARAIAN
		6. YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.	6. PENATA MUDA TK. I (III/B)	6. HAKIM PN MAKALE	6. HAKIM PN PINRANG
		7. MAKMUR, S.H., M.H.	7. PEMBINA (IV/A)	7. PANITERA MUDA HUKUM PN MAKALE	7. PANITERA PENGGANTI PN SUNGUMINASA

	8. PERIDA, S.Kep.N.S.	8. PENATA TK. I (III/D)	8. OPERATOR PENATA LAYANAN OPERASIONAL PN MAKALE	8. PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA PEMKAB TANA TORAJA
	9. ESCHER KALAPADANG, S.T., M.T.	9. PENATA TK. I (III/D)	9. OPERATOR PENATA LAYANAN OPERASIONAL PN MAKALE	9. KLEREK PENGELOLA PENGADAAN PN MASAMIBA
	10. AJI SETYO, S.H.	10. PENATA MUDA (III/A)	10. CPNS KLEREK ANALIS PERKARA PERADILAN PN MAKALE	-
	11. FAIZAH WAHYUNI, S.H.	11. PENATA MUDA (III/A)	11. CPNS KLEREK ANALIS PERKARA PERADILAN PN MAKALE	-
	12. RAJADI MARANNU, S.H.	12. PENATA MUDA (III/A)	12. CPNS KLEREK ANALIS PERKARA PERADILAN PN MAKALE	-

B. PROMOSI

Promosi Jabatan

Yang dimaksud Promosi Jabatan adalah Mutasi dengan kenaikan jabatan, baik dari luar Sulawesi Selatan maupun ke luar Sulawesi Selatan atau dari dan ke Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan sendiri.

Tabel III.5. Promosi Jabatan Tahun 2024

NO	SATUAN KERJA	NAMA	PANGKAT	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA
1	PT MAKASSAR	ANDHIKA ZATWIKA, SH	Penata Muda (III/a)	Pranata Keuangan APBN Mahir Pengadilan Tinggi Makassar	Bendahara Penerimaan PT Makassar
		ANDI MARLIYANTI, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sungguminasa	Panitera Pengganti PT Makassar
2	PN MAKASSAR	Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim Tinggi PT Makassar	Ketua PN Makassar
		Hendri Tobing, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua PN Jakarta Pusat	Ketua PN Makassar
		Abd. Gani, S.H	Penata Tk. I, III/d	Panitera Pengganti PT Sulbar	Panitera Pengganti PN Makassar

	Burhanuddin, S.H., M.H.	Pembina, IV/a	Panitera Pengganti PT Sulbar	Panitera Pengganti PN Makassar
	Sugeng, S.H., M.H	Pembina, IV/a	Panitera Muda Tipikor PT Makassar	Panitera Muda Pidana PN Makassar
	Hikmawati, S.H	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PN Makassar	Jurusita Pengganti PN Makassar
	Andi Muhammad Khairil Manyampakki, S.M.	Penata Muda Tk. I, III/b	Jurusita PN Makassar	Jurusita Pengganti PN Makassar
	A Baso Habibi, S.E., S.H	Penata Tk. I, III/d	Panitera Pengganti PN Maros	Jurusita PN Makassar
	Ardiansyah, S.H	Penata Muda, III/a	Panitera Pengganti PN Maros	Jurusita PN Makassar
	Burhanuddin, S.H., M.H.	Pembina, IV/a	Panitera Pengganti PT Sulbar	Panitera Pengganti PN Makassar
3	Makmur, SH., MH.	Pembina	Panitera MUDA Pidana	Panitera Pengganti
	Nuriya Awad, SH.	Penata Tk. I, III/d	Panitera Muda Hukum PN Makassar	Panitera Muda Perdata PN Sungguminasa
	Musdalifah, SH., MH.	Pembina / IV/a	Panitera Muda Pidana PN Makassar	Panitera Muda Pidana PN Sungguminasa
	Muhammad Ridwan, SH.	Penata Tk. I, III/d	Panitera Muda Pidana PN Pangkep	Panitera Pengganti
	Muhammad Rezki Ramadhan	Pengatur Tingkat I / II/d	Jurusita Pengganti	Klerik-Pengadministrasi Perkantoran
	Wahyu Mulyadi A. Md.	Penata Muda / III/a	Panitera Pengganti PN Pinrang	Jurusita PN Sungguminasa
4	Umar	Penata Muda Tk. I, III/b	Jurusita PN Watampone	Jurusita Pengganti PN Watampone
	Wahida Achmad, S.H.	Penata Tingkat I, III/d	Panitera PN Sinjai	Panmud Pidana PN Watampone
	H. Sulaiman, S.H	Penata Tingkat I, III/d	Panitera PN Belopa	Panmud Pidana PN Watampone
	Vanny Febrianti, A.Md.	Pengatur, II/c	Pengelola Data dan Informasi Badilum MA	Pengelola BMN PN Watampone
	Mario Sodikim, S.H.	Penata Muda/ III/a	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim PN Watampone	Analisis Perkara Peradilan PN Watampone
	Ersdi Nofembrita, S.H.	Penata Muda/ III/a	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim PN Watampone	analisis Perkara Peradilan PN Watampone
	Armansyah, S.H., M.H.	Penata Tingkat I, III/d	Panmud Hukum PN Sengkang	Panitera Pengganti PN Watampone
	Safri, S.H., M.H.	Pembina Utama Muda, IV/c	Ketua Pengadil Negeri Kendari	Ketua Pengadil Negeri Watampone

	Jumadil, S.H., M.H.	Penata Tingkat I, III/d	Panmud Pidana PN Watampone	Panmud Hukum PN Watampone
5	PN MAROS			
	Harly Yunus, S.H.	Pembina Tingkat I, IV/b	Panitera PT Sulawesi Barat	Panitera PN Watampone
	Firdaus Zainal, SH., MH.	Pembina / IV/a	Wakil Ketua PN Jeneponto Kelas II	Hakim PN Maros Kelas IB
	Abdul Hakim, SH., MH.	Penata Tk. I, III/d	Hakim PN Palu Kelas IA	Hakim PN Maros Kelas IB
	Sulasmy Tri Juniarty, SH.	Pembina / IV/a	Hakim PN Kendari Kelas IA	Hakim PN Maros Kelas IB
	Afandi, SH.	Penata Tk. I / III/d	Panitera Muda Hukum PN Sungguminasa Kelas IA	Panitera Muda Perdata PN Maros Kelas IB
	Hernawati, SH.	Penata Tk. I / III/d	Panitera Pengganti PN Palu Kelas IA	Panitera Pengganti PN Maros Kelas IB
6				
	A. Wiwik Pratiwi, SH.	Penata / III/c	Panitera Muda PN Pangkajene	Panitera Pengganti PN Maros kelas IB
	Sangkala, SH.	Penata / III/c	Panitera Pengganti PN Pangkajene	Jurusita PN Maros Kelas IB
	Hartati, SH.	Penata Muda Tk. I / III/b	Panitera Pengganti PN Sengkang	Jurusita Pengganti PN Maros Kelas IB
	Intanghidayanti Saleh, ST.	Penata / III/c	Klerik-Penelaah Teknis Kebijakan PA Jakarta Pusat	Klerik-Penelaah Teknis Kebijakan PN Maros
	Hapipah Masnaeni, SE.	Penata Muda Tk. I / III/b	Operator-Penata Layanan Operasional PT Makassar	Operator-Penata Layanan Operasional PN Maros
	Andi Mhrum Andi Miri, SH., MH.	Penata Muda Tk. I / III/b	Panitera Pengganti PN Sengkang	Analisis Perkara Peradilan PN Maros
	1. MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H.	PEMBINA TK. I (IV/B)	KETUA PN MAKALE KELAS IB	WAKIL KETUA PN PALOPO KELAS IB
	2. FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H.	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)	WAKIL KETUA PN MAKALE KELAS IB	HAKIM PN MAKASSAR KELAS IA
	3. RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.	PEMBINA TK. I (IV/B)	HAKIM PN JAKARTA SELATAN KELAS IA	KETUA PN MAKALE KELAS IB
	4. I KOMANG DEDIEK P., S.H., M.H.	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)	KETUA PN PALOPO KELAS IB	WAKIL KETUA PN MAKALE KELAS IB
	5. DANIEL NATANIEL MORIOLKOSSU, S.H., M.H.	PEMBINA (IV/A)	PANITERA PN MAKALE	PANITERA MUDA PIDANA PT AMBON
	6. MUHAMMAD LARRY IZMI, S.H., M.H.	PENATA MUDA (III/B)	HAKIM PN MAKALE KELAS IB	HAKIM PN BENGKAYANG KELAS II
	7. HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN, S.H., M.H.	PENATA MUDA (III/B)	HAKIM PN MAKALE KELAS IB	HAKIM PN PASIR PANGARAIAN KELAS II

		8. YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.	PENATA MUDA (III/B)	HAKIM PN MAKALE KELAS IB	HAKIM PN PINRANG KELAS II
		9. MELIANA BANNE LAYUK, S.H.	PENATA MUDA (III/B)	KASUBBAG PTIP PN ENREKANG KELAS II	OPERATOR PENATA LAYANAN OPERASIONAL PN MAKALE KELAS IB
		10. ANDI MAKMUJUR, S.H.	PEMBINA (IV/A)	PANITERA PENGGANTI PT MAKASSAR	PANITERA PN MAKALE
		11. KATRINA SURA SARANGA, S.H.	PANATA TK. I (III/D)	PANITERA PENGGANTI PT KENDARI	PANITERA MUDA HUKUM PN MAKALE KELAS IB
7	PN PALOPO	1. HASMA, H., S.E., S.H.	1. PEMBINA (IV/a)	1. PANITERA MUDA HUKUM PT. MAKASSAR	1. PANITERA PN PALOPO
		2. YULIANA AMPULEMBANG, S.H.	2. PENATA TK I (III/d)	2. PANITERA PN MASAMBA	2. PANITERA MUDA HUKUM PN PALOPO
		3. TOMBI, S.H.	3. PENATA TK I (III/d)	3. PANITERA PN MALILI	3. PANITERA MUDA PIDANA PN PALOPO
		4. AMIR MAHMUD, S.H.	4. PENATA TK I (III/d)	4. PANITERA PN PALOPO	4. PANITERA PN PINRANG
		5. MUH. ALAUDDIN, S.H.	5. PENATA TK I (III/d)	5. PANITERA MUDA PERDATA PN BELOPA	5. PANITERA MUDA PIDANA PN PALOPO
		6. A. MUH. IRHAM IDRIS, S.H.	6. PENATA (III/c)	6. PANITERA PENGGANTI PN PALOPO	6. JURUSITA PENGGANTI PN MAKASSAR
		7. MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H.	7. PEMBINA TK I (IV/b)	7. KETUA PN MAKALE	7. WAKIL KETUA PN PALOPO
		8. ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, S.H., M.H.	8. PEMBINA (IV/a)	8. HAKIM PN BLITAR	9. HAKIM PN PALOPO
		9. I KOMANG DEDIEK PRAYOGA, S.H., M.H.	9. PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	9. KETUA PN PALOPO	9. WAKIL KETUA PN MAKALE
		10. AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H., M.H.	10. PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	10. WAKIL KETUA PN PALOPO	10. KETUA PN PUTUSSIBAU
		11. MUH. ALAUDDIN, S.H.	11. PEMBINA TK I (IV/b)	11. PANITERA PN SELAYAR	11. PANITERA MUDA PN PALOPO
		12. MIRAYATI BOTTO, S.Kom., S.H., M.H.	12. PENATA TK I (III/d)	12. PANITERA PENGGANTI PN KEDIRI	12. APP PN PALOPO
		13. MUHAMMAD ARMIYANTO KARIM, S.E.	13. PENATA (III/c)	13. KASUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN PN PALOPO	13. PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN PN PALOPO
8	PN SENGKANG	1. WAHIDA ACHMAD, S.H.	- PENATA TINGKAT I (III/d)	- PANITERA MUDA PERDATA PN SENGKANG KELAS 1B	- PANITERA MUDA PIDANA PN WATAMPONE KELAS 1A

	2. NURFATIMAH, S.H.	- PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	- ANALIS PERKARA PERADILAN PN SENGKANG	- PANITERA PENGGANTI PN ENREKANG
9	PN BULUKUMBA 1. Alfredo Paradeiso, SH 2. Syamsul Bahri, SH 3. Harmawati, SH 4. Nurhikmah, SH 5. Muwafiqah, SH	1. Penata Muda Tk. I (III/b) 2. Penata Tk.I (III/d) 3. Penata Muda (III/b) 4. Penata Tk.I (III/d) 5. Penata (III/c)	1. Hakim PN Bengkayang Kelas II 2. Panitera Pengganti PN Sinjai Kelas II 3. Panitera Pengganti PN Bantaeng Kelas II 4. Panitera Muda Hukum PN Bantaeng Kelas II 5. Kasubag Kepegawaian & Ortala PN Pinrang Kelas II	1. Hakim PN Bulukumba Kelas I B 2. Panitera Pengganti PN Bulukumba Kelas II 3. Panitera Pengganti PN Bulukumba Kelas I B 4. Panitera Muda Hukum PN Bulukumba Kelas I B 5. Kasubag Kepegawaian & Ortala PN Bulukumba Kelas I B
10	PN PANGKAJENE -	-	-	-
11	PN BARRU 1. SURAHMI NIHAYA, S.H.,M.H. 2. MIINARTI, S.H.,M.H. 3. Hj. NUR AFIAH, S.H.,M.H.	Penata (III/c) Penata (III/c) Pembina (IV/a)	Panitera Muda Perdata PN.Pare-pare Penitera Muda Hukum Pn.Barru Ketua PN Takalar	Panitera Pengganti PN.Barru Panitera Pengganti PN. Pare-pare Wakil Ketua PN. Barru
12	PN PAREPARE 1. KHUSNUL KHATIMAH, S.H.MM.H 2. MINARTI, S.H.,M.H 3. HERLINA RAHMAN,S.H 4. ANDI FIRMAN QHADAFI, S.H 5. FAUSIAH, S.H.,M.H	Pembina (IV/b) Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c) Pembina (IV/a)	WKPN Wates Panmud Hukum PN Barru PP PN Pangkajene PP PN Pinrang KPN Enrekang	KPN Parepare PP PN Parepare Staf Kepaniteraan Perdata (Kasir) PN Pare-Pare JS PENGGANTI PN.PARE-PARE WKPN Parepare
13	PN SIDENRENG RAPPANG 1. Fitriah Ade Maya, SH 2. Erwin Siswanto, SH	Pembina Tk. I IV/b Penata (III/c)	Wakil Ketua PN. Enrekang Kasubag Kepegawaian, Ortala PN. Sinjai	Ketua PN. Sidrap Sekretaris PN. Sidrap
14	PN PINRANG 1. KHAIRUNNISA, SH 2. DANIEL MARIO HALASHON SIGALINGGING,SH.MH	Pembina (IV/a) PEMBINA TK I (IV/b)	Ketua PN.Pinrang Wakil ketua PN.Pinrang	Wakil ketua PN.Pinrang Hakim PN.Bogor

	3. MUWAFIQAH, SH	Penata (III/c)	Kasubag Kepegawaian, Ortala PN.Bulukumba	Kasubag Kepegawaian, Ortala PN.Pinrang
15	PN TAKALAR	1. Pembina Tk.II/IV/b	1. Wakil Ketua PN Bengkalis	1. Ketua Pengadilan Negeri Takalar
		2. Pembina (IV/a)	2. Ketua Pengadilan Negeri Takalar	2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barru
		2. Penata Tk.I/III/c	3. Hakim Pengadilan Negeri Takalar	3. Hakim Pengadilan Negeri Takalar
		4. Penata Tingkat I (III/d)	4. Sekretaris Pengadilan Negeri Takalar	4. kasubag Kepegawaian Pengadilan Negeri Takalar
16	PN JENEPONTO	Pembina Tk.I /IV/b	KETUA PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SENGKANG Kis 1B
		Pembina /IV/a	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK
		Penata III/d	SEKRETARIS PN JENEPONTO	KASUBAG ORTALA PN BANTAENG
17	PN BANTAENG	-	-	-
18	PN SINJAI	Pembina/IV/a	KETUA PENGADILAN NEGERI SINJAI	WAKIL KETUA PN AMURANG
		Pembina/IV/b	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SINJAI	HAKIM PN SUKOHARJO
		Pembina/IV/b	KETUA PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	WAKIL KETUA PN SINJAI
		Penata Tk.I/III/d	PANITERA PENGGANTI PT MAKASSAR	PANITERA PN SINJAI
		Penata Tk.I/III/d	PANITERA	PANMUD PIDANA PN WATANPONE
		Penata/III/c	SEKRETARIS PN SIDENRENG RAPPANG	KASUBAB KEPEGAWAIAN PN SINJAI

19	PN WATANSOPPENG	1. RISMAN ADI YUSUF	Pengatur Tk. I (II/d)	JURUSITA PN WATANSOPPENG	JURUSITA PENGGANTI PN WATANSOPPENG
		2. ANDI DAMAR WIJAKSONO, S.H	Penata Muda Tk. I (III/b)	KASUBBAG KEPEGAWAIAN ORTALA PN WATANSOPPENG	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL PN WATANSOPPENG
20	PN SELAYAR	1. HARWANSAH, S.H., M.H	Pembina/IV/a	KETUA PN SELAYAR	WAKIL KETUA PN BELOPA
		2. MUH. ALAUDDIN, S.H	Penata Tingkat I (III/d)	PANITERA PN SELAYAR	PANITERA MUDA PIDANA PN BELOPA
21	PN MALILI	LEMAN, S.E., M.M.	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB	Sekretaris Pengadilan Negeri Malili Kelas II
		DONNY BATOTANETE, S.T., M.M.	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris Pengadilan Negeri Malili	Pranata Komputer Ahli Muda Pengadilan Negeri Malili
22	PN MASAMBA	JUMRIATI, S.H.	PENATA MUDA Tk.I (III/b)	PANITERA MUDA HUKUM PN MASAMBA	PANITERA PENGGANTI PN MASAMBA
23	PN ENREKANG	SYAMSUL	PENGATUR (II/c)	JURUSITA PENGGANTI	PENGADMINISTRASI REGISTER PERKARA
24	PN BELOPA	HERU PARAL, S.H.	PENATA (III/c)	PANMUD HUKUM	PANITERA PENGGANTI PN. BELOPA

C. PENSIUN

Pemberhentian Dengan Hormat dengan Hak Pensiun

Tabel III.6. Pensiun Tahun 2024

NO	SATUAN KERJA	NAMA	PANGKAT	JABATAN	KET
1	PT MAKASSAR	ANDI FAJAR MENYINGSING, S.H.	Pembina TK. I (IV/b)	Panitera Pengganti PT Makassar	
		MUHAMMAD ANSAR PADU, SH, MH	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti PT Makassar	
		TASWIN, S.H., M.H.	Penata TK.I (III/d)	Panitera Pengganti PT Makassar	
		MUHAMMAD NATSIR SYAM, S.H.	Penata TK.I (III/d)	Panitera Pengganti PT Makassar	
		ANDI MUNARTY, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti PT Makassar	
		SULAIMAN, S.H.	Penata TK.I (III/d)	Panitera Pengganti PT Makassar	
		MATELDA MANDOA, S.H.	Penata TK.I (III/d)	Panitera Pengganti PT Makassar	
		SARAH MAKASAR, S.H.	Penata TK.I (III/d)	Panitera Pengganti PT Makassar	
2	PN MAKASSAR	Mustari Muis, S.H	Penata Tk. I, III/d	Jurusita Pengganti	
3	PN SUNGGUMINASA	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
4	PN WATAMPONE	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
5	PN MAROS	Bakhtiar, SH.	Penata TK.I (III/d)	Kepala Sub Bagian PTIP PN Maros	Meninggal Dunia
6	PN MAKALE	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
7	PN PALOPO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
8	PN SENGKANG	Burhanuddin, S.H.	Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris	
9	PN BULUKUMBA	1. Muhammad arifin	PENATA MUDA TK.I (III/b)	Jurusita	
		2. Junaedi, S.H.I	Penata TK.I (III/d)	Panitera Muda Pidana	

10	PN PANGKAJENE	Ramli, SH		Penata TK.I (III/d)	Panitera Pengganti	
11	PN BARRU	1. Mariam, S.E.,M.H.		Pembina (IV/a)	Sekretaris PN.Barru	Pensiun
12	PN PAREPARE	M. Bahnar Badawi, S.H., M.H.		Pembina (IV/a)	Sekretaris	
		Rusdi Ali, SH		PENATA TK I (III/d)	Panitera Pengganti	
14	PN SIDRAP	Nihil		Nihil	Nihil	
15	PN PINRANG	ABDUL LATIF, SH		PENATA TK I (III/d)	PELAKSANA PN.PINRANG	meninggal dunia
16	PN TAKALAR	Hj. SATRIA		Penata Tk.I/III/c	Panitera Pengganti	meninggal dunia
		Muhammad Tasmin		Penata TK.I (III/d)	Sekretaris	
17	PN JENEPONTO	NIHIL		NIHIL	NIHIL	
18	PN BANTAENG	NIHIL		NIHIL	NIHIL	
19	PN SINJAI	NIHIL		NIHIL	NIHIL	
20	PN WATANSOPPENG	NIHIL		NIHIL	NIHIL	
21	PN SELAYAR	Drs. ANDI BASO OPU, S.H		Pembina (IV/a)	PANITERA	
		SAID UMAR		Penata TK I (III/d)	PANITERA PENGGANTI	
22	PN MALILI	NIHIL		NIHIL	NIHIL	
23	PN MASAMBA	NIHIL		NIHIL	NIHIL	
24	PN BELOPA	NIHIL		NIHIL	NIHIL	

D. DIKLAT

Berikut ini data tenaga teknis yang pernah mengikuti Diklat sebagaimana dalam Tabel III.7 di bawah ini

Tabel III.7. Tenaga Tekhnis Yang Pernah Mengikuti Diklat

NO	SATUAN KERJA	HAKIM			KEPANITERAAN / PP			KEJURUSITAAN		
		JUMLAH	DIKLAT	DIKLAT	JUMLAH	DIKLAT	DIKLAT	JUMLAH	DIKLAT	DIKLAT
			PROF	FORMAL		PROF	FORMAL		PROF	FORMAL
1	PT MAKASSAR	13	3	10	0	0	0	0	0	0
2	PN MAKASSAR	48	26	0	27	27	0	2	2	0
3	PN SUNGGUMINASA	9	6	0	0	0	0	0	0	0
4	PN WATAMPONE	8	10	0	12	12	0	0	0	0
5	PN MAROS	4	1	3	1	0	1	0	0	0
6	PN MAKALE	4	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PN PALOPO	4	4	0	0	0	0	0	0	0
8	PN SENGKANG	4	2	0	0	0	0	0	0	0
9	PN BULUKUMBA	4	1	0	0	0	0	0	0	0
10	PN PANGKAJENE	2	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PN BARRU	3	0	1	0	0	0	0	0	0
12	PN PAREPARE	7	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PN SIDENRENG RAPPANG	8	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PN PINRANG	5	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PN TAKALAR	5	0	0	1	0	1	0	0	0
16	PN JENEPONTO	3	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PN BANTAENG	6	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PN SINJAI	7	3	0	1	0	1	0	0	0
19	PN WATANSOPPENG	4	1	0	0	0	0	0	0	0
20	PN SELAYAR	5	0	0	0	0	0	0	0	0
21	PN MALILI	3	2	0	1	1	0	0	0	0
22	PN MASAMBA	4	0	0	0	0	0	0	0	0
23	PN ENREKANG	5	0	0	0	0	0	0	0	0
24	PN BELOPA	3	0	0	0	0	0	0	0	0

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Tahun 2024 merupakan tahun kedelapan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Pasal 7 Permenkeu RI Nomor: 117/PMK.05/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga disebutkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Berbasis Akrual secara penuh mulai tahun 2015.

Akuntansi berbasis akrual ini tidak hanya dapat menghasilkan nilai beban yang telah dibayarkan oleh pemerintah, namun seluruh beban yang diperlukan sehingga biaya pelayanan publik dapat dihitung secara wajar. Dengan demikian pengelolaan uang negara dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan amanat UUD 1945.

Untuk Anggaran Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Makassar selaku Satuan Kerja mempunyai 2 (Dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi (01) Nomor: SP DIPA-005.01.2.099418/2024 tanggal 24 November 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 43,326,880,000,- (*Empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*). Sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 DIPA 01 telah melakukan sebanyak 8 (delapan) kali revisi dengan pagu terakhir sebesar Rp. 43,326,880,000,- (*Empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Peradilan Umum (03) Nomor: SP DIPA-005.03.2.099419/2024 tanggal 24 November 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 361.420.000,- (*Tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*). Sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 DIPA 03 telah melakukan sebanyak 4 (empat) kali revisi dengan pagu terakhir sebesar Rp. 411,420,000,- (*Empat ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*).

Adapun capaian pengelolaan anggaran Wilayah Pengadlan Tinggi Makassar pada Tahun 2024 untuk **DIPA 01** adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1. LRA DIPA 01 PT Makassar dan PN Se-Sulawesi Selatan Tahun 2024

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			PERSEN REALISASI
			B. PEGAWAI (Rp)	B. BARANG (Rp)	B. MODAL (Rp)	B. PEGAWAI (Rp)	B. BARANG (Rp)	B. MODAL (Rp)	
1	099418	PT MAKASSAR	36,101,991,000	5,875,145,000	1,349,744,000	35,930,605,811	5,871,258,269	1,349,479,000	99.59%
2	099422	PN MAKASSAR	27,229,008,000	4,385,570,000	30,000,000	27,054,484,775	4,205,667,164	28,800,000	98.88%
3	099439	PN SUNGGUMINASA	8,306,898,000	1,511,288,000	-	8,201,613,393	1,492,101,266	-	98.73%
4	099464	PN TAKALAR	3,483,915,000	1,498,020,000	-	3,388,329,213	1,437,571,301	-	96.87%
5	099485	PN JENEPONTO	3,237,131,000	1,626,205,000	-	3,201,064,719	1,618,679,078	-	99.10%
6	099560	PN BANTAENG	3,330,246,000	1,361,072,000	-	3,253,783,373	1,360,178,103	-	98.35%
7	099471	PN MAROS	5,063,061,000	1,839,233,000	574,000,000	4,719,390,967	1,820,084,018	573,743,200	95.14%
8	099443	PN PANGKAJENE	3,160,713,000	1,697,390,000	2,120,000,000	2,898,299,679	1,574,460,350	2,113,396,875	94.38%
9	099450	PN BARRU	3,000,445,000	1,330,738,000	-	2,931,339,844	1,321,784,128	-	98.20%
10	099492	PN PAREPARE	3,596,336,000	1,797,736,000	-	3,573,139,823	1,797,313,646	-	99.56%
11	099511	PN SIDRAP	3,655,461,000	1,435,459,000	-	3,644,163,874	1,431,303,447	-	99.70 %
12	099528	PN PINRANG	3,174,919,000	1,383,846,000	-	3,174,078,095	1,383,827,412	-	99.98%
13	099507	PN ENREKANG	2,964,415,000	1,554,531,000	-	2,807,032,030	1,542,175,388	-	96.24%
14	099549	PN WATANSOPPENG	2,865,476,000	1,729,836,000	-	2,806,950,967	1,707,739,460	-	98.25%
15	099581	PN BULUKUMBA	3,684,913,000	1,504,502,000	-	3,668,787,963	1,502,494,863	-	99.65 %
16	099595	PN SELAYAR	2,696,022,000	1,365,714,000	-	2,691,296,569	1,364,904,964	-	99.86%
17	099574	PN SINJAI	3,664,768,000	1,458,831,000	-	3,651,436,900	1,453,567,489	-	99.64%
18	099532	PN WATAMPONE	6,807,399,000	1,732,262,000	-	6,776,519,369	1,696,707,115	-	99.22%
19	099553	PN SENGKANG	3,901,450,000	1,612,798,000	-	3,887,421,902	1,604,286,791	-	99.59%
20	099600	PN PALOPO	4,023,869,000	1,531,312,000	-	3,757,570,799	1,525,839,971	-	95.11%
21	099617	PN MAKALE	3,898,212,000	1,435,951,000	-	3,879,618,739	1,432,054,558	-	99.58%
22	673013	PN MALILI	2,255,191,000	1,502,519,000	120,500,000	2,166,203,231	1,449,234,189	11,950,000	96.31%
23	672927	PN MASAMBA	2,392,602,000	1,280,220,000	490,000,000	2,375,141,895	1,267,922,703	488,900,000	99.26%
24	401928	PN BELOPA	2,375,605,000	1,182,691,000	51,000,000	2,369,788,622	1,166,791,893	51,000,000	99.40%

Adapun capaian pengelolaan anggaran Pengadilan Tinggi Makassar dan Peradilan Umum yang berada dibawahnya pada Tahun 2024 untuk **DIPA 03** adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2. LRA DIPA 03 PT Makassar dan PN Se-Sulawesi Selatan Tahun 2024

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSEN
			B. BARANG	B. BARANG	REALISASI
			(Rp)	(Rp)	
1	099418	PT MAKASSAR	411,420,000	408,221,492	99.22%
2	099422	PN MAKASSAR	595,631,000	536,560,958	90.08%
3	099439	PN SUNGGUMINASA	143,253,000	141,696,500	98.91%
4	099464	PN TAKALAR	113,185,000	99,427,675	87.85%
5	099485	PN JENEPONTO	95,170,000	94,377,500	99.17%
6	099560	PN BANTAENG	91,500,000	87,430,600	95.55%
7	099471	PN MAROS	118,646,000	114,118,750	96.18%
8	099443	PN PANGKAJENE	73,880,000	64,926,000	87.88%
9	099450	PN BARRU	60,370,000	57,124,280	94.62%
10	099492	PN PAREPARE	108,610,000	107,973,000	99.41%
11	099511	PN SIDRAP	104,770,000	103,783,640	99.06%
12	099529	PN PINRANG	143,770,000	143,659,285	99.92%
13	099507	PN ENREKANG	80,040,000	75,141,975	93.88%
14	099549	PN WATANSOPPENG	76,771,000	73,585,665	95.85%
15	099581	PN BULUKUMBA	112,220,000	111,957,300	99.77%
16	099595	PN SELAYAR	156,849,000	156,409,120	99.72%
17	099574	PN SINJAI	95,124,000	94,831,000	99.69%
18	099532	PN WATAMPONE	140,516,000	134,547,500	95.75%
19	099553	PN SENGGANG	155,966,000	149,730,172	96.00%
20	099600	PN PALOPO	113,840,000	111,628,500	98.06%
21	099617	PN MAKALE	105,750,000	104,842,965	99.14%
22	673013	PN MALILI	101,809,000	93,211,775	91.56%
23	672927	PN MASAMBA	87,900,000	86,105,500	97.96%
24	401928	PN BELOPA	79,670,000	74,944,410	94.07%

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Aset BMN pada Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se- Sulawesi Selatan merupakan Barang Milik Negara yang dipergunakan dalam rangka menunjang pelayanan kepada masyarakat. Wujud dari BMN tersebut diantaranya tanah dan bangunan gedung kantor, tanah dan bangunan rumah negara, kendaraan dinas, peralatan kantor dan inventarisasi lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang berada pada 24 Satker.

Pengelolaan sarana dan prasarana gedung dan sarana prasarana fasilitas gedung berupa barang milik negara yang ada pada Peradilan Umum di Sulawesi Selatan pada masing- masing Satker Pengadilan Negeri dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung R.I. dan ketentuan peraturan perundangan–undangan yang berlaku.

Pengelolaan dan pengadaan Barang Milik Negara di lingkungan peradilan umum se-Sulawesi Selatan wilayah Pengadilan Tinggi Makassar berupa sarana dan prasarana gedung maupun sarana dan prasarana penunjang Tugas dan Fungsi Peradilan untuk keadaan Tahun 2024 dapat kami laporkan sebagai berikut

Tabel IV.3. Sarana/Prasarana Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2024

NO	SATKER	RUANG HAKIM	RUANG KEPANITERAAN	RUANG KESEKRETARIATAN	TOTAL RUMAH DINAS	TOTAL KENDARAAN DINAS
1	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	25	7	5	13	15
2	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	8	7	5	20	12
3	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	2	6	3	12	4
4	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	1	3	3	9	5
5	PENGADILAN NEGERI BARRU	1	4	4	9	9
6	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	1	4	4	9	11
7	PENGADILAN NEGERI MAROS	2	5	4	10	6
8	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	1	5	3	8	3
9	PENGADILAN NEGERI PAREPARE	1	6	4	11	9
10	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	2	5	4	9	7
11	PENGADILAN NEGERI SIDRAP	2	4	4	9	5
12	PENGADILAN NEGERI PINRANG	2	5	4	10	9
13	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	6	6	4	9	12
14	PENGADILAN NEGERI WATANSOPPE	1	5	4	9	8
15	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	2	6	5	9	8
16	PENGADILAN NEGERI BANTAENG	1	3	3	9	6
17	PENGADILAN NEGERI SINJAI	1	4	4	11	7
18	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	1	4	4	11	7
19	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	1	5	4	9	11
20	PENGADILAN NEGERI PALOPO	1	5	4	8	9
21	PENGADILAN NEGERI MAKALE	1	6	4	8	9
22	PENGADILAN NEGERI BELOPA	4	4	4	0	7
23	PENGADILAN NEGERI MALILI	1	4	4	2	5
24	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	1	4	4	0	5

➤ **RUMAH DINAS**

Data Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel IV.4. Data Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan Tahun 2024

NO	SATUAN KERJA	ALAMAT	LUAS (M2)	KONDISI
1	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	BOTOLEMPANGAN	580	Baik
		JL.BUNGAYA	470	Baik
		ANDI TONRO	300	Baik
		PENGAYOMAN F9/2	225	Baik
		RACING CENTER IV/1	200	Rusak Berat
		RACING CENTER IV/2	200	Rusak Berat
		RACING CENTER IV/3	200	Rusak Berat
		RACING CENTER IV/4	200	Rusak Berat
		PENGAYOMAN F9/3	225	Baik
		TODDOPULI RAYA NO.38	120	Baik
		TODDOPULI RAYA NO.40	120	Baik

		TODDOPULI RAYA NO: 44	120	Baik
		TODDOPULI RAYA NO:42	120	Baik
2	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	Jl. Urip Sumohardjo	167	Baik
		Jl. P. Kemerdekaan Km.9 BTN. HAMzy N.1/1	77	Rusak ringan
		Jl. P.Kemerdekaan Km. 9 BTN. Hamzy N1/10	100	Rusak ringan
		Jl. Veteran No. 398	70	Rusak berat
		Jl. Manuruki II No. 55	90	Baik
		Jl. Manuruki II No. 53	73	Rusak berat
		Jl. Manuruki II No. 53 A	89	Rusak berat
		Jl. Manuruki II No. 53 B	73	Rusak berat
		Jl. Rutan 5 B	100	Baik
		Jl. Rutan No. 5 A	100	Baik
		Jl. Rutan No. 5 C	100	Baik
		Jl. Rutan 5 D	100	Baik
		Jl. Rutan 5 E	100	Baik
		Jl. Pengayoman F9/3	107	Baik
		Jl. Pelita Raya Tengah I Blok A3/6C	76	Rusak berat
		Jl. Pelita Raya Tengah I Blok A3/6D	76	Rusak berat
		Jl. Pelita Raya Tengah I Blok A3/6F	76	Rusak ringan
		Jl. Pengayoman F11/5	74	Baik
		Jl. Pengayoman F 11/6	74	Baik
		Jl. Gatot Subroto Lr. I No. 3A, Mks	156	Rusak ringan
3	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	ANDI TONRO	70	Baik
		ANDI TONRO	70	Baik
		ANDI TONRO	70	Baik
		HOS COKROAMINOTO	325	Baik
		ABD. RASYID DG. LURANG	81	Rusak Berat
		ABD. RASYID DG. LURANG	81	Rusak Berat
		KENANGA	70	Rusak Berat
		MESJID RAYA	70	Baik
		MESJID RAYA	70	Baik
		DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO	80	Rusak Berat
		DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO	80	Rusak Berat
		DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO	80	Rusak Berat
4	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	Jl. Flamboyan No. 45	130	Baik
		Jl. Flamboyan No. 41	70	Baik
		Jl. Flamboyan No. 43	70	Baik
		Jl. Flamboyan No. 39	70	Baik
		Jl. Andi Mauraga No. 74	70	Rusak Berat
		Jl. Andi Mauraga No. 76	70	Rusak Berat
		Jl. Andi Mauraga No. 78	70	Rusak Berat
		Jl. Andi Mauraga No. 80	70	Rusak Berat
		Jl. Andi Mauraga No. 82	70	Rusak Berat
5	PENGADILAN NEGERI BARRU	JL. COKROAMINOTO NO. 37	88	baik
		JL. A. M. AKBAR NO. 33	91	baik
		JL. H. LANAKKA NO. 4	43	baik

		JL. MASJID RAYA NO. 32	83	baik
		JL. MASJID RAYA NO. 34	80	baik
		JL. MASJID RAYA NO. 36	80	baik
		JL. MASJID RAYA NO. 38	83	baik
		JL. MASJID RAYA NO. 44	80	baik
		JL. MASJID RAYA NO. 46	80	baik
6	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	Sultan Hasanuddin No. 172	77	Baik
		Sultan Hasanuddin No. 176	77	Rusak Ringan
		Sultan Hasanuddin No. 170	77	Baik
		Sultan Hasanuddin No.2	80	Baik
		Sultan Hasanuddin No.3	80	Baik
		Sultan Hasanuddin No.5	84	Baik
		Kartini No. 2/138	165	Baik
		Kartini no. 140	80	Baik
		Sultan hasanuddin No. 174	77	Baik
7	PENGADILAN NEGERI MAROS	Jl. Abbas Dg. Sialu	179	Baik
		Jl. Beringin	116	Baik
		Jl. Ratulangi	81	Baik
		Jl. Ratulangi	78	Rusak Ringan
		Jl. Ratulangi	78	Rusak Ringan
		Jl. Ratulangi	78	Rusak Ringan
		Jl. Ratulangi	78	Rusak Ringan
		Jl. Taqwa No. 75	73	Baik
		Jl. Taqwa	72	Rusak Ringan
		Jl. Lanto Dg. Pasewang	343	Rusak Ringan
		Jl.Beringin	70	Rusak Berat
8	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	LANTO DAENG PASEWANG	81	BAIK
		LANTO DAENG PASEWANG	130	BAIK
		PAHLAWAN	72	RUSAK RINGAN
		PAHLAWAN	72	RUSAK RINGAN
		PAHLAWAN	72	RUSAK RINGAN
		PAHLAWAN	72	RUSAK RINGAN
		PAHLAWAN	74	RUSAK RINGAN
		KAMBOJA	77	RUSAK RINGAN
9	PENGADILAN NEGERI PAREPARE	JL. ABUBAKAR LAMBOGO	177	RUSAK BERAT
		JL. VETERAN 31	268	BAIK
		PERSADA INDAH NO. 7	72	BAIK
		BERINGIN NO. 13	75	BAIK
		JL. BERINGIN NO. 15	75	BAIK
		JL. JEND. SUDIRMAN NO. 53	91	BAIK
		JL. JEND. SUDIRMAN NO. 41 A	80	BAIK
		JL. PERSADA INDAH NO. 05	72	BAIK
		JL. JEND. SUDIRMAN NO. 41	135	BAIK
		JL. PERSADA INDAH NO. 03	72	BAIK
		VETERAN NO. 30 A	87	RUSAK BERAT
10	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	Jl. SILIWANGI	70	BAIK
		Jl. SILIWANGI	70	BAIK
		JL. JENDERAL SUDIRMAN	70	BAIK
		JL. JENDERAL SUDIRMAN	70	BAIK
		JL. JENDERAL SUDIRMAN	70	BAIK
		JL. JENDERAL SUDIRMAN	70	BAIK
		JL. PATTIMURA	70	BAIK

		JL. JENDERAL SUDIRMAN	70	BAIK
		JL. LASINRANG NO. 2	70	BAIK
11	PENGADILAN NEGERI SIDRAP	Jl.Abd.Gani Rasul	70	Baik
		Jl.Andi Makkasau	126	Rusak ringan
		Lanto Dg Pasewang Lr	83	Baik
		Jl.Andi Makkasau	70	Rusak ringan
		Lt.Dg Pasewang Lr	86	Baik
		Lanto Dg Pasewang	109	Baik
		Abd Gani Rasul	82	Rusak ringan
		Lanto Dg Pasewang	70	Baik
		Lanto Dg Pasewang	70	Baik
12	PENGADILAN NEGERI PINRANG	GATOT SUBROTO NO. 18	72	Rusak Ringan
		GATOT SUBROTO NO. 20	72	Rusak Berat
		GATOT SUBROTO NO. 22	72	Rusak Berat
		GATOT SUBROTO NO. 24	72	Rusak Berat
		GATOT SUBROTO NO. 12	72	Rusak Berat
		GATOT SUBROTO NO. 10	75	Rusak Berat
		MT. HARYONO NO. 2	83	Rusak Ringan
		JEND. SUKAWATI NO. 38A	100	Rusak Ringan
		JENDERAL SUKAWATI NO. 38B	73	Rusak Ringan
		GATOT SUBROTO NO. 14	72	Rusak Berat
13	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	JL. HOS COKROAMINOTO	70	Baik
		JL. HOS COKROAMINOTO	70	Baik
		JL. HOS COKROAMINOTO	70	Baik
		JL. HOS COKROAMINOTO	70	Baik
		JL. M.H TAMRIN	83	Baik
		JL. HOS COKROAMINOTO	83	Rusak Berat
		Jl. Lanto Dg. Pasewang	95	Baik
		Jl. Yos Sudarso	83	Rusak Ringan
		Jl. Lanto Dg. Pasewang	207	Rusak Berat
14	PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG	JL. ABDUL MUIS	82	Baik
		Jl. H.A. WANA LABURAUNG	72	Baik
		Jl. SAMUDERA	106	Baik
		Jl. BALUBU	95	Rusak Ringan
		Jl. BALUBU	95	Rusak Ringan
		Jl. MERDEKA	70	Rusak Ringan
		Jl. MERDEKA	70	Rusak Ringan
		Jl. MERDEKA	70	Rusak Ringan
		Jl. MERDEKA	70	Rusak Ringan
15	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	JL. VETERAN NO. 46 SENGKANG	95	Baik
		JL. BAU BAHARUDDIN	70	Baik
		JL. BAU MAHMUD	70	Baik
		Jl. PENGADILAN	70	Baik
		Jl. PENGADILAN	70	Baik
		Jl. PENGADILAN	70	Baik
		Jl. PENGADILAN	70	Baik
		JL. ANDI MACCA AMIRULLAH NO. 89	80	Baik
		JL. ANDI MACCA AMIRULLAH NO. 88	80	Baik
16	PENGADILAN NEGERI BANTAENG	Jln. Sungai Bialo No. B22	72	Rusak Ringan

		Jln. Sungai Bialo No. B5/22	72	Rusak Ringan
		JLN. SUNGAI BIALO NO. B2	72	Rusak Ringan
		JLN. SUNGAI BIALO NO. B 24	72	Rusak Ringan
		JLN. SUNGAI BIALO NO. 18	72	Rusak Ringan
		JLN. SUNGAI BIALO B 20	72	Rusak Ringan
		JLN. TERATAI LORONG NO. 17	72	Rusak Ringan
		JLN. KENANGA	72	Rusak Ringan
		JLN. KENANGA	74	Rusak Ringan
17	PENGADILAN NEGERI SINJAI	Mading Mathan 7	70	Baik
		Abu Bakar AT. no. 8	70	baik
		Mading Mathan No. 9	70	Baik
		Tassililu, Sinjai Barat	70	Baik
		Jend. Sukowati	90	Baik
		Mading mathan No. 5	70	Baik
		Abu Bakar AT No. 6	70	Rusak Ringan
		KI HAJAR DEWANTARA	80	Baik
		PERSATUAN RAYA	226	Baik
		PERSATUAN RAYA	80	Baik
		PERSATUAN RAYA	50	Rusak Berat
18	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	JALAN KENARI NO.11	72	Rusak Ringan
		Matahari No.3	108	Rusak Ringan
		JALAN. MATAHARI NO.5	84	Rusak Ringan
		JALAN .S. MAJIDI NO.26	83	Baik
		JALAN MATAHARI NO.1	72	Rusak Ringan
		JALAN .Anggrek NO. 21	233	Rusak Ringan
		JALAN . MELATI NO.9	72	Rusak Ringan
		JALAN ANGGREK NO.19	308	Rusak Ringan
		JALAN CENDANA No. 2 A	72	Rusak Ringan
		JALAN . CENDANA . NO 2B	72	Rusak Ringan
		JALAN .CENDANA NO.2	72	Rusak Ringan
19	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	Kartini No. 4	113	Baik
		Siswomiharjo No. 45	72	Baik
		Siswomiharjo No. 47	72	Baik
		DR. MUhtar No. 21	104	Baik
		Siswomiharjo No. 17	73	Baik
		Siswomiharjo No. 02	73	Baik
		Siswomiharjo No. 19	73	Baik
		Siswomiharjo No. 21	73	Baik
		Siswomiharjo No. 23	73	Baik
20	PENGADILAN NEGERI PALOPO	Andi Djemma No. 139	120	Rusak Berat
		Tandipau No. 53	120	Baikk
		K.H. Ahmad Razak	112	Baik
		K.H. Ahmad Razak	112	Baik
		K.H. Ahmad Razak	112	Baik
		K.H. Ahmad Razak	112	Baik
		Tandipau No. 2	110	Baik
		Tandipau No. 6	90	Baik
21	PENGADILAN NEGERI MAKALE	Jln.Pongtiku no.112 Makale	70	BAIK
		Jln.Pongtiku no.112 Makale	70	RUSAK RINGAN
		Jln.Pongtiku no.112 Makale	70	BAIK
		Jln.Pongtiku no.112 Makale	70	BAIK
		Jln.Pongtiku no.112 Makale	70	BAIK

		Jln.Pongtiku no.112 Makale	70	BAIK
		Jln.Pongtiku Makale	70	RUSAK RINGAN
		Jln.Manggasa Makale	70	RUSAK RINGAN
22	PENGADILAN NEGERI BELOPA	NIHIL	NIHIL	BELUM MEMILIKI RUMAH DINAS
23	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	NIHIL	NIHIL	BELUM MEMILIKI RUMAH DINAS
24	PENGADILAN NEGERI MALILI	Jln. Soekarno Hatta Malili	108	BAIK
		Jln. Soekarno Hatta Malili	183	BAIK

➤ **KENDARAAN DINAS**

Data Kendaraan Dinas Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel IV.5 Data Kendaraan Dinas Pengadilan Tinggi Makassar dan
Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan Tahun 2024

- RODA 4

NO	SATKER	TIPE	KONDISI	PENANGGUNGJAWAB	KET
1	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	TOYOTA ALPHARD	Baik	KETUA	
		TOYOTA CAMRY	Baik	KETUA	
		TOYOTA FORTUNER	Baik	WAKIL KETUA	
		TOYOTA CAMRY	Baik	Operasional	
		TOYOTA INNOVA	Baik	Panitera	
		TOYOTA INNOVA	Baik	Kabag Umum dan Keuangan	
		TOYOTA INNOVA	Baik	Operasional	
		TOYOTA HIACE	Baik	KASUB TURT	Operasional
		TOYOTA ALTIS	Baik	Kabag Kepegawaian	
		TOYOTA VIOS	Baik	SEKRETARIS	
2	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	TOYOTA ALTIS	Baik	Ketua	SEWA MARI
		TOYOTA INNOVA	Baik	Wakil Ketua	Operasional
		TOYOTA INNOVA	Baik	Panitera	Operasional
		TOYOTA VIOS	Baik	Sekretaris	Operasional
		TOYOTA KF80	Baik	Kabag Umum	Operasional
		TOYOTA KF83	Baik	Kasubag	Operasional
		TOYOTA KF70	Rusak Ringan	Kasubag	Operasional
3	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	TOYOTA KF70	Rusak Berat	Sekretaris	Sudah dilelang dan di hapus
		TOYOTA INNOVA E	Baik	Wakil Ketua	Operasional
		TOYOTA AVANZA VELOZ	Baik	Panitera	Operasional
4	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	TOYOTA INNOVA	Baik	WKPN	Operasional
		TOYOTA AVANZA	Baik	Panitera	Operasional
5	PENGADILAN NEGERI BARRU	TOYOTA KIJANG LX	Baik	Sekretaris	
		TOYOTA INNOVA E	Baik	wakil Ketua	
		TOYOTA RUSH	baik	Ketua	
		TOYOTA AVANZA VELOZ	Baik	Panitera	
6	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	TOYOTA INNOVA E	Baik	Wakil Ketua	
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Panitera	
		TOYOTA RUSH 1.5 TYPE G	Baik	sekretaris	

7	PENGADILAN NEGERI MAROS	TOYOTA VENTURER	Baik	Ketua	Pinjam Pakai
		TOYOTA RUSH NEW	Baik	Wakil Ketua	Hibah
		TOYOTA AVANZA	Baik	Panitera	Operasional
		TOYOTA INNOVA	Baik	Kasubbag Kepegawaian	Operasional
		TOYOTA KIJANG	Rusak Ringan	Kasubbag Umum	Operasional
		TOYOTA RUSH	Baik	Sekretaris	Pinjam Pakai
8	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	TOYOTA KIJANG LONG DELUXE	Rusak Ringan	Sekretaris	
		TOYOTA INNOVA	Baik	Wakil Ketua	
		TOYOTA AVANZA	Baik	Panitera	
		TOYOTA INNOVA	Baik	Ketua	PINJAM PAKAI
9	PENGADILAN NEGERI PAREPARE	TOYOTA INNOVA	Baik	Wakil Ketua	
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Panitera	
		TOYOTA RUSH	Baik	Sekretaris	
		TOYOTA KV83	Rusak Ringan	Sekretaris	OPERASIONAL
		TOYOTA INNOVA REBORN	Baik	Ketua	Pinjam Pakai
10	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	TOYOTA KIJANG SUPER	Baik	Sekretaris	OPERASIONAL
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Panitera	OPERASIONAL
		TOYOTA INNOVA	Baik	Sekretaris	OPERASIONAL
11	PENGADILAN NEGERI SIDRAP	TOYOTA INNOVA HYBRIDE	Baik	Ketua	Pinjam Pakai
		TOYOTA INNOVA	Baik	Wakil Ketua	Jabatan
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Panitera	OPERASIONAL
12	PENGADILAN NEGERI PINRANG	TOYOTA INNOVA	Baik	Ketua	JABATAN
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Panitera	JABATAN
13	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	FORTUNER	Baik	Ketua	Pinjam Pakai
		TOYOTA KIJANG INNOVA	Baik	Panitera	
		TOYOTA NEW INNOVA	Baik	Wakil Ketua	
		TOYOTA KIJANG AVANZA	Rusak	Sekretaris	
		TOYOTA KIJANG	Baik	Kasubag	
14	PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG	TOYOTA INNOVA	Baik	Wakil Ketua	
		TOYOTA HILUX	Baik	Ketua	Pinjam Pakai
		TOYOTA KIJANG SUPER	Baik	Sekretaris	
		TOYOTA KIJANG STANDAR	Baik	Kasub Umum	Pinjam Pakai
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Panitera	
15	PENGADILAN NEGERI SENKANG	TOYOTA KIJANG SUPER	Rusak Ringan	Kasub Umum	
		TOYOTA INNOVA	Rusak Ringan	Wakil Ketua	
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Panitera	
		TOYOTA FORTUNER	Baik	Ketua	Pinjam Pakai
		TOYOTA INNOVA	Rusak Ringan	Sekretaris	Pinjam Pakai
16	PENGADILAN NEGERI BANTAENG	TOYOTA INNOVA VENTURER	Baik	Ketua	Pinjam Pakai
		TOYOTA KIJANG SUPER	Rusak Ringan	Sekretaris	Operasional
		TOYOTA AVANZA	Rusak Ringan	Panitera	Operasional
		TOYOTA INNOVA	Rusak Ringan	Wakil Ketua	Operasional
17	PENGADILAN NEGERI SINJAI	TOYOTA INNOVA STD	Baik	Ketua	PINJAM PAKAI
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Panitera	OPERASIONAL
		TOYOTA KIJANG	Baik	Sekretaris	OPERASIONAL

18	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	TOYOTA FORTUNER	Baik	Ketua	Hibah
		INNOVA ZENIX	Baik	Wakil Ketua	Hibah
		TOYOTA INNOVA G	Rusak Ringan	Sekretaris	Operasional
		TOYOTA KIJANG	Rusak Ringan		Operasional
		TOYOTA AVANZA	Rusak Ringan	Panitera	Operasional
19	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	TOYOTA KIJANG KF70	Rusak Ringan	KPB	Usul penjualan
		TOYOTA INNOVA E	Baik	Kasubag Umum	Operasional
		TOYOTA AVANZA	Baik	Panitera	Operasional
		TOYOTA INNOVA ZENIX	Baik	Ketua	PINJAM PAKAI
		MITSUBISHI EXPANDER	Baik	Sekretaris	Operasional
20	PENGADILAN NEGERI PALOPO	TOYOTA INNOVA E	Baik	Ketua	PINJAM PAKAI
		TOYOTA AVANZA	Baik	Panitera	Operasional
21	PENGADILAN NEGERI MAKALE	TOYOTA FORTUNER	Baik	Ketua	PINJAM PAKAI
		TOYOTA INNOVA/E	Baik	Wakil Ketua	PINJAM PAKAI
		TOYOTA INNOVA/E	Baik	Sekretaris	operasional
		TOYOTA AVANZA VELOZ	Baik	Panitera	operasional
		TOYOTA AVANZA E-DRES	Baik	Kasub Bagian Umum dan Keuangan	operasional
22	PENGADILAN NEGERI BELOPA	INNOVA	Baik	Ketua	PINJAM PAKAI
		EXPANDER	Baik	Panitera	SEWA DARI MA
		EXPANDER	Baik	Sekretaris	Operasional
		TOYORA RUSH	Baik	Panmud	operasional
23	PENGADILAN NEGERI MALILI	TOYOTA INNOVA/E	Baik	Sekretaris	operasional
		TOYOTA AVANZA/VELOZ	Baik	Panitera	operasional
		TOYOTA INNOVA/G	Baik	Wakil Ketua	pinjam pakai
		TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ	Baik	Ketua	pinjam pakai
24	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	TOYOTA INNOVA/G	Baik	Ketua	Operasional
		TOYOTA AVANZA	Baik	Panitera	operasional
		DAIHATSU TERIOS	Baik	Sekretaris	PINJAM PAKAI

- RODA 2

NO	SATKER	TIPE	KONDISI	PENANGGUNGJAWAB	KET
1	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	HONDA MEGAPRO	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		HONDA MEGAPRO	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		HONDA MEGAPRO	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		HONDA SUPRA	BAIK	KASUB KEPEG	OPERASIONAL
		HONDA SUPRA	BAIK	STAF	OPERASIONAL
2	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	SUZUKI THUNDER 125	RUSAK RINGAN	SEKRETARIS	OPERASIONAL
		SUZUKI NEW SHOGUN	BAIK	JURUSITA	OPERASIONAL
		SUZUKI THUNDER	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		HONDA MEGAPRO	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		HONDA MEGAPRO	RUSAK RINGAN	STAF	OPERASIONAL
3	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	HONDA CG110	RUSAK BERAT	SEKRETARIS	Sudah dilelang dan di hapus
		HONDA GLPRO	RUSAK BERAT	SEKRETARIS	Sudah dilelang dan di hapus
		HONDA MCB	RUSAK BERAT	SEKRETARIS	Sudah dilelang dan di hapus
		YAMAHA JUPITER MX	RUSAK RINGAN	KASUBBAG	Sudah dilelang dan di hapus

		YAMAHA 256	RUSAK RINGAN	KASUBBAG	Operasional
		YAMAHA 256	RUSAK RINGAN	PANMUD	Sudah dilelang dan di hapus
		YAMAHA 256	RUSAK RINGAN	KASUBBAG	Operasional
		HONDA NF125	RUSAK RINGAN	STAF	Sudah dilelang dan di hapus
4	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	SHOGUN 125	BAIK	STAF	Operasional
		SUZUKI THUNDER	RUSAK BERAT	KASUBBAG	Operasional
		HONDA SUPRA X125	BAIK	KASUBBAG	Operasional
5	PENGADILAN NEGERI BARRU	HONDA MEGAPRO	BAIK	PANMUD	
		HONDA MEGAPRO	BAIK	PANMUD	
		HONDA MEGAPRO	BAIK	KASUBBAG	
		HONDA ASTREA	BAIK	PANMUD	
		HONDA MEGAPRO	BAIK	STAF	
6	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	HONDA MEGAPRO	BAIK	STAF	
		HONDA MCB	RUSAK RINGAN	KASUBBAG	OPERASIONAL
		HONDA NF 125 SD	BAIK	KASUBBAG	OPERASIONAL
		SUZUKI MF125	BAIK	KASUBBAG	OPERASIONAL
		YAMAHA JUPITER Z	BAIK	JURUSITA	
		YAMAHA JUPITER Z	BAIK	JURUSITA	
		YAMAHA JUPITER Z	BAIK	KASUBBAG	
		HONDA NF 12A1C M/T	BAIK	KASUBBAG	
7	PENGADILAN NEGERI MAROS	HONDA GL PRO	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		YAMAHA MX	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		HONDA SUPRA	BAIK	KASUBBAG	OPERASIONAL
8	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	HONDA CG110	RUSAK BERAT	KPB	
		HONDA GLPRO	RUSAK BERAT	KPB	
		SUZUKI THUNDER	RUSAK BERAT	KPB	
		SUZUKI THUNDER	RUSAK RINGAN	SEKRETARIS	OPERASIONAL
		YAMAHA JUPITER MX	BAIK	Kasubbag Umum & Keuangan	
		SUZUKI AXELO	BAIK	JURUSITA	
		YAMAHA MX CW	BAIK	JURUSITA	
9	PENGADILAN NEGERI PAREPARE	HONDA MEGA PRO	RUSAK BERAT	KPB	Sudah dilelang
		HONDA MEGA PRO	BAIK	PANMUD PIDANA	OPERASIONAL
		HONDA NV125	BAIK	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	OPERASIONAL
		HONDA NV125	BAIK	SEKRETARIS	OPERASIONAL
		YAMAHA JUPITER CW	BAIK	KPB	OPERASIONAL
10	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	SUZUKI SHOGUN	BAIK	KASUBBAG KPOT	OPERASIONAL
		HONDA GL160	BAIK	KASUBBAG UMUM	OPERASIONAL
		HONDA NF125	BAIK	PANMUD PIDANA	OPERASIONAL
11	PENGADILAN NEGERI SIDRAP	HONDA CG110	RUSAK BERAT		Sudah dilelang dan di hapus
		SUZUKI A1	RUSAK BERAT		Sudah dilelang dan di hapus
		HONDA NF125	RUSAK RINGAN	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN IT	OPERASIONAL
		HONDA NF125	RUSAK RINGAN	PENGELOLA KEUANGAN APBN	OPERASIONAL
		HONDA NC11B	BAIK	SEKRETARIS	OPERASIONAL
12	PENGADILAN NEGERI PINRANG	HONDA SUPRA	BAIK	JURUSITA	OPERASIONAL
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	PANMUD HUKUM	OPERASIONAL
		SUZUKI THUNDER	BAIK	STAF	OPERASIONAL

		SUZUKI A100	RUSAK BERAT	KPB	USULAN PEMINDAHTANGAN/ PENJUALAN
		SUZUKI AXELO	BAIK	PANMUD PERDATA	OPERASIONAL
		SUZUKI AXELO	BAIK	KASUBBAG UMUM	OPERASIONAL
		SUZUKI AXELO	BAIK	SEKRETARIS	OPERASIONAL
13	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	HONDA SUPRA FIT	RUSAK RINGAN	PENGELOLA KEUANGAN	
		HONDA SUPRA FIT	RUSAK RINGAN	JURUSITA	
		HONDA MEGAPRO	RUSAK RINGAN	JURUSITA	
		YAMAHA MIO SOUL	RUSAK RINGAN	KASUBBAG	
		HONDA SUPRA 125	BAIK	BENDAHARA PENGELUARAN	
		HONDA SUPRA 125	BAIK	KASUBBAG	
		HONDA SPACY	BAIK	PENGELOLA KEUANGAN	
14	PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG	SUZUKI UW125	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		HONDA NF11C1	BAIK	JURUSITA PENGGANTI	
		SUZUKI EN125	BAIK	STAF	
15	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	HONDA GL-PRO	BAIK	STAF	
		HONDA MEGAPRO	BAIK	STAF	
		HONDA GL160	BAIK	STAF	
		HONDA CS124	BAIK	JURUSITA	
		HONDA NF11C1	BAIK	PANMUD	
16	PENGADILAN NEGERI BANTAENG	HONDA CG110	RUSAK BERAT	KPB	
		SUZUKI SHOGUN	RUSAK BERAT	PANMUD	
		SUZUKI THUNDER	RUSAK RINGAN	STAF	OPERASIONAL
		SUZUKI SHOGUN	RUSAK RINGAN	KASUBBAG	OPERASIONAL
		HONDA SUPRA	RUSAK RINGAN	STAF	OPERASIONAL
17	PENGADILAN NEGERI SINJAI	HONDA KHARISMA	BAIK	PANMUD	OPERASIONAL
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	KASUBBAG	OPERASIONAL
		SUZUKI AXELO	BAIK	PANMUD	OPERASIONAL
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	STAF	OPERASIONAL
18	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	YAMAHA JUPITER MX	RUSAK RINGAN	STAF	
		SUZUKI SHOGUN	RUSAK RINGAN	STAF	
		SUZUKI AXELO	RUSAK RINGAN	KASUBBAG	
		SUZUKI NEW ADDRESS	RUSAK RINGAN	KASUBBAG	
19	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	HONDA A100	RUSAK RINGAN	KASUBBAG	Operasional
		HONDA CG110	RUSAK BERAT	KPB	Diusulkan pemindahtanganan
		HONDA WIN	RUSAK RINGAN	STAF	Operasional
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	STAF	Operasional
		HONDA SUPRA	BAIK	STAF	Operasional
		HONDA SUPRA	BAIK	KASUBBAG	Operasional
20	PENGADILAN NEGERI PALOPO	HONDA CG110	RUSAK BERAT	KPB	sudah dilelang, masih pengajuan penghapusan
		HONDA NF125SF	BAIK	KASUBBAG	Operasional
		HONDA SUPRA	BAIK	SEKRETARIS	Operasional
		HONDA SPACY	BAIK	KETUA	Operasional
		HONDA NEW BLADE CW	BAIK	KASUBBAG	Operasional
		HONDA MEGAPRO	BAIK	PANMUD	Operasional
21	PENGADILAN NEGERI MAKALE	HONDA CG110	RUSAK BERAT	KPB	sudah dilelang, masih pengajuan penghapusan

		HONDA GLMAX	RUSAK BERAT	STAF	sudah dilelang, masih pengajuan penghapusan
		HONDA MEGAPRO	RUSAK BERAT	STAF	sudah dilelang, masih pengajuan penghapusan
		SUZUKI SHOGUN	RUSAK RINGAN	STAF	operasional
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	KASUBBAG	operasional
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	KASUBBAG	operasional
22	PENGADILAN NEGERI BELOPA	YAMAHA CW F1	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		YAMAHA AEROX	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		HONDA REVO X	BAIK	STAF	OPERASIONAL
23	PENGADILAN NEGERI MALILI	JUPITER CW135	BAIK	-	Operasional Kepaniteraan
		JUPITER CW135	BAIK	BENDAHARA PENGELUARAN	Operasional Kesekretariatan
		HONDA BEAT	BAIK	BENDAHARA PNBP	Operasional Kesekretariatan
24	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	HONDA SUPRA X125	BAIK	Kasubbag	
		HONDA VIERZA	BAIK	JS	
		HONDA SUPRA X125	BAIK	Panmud	

C. *Pengelolaan Teknologi Informasi*

Teknologi Informasi di era modern seperti saat ini sangatlah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Pengadilan sebagai lembaga Pelayanan Publik di Bidang Hukum.

Berdasarkan Surat Keputusan KMA No.1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka disetiap pengadilan di Indonesia diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan pelayanan tersebut. Baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak. Teknologi informasi merupakan faktor penting pendukung kinerja instansi,

khususnya pada Pengadilan Tinggi Makassar. Saat ini fasilitas teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Makassar telah dioperasikan non-stop selama 24 jam setiap harinya. Sehingga pengisian data dan akses informasi dapat diakses setiap waktu oleh seluruh warga Pengadilan Tinggi Makassar di lingkungan kantor. Berikut akan diulas secara detail mengenai pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Makassar. Mayoritas hampir semua ketua pengadilan telah menetapkan Tim Teknologi Informasi dalam bentuk surat keputusan ketua pengadilan.

- Perangkat lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengadilan adalah:

1. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), aplikasi ini merupakan aplikasi wajib yang harus dimiliki setiap pengadilan di Indonesia. Aplikasi ini digunakan sebagai aplikasi bantu register perkara dalam proses menuju pelaporan yang paperless. Selain itu aplikasi CTS versi web, bisa diakses oleh para pencari keadilan untuk mencari informasi perkara yang sedang berlangsung. Sekarang ini sudah ada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara untuk tingkat pengadilan banding. Aplikasi ini menampung data banding yang dikirim oleh pengadilan tingkat pertama yang mengajukan banding dengan memasukkan data banding melalui aplikasi SIPP pada pengadilan tingkat pertama. Sehingga baik pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sama-sama sudah memiliki aplikasi SIPP sehingga dapat menjadi alat kontrol pengadilan tingkat banding kepada pengadilan tingkat pertama.
2. Aplikasi e-Court, e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah;
3. Aplikasi Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi utama sebagai media pelaporan dan penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, keuangan, dan remunerasi.
4. Aplikasi SAKTI, Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi merupakan aplikasi keuangan untuk satker, yang menghasilkan sebuah laporan keuangan seperti laporan realisasi belanja, realisasi pendapatan dan realisasi-realisisasi lain yang berhubungan dengan keuangan. Aplikasi ini juga untuk pencatatan Aset, baik aset tetap berupa gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan dan irigasi maupun jaringan. dan juga dapat mencatat aset-aset tak berwujud seperti software computer serta untuk pencatatan transaksi barang-barang yang peruntukannya sebagai persediaan atau biasa disebut dengan barang habis pakai.
5. Aplikasi gaji (GPP) Aplikasi ini sebenarnya memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai aplikasi pencetakan dokumen perhitungan gaji pegawai PNS/Hakim/Polisi, dan juga sebagai aplikasi pendukung pada aplikasi SAKTI.
6. Aplikasi emonev Bappenas merupakan aplikasi pelaporan data hasil pemantauan generasi ketiga dari aplikasi yang sudah dikembangkan dan dijalankan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 (PP 39/2006) tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di terbitkan
7. Aplikasi emonev DJA atau disebut Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
8. Aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) merupakan aplikasi serbaguna pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, pemeliharaan dan penghapusannya.
9. Website, semua pengadilan sudah memiliki website pengadilan masing-masing, tujuan dari website ini adalah sebagai bentuk pelayanan informasi publik.
10. Sikep, Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) adalah aplikasi pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya
11. Komdanas, Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) adalah sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Makassar dan satker dibawahnya melakukan berbagai upaya demi mewujudkan visi Badan Peradilan Yang Agung. Salah satunya dengan pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu yang sejak Tahun 2024 menjadi AMPUH. Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Jika tim penilai memutuskan bahwa nilai akhir satuan kerja sudah memenuhi standar yang telah ditentukan dan tidak ada temuan berupa; berkas hilang, penyalahgunaan keuangan, operasi tangkap tangan dan tindakan pungutan liar (operasi saber pungli), maka terhadap satuan kerja dapat diberikan Sertifikat Mutu Pengadilan Unggul. Predikat sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) :

- 1. Paripurna
- 2. Unggul
- 3. Utama
- 4. Baik
- 5. Cukup

Peringkat Predikat Paripurna akan diraih setelah satuan kerja yang dinilai meraih predikat Unggul selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Berikut ini predikat AMPUH di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar :

Tabel V.1. Daftar Predikat Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar

NO	NAMA SATKER	KELAS	LOKASI	Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh
1	PT MAKASSAR	Type A	MAKASSAR	UTAMA
2	PN MAKASSAR	IA KHUSUS	MAKASSAR	UTAMA
3	PN SUNGGUMINASA	IA	SUNGGUMINASA	UTAMA
4	PN TAKALAR	II	TAKALAR	UTAMA
5	PN JENEPONTO	II	JENEPONTO	UTAMA
6	PN BANTAENG	II	BANTAENG	UNGGUL
7	PN MAROS	IB	MAROS	UTAMA
8	PN PANGKAJENE	II	PANGKAJENE	UTAMA
9	PN BARRU	II	BARRU	UTAMA
10	PN PAREPARE	II	PAREPARE	UTAMA
11	PN SIDRAP	II	SIDRAP	UTAMA
12	PN PINRANG	II	PINRANG	UTAMA
13	PN ENREKANG	II	ENREKANG	UTAMA

14	PN WATANSOPPENG	II	WATANSOPPENG	UTAMA
15	PN BULUKUMBA	IB	BULUKUMBA	UTAMA
16	PN SELAYAR	II	KEPULAUAN SELAYAR	UTAMA
17	PN SINJAI	II	SINJAI	UTAMA
18	PN WATAMPONE	IA	BONE	UTAMA
19	PN SENGKANG	IB	WAJO	UTAMA
20	PN PALOPO	IB	PALOPO	UTAMA
21	PN MAKALE	IB	MAKALE, TANA TORAJA	UTAMA
22	PN MALILI	II	MALILI, KAB. LUWU TIMUR	UTAMA
23	PN MASAMBA	II	MASAMBA, KAB. LUWU UTARA	UTAMA
24	PN BELOPA	II	BELOPA, KAB. LUWU	UTAMA

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Pengadilan Tinggi Makassar telah melaksanakan pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu melalui satu pintu, yang mana PTSP ini bertujuan untuk :

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Prinsip dalam pelaksanaan PTSP yaitu:
 - a. Keterpaduan;
 - b. Efektif, Efisien, Ekonomis;
 - c. Koordinasi;
 - d. Akuntabilitas; dan
 - e. Aksesibilitas.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Pengadilan Tinggi Makassar telah menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa Pelayanan Terpad Satu Pintu (PTSP) yang terdiri dari Meja Pelayanan dan Meja Informasi, yang ada di bagian depan/lobi gedung pengadilan, berdasarkan SK. Ketua Pengadilan masing-masing setiap harinya telah ditunjuk petugas piket untuk meja informasi dan juga petugas pelayanan. Bagi pengunjung yang datang ke pengadilan petugas meja informasi yang akan memberi penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat di meja mana akan mendapatkan layanan sesuai dengan yang dituju.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Untuk meningkatkan dan menjaga kemadirian dalam pemberian layanan kepada pencari keadilan beberapa Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan telah menerapkan beberapa inovasi, diantaranya:

a. Penerapan *Security Justice*

Gedung Pengadilan Negeri telah menerapkan *security justice* dan *area steril* guna menindaklanjuti penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). *Security justice* yang dimaksud adalah jalur menuju masuk atau keluar dari ruang sidang tidak ada pertemuan antara pencari keadilan baik Jaksa, Pengacara, Terdakwa, Saksi maupun Penasehat Hukum dengan Majelis Hakim atau Panitera Pengganti. Sehingga memberikan rasa keamanan Majelis Hakim atau Panitera Pengganti.

b. Steril Area dan Himbauan Anti Gratifikasi Melalui Pengeras Suara

Sedangkan untuk area steril adalah area dimana pengunjung sidang atau pencari keadilan tidak bisa masuk ke area internal kantor Pengadilan Negeri, yang mana dapat memungkinkan terjadinya pembicaraan atau pertemuan untuk memberikan intervensi terkait dengan suatu perkara. Pelayanan yang diberikan seluruhnya harus melalui Meja PTSP. Area steril tersebut dilengkapi dengan kunci otomatis atau kunci elektrik yang menggunakan finger print atau kartu. Dan juga himbauan kepada pencari keadilan untuk tidak memberikan gratifikasi kepada Aparatur Pengadilan Negeri melalui pengeras suara dengan sistem komputerisasi.

c. Website Resmi Untuk Sarana Informasi

Pengadilan Negeri juga telah mempunyai website resmi yaitu sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik, pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut.

d. Ruang Tunggu Pelayanan

Disediakan Ruang Tunggu dimana pencari keadilan dapat beristirahat sejenak sambil menunggu antrian untuk mendapatkan layanan.

e. Anjungan Terpadu dan Pojok e-Court

Disediakan pula Anjungan Terpadu berupa komputer yang dapat mengakses layanan E- Court, Eraterang, SIPP, Website Pengadilan Negeri dan Aplikasi SIWAS. Selain itu anjungan terpadu tersebut sudah terhubung dengan jaringan internet sehingga apabila pencari keadilan ingin mendapatkan informasi yang lain dapat juga menggunakannya. Disediakan pula Pojok E-Court untuk memudahkan para pencari keadilan dalam mendaftarkan perkara perdata secara online.

f. Pembayaran Panjar Biaya Perkara di Tempat

Disediakan pula *Payment Point* yang dapat dimanfaatkan oleh para pencari keadilan untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara perdata.

g. Anjungan Survey

Untuk mengetahui kualitas pelayanan pada masyarakat dan indeks persepsi korupsi di Pengadilan Negeri, telah disediakan anjungan survey kepuasan masyarakat dan survey persepsi korupsi.

h. Pelayanan Difabel

Untuk memberikan layanan kepada penyandang difabel, di Pengadilan Negeri juga disediakan sarana dan prasarannya.

Tabel V.2. Daftar Inovasi pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar

NO	NAMA SATKER	URAIAN	MANFAAT	PENGUNA LAYANAN
1	PT MAKASSAR	SIPAKATAU (SISTEM INFORMASI PENGUSULAN JABATAN, PROMOSI, PANGKAT, MUTASI DAN PENSIUN)	Aplikasi yang digunakan oleh seluruh ASN lingkup Pengadilan Tinggi Makassar untuk mentrace Pengusulan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Makassar	Satker wilayah PT Makassar
		SIPATOKKONG	Sistem informasi/forum komunikasi yang diperuntukkan menyelesaikan permasalahan SIPP, e-Berpadu, E-Court dan IT	satuan tugas SIPP dan TI Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar
		Aplikasi Perpustakaan	Aplikasi yang digunakan untuk melihat dan mendownload daftar Buku yang ada di Pengadilan Tinggi Makassar	Masyarakat
		Si- SARABBA	Aplikasi yang diperuntukkan bagi pengguna Disabilitas	Masyarakat
		Daeng Naba	Asisten Virtual yang dapat menjawab kebutuhan Masyarakat Pencari Keadilan secara Automatic pernyataan yang disediakan oleh system	Masyarakat
		LEGALISIR BERITA ACARA SUMPAAH ADVOKAT	Aplikasi yang memberikan kemudahan dalam permohonan khususnya yang berkaitan dengan Legalisasi Berita Acara Sumpah (BAS) Advokat	Advokat
2	PN MAKASSAR	E-WARMARKING https://e-waarmarking.pn-makassar.go.id/ E-INSIDENTIL https://e-insidentil.pn-makassar.go.id/ E-RESTITUSI https://e-restitusi.pn-makassar.go.id/ E-MADECCENG https://madecceng.pn-makassar.go.id/	AKSES LAYANAN MASYARAKAT	INOVASI 2024 MASYARAKAT PENCARI KEADILAN WILAYAH HUKUM PN MAKASSAR

3	PN SUNGGUMINASA	SALAMA' KI	AKSES LAYANAN MASYARAKAT	MASYARAKAT PENCARI KEADILAN
4	PN TAKALAR	BUKU BRAILE LAYANAN PTSP	kemudahan bagi pencari keadilan yang berkebutuhan khusus	MASYARAKAT PENCARI KEADILAN
		e-tilang	akses denda tilang online	Masyarakat Pencari Keadilan
5	PN JENEPONTO	1. Turatea Smart Court (Whatsapp Bot)	Aplikasi yang digunakan untuk memudahkan para pencari keadilan dan pegawai dalam mencari informasi, antara lain informasi mengenai perkara, denda tilang, e-court, e-litigasi, surat keterangan, jadwal persidangan pidana dan perdata, evaluasi SIPP.	Masyarakat dan Pegawai
		2.Data Centre	inovasi berupa penyimpanan data yang dapat di akses oleh semua pegawai	seluruh pegawai pn jeneponto (internal)
		3. e-brosur	inovasi berupa brosur elektronik dimana pengguna bisa melakukan scan barcode untuk melihat brosur layanan pn jeneponto	masyarakat pencari keadilan
6	PN BANTAENG	1. PTSP Online, merupakan aplikasi yang mereplika layanan PTSP secara langsung menjadi Online atau Daring	Mengurangi intensitas tatap muka dalam pemberian layanan yang dapat diakses dari manapun selama ada koneksi internet. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan biaya murah, mudah dan transparan; Sebagai Call Center, menerima Tamu Virtual, dan terhubung ke beberapa aplikasi seperti Aplikasi ANDALAN, Informasi Jadwal Sidang, Aplikasi e-court, Aplikasi SIPP, Aplikasi eraterang, Aplikasi Direktori Putusan, Aplikasi e-Pasti	Masyarakat pengguna layanan

		2. Aplikasi Posbakum	Inovasi Posbakum ini berisi informasi mengenai layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum 1. Mengurangi Intensitas tatap muka sebagai adaptasi terhadap pandemic covid-19 2. Masyarakat memperoleh layanan POSBAKUM yang informatif dan berbasis IT 3. Masyarakat mendapatkan Pelayanan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan biaya murah, mudah dan transparan 4. Efektifitas dan efisiensi layanan POSBAKUM tetap terjaga meskipun masa pandemi	Pimpinan, Pegawai Pengadilan, Petugas Posbakum, Masyarakat
		3. e-Brosur	Mempermudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantaeng. Masyarakat hanya tinggal melakukan scan pada QR code yang tercantum kemudian akan langsung terbuka brosur yang memberikan informasi mengenai layanan pengadilan	Masyarakat

		4. Aplikasi Buku Tamu Elektronik	Aplikasi Buku Tamu Elektronik diluncurkan pasca terbitnya PERMA No 5 Tahun 2020, dimana seluruh pengunjung sidang, tamu PTSP, tamu pimpinan maupun pegawai wajib direkam identitas maupun foto tamu yang bersangkutan. Terintegrasi dengan Aplikasi ANDALAN sehingga setiap Pengunjung Sidang, Layanan PTSP, Tamu Pimpinan atau Pegawai yang masuk di Pengadil Negeri Bantaeng menerima pesan Whatsapp secara otomatis dengan "Ucapan Selamat Datang dan Pesan Sosialisasi Anti Gratifikasi", serta dikirim link untuk mengisi survey IKM dan IPAK	Pimpinan, Petugas buku tamu
		5. Aplikasi Antrian PTSP	Aplikasi ANTRIAN PTSP merupakan sebuah inovasi layanan yang mengatur antrian kepada masyarakat atau pengguna layanan di Pengadil Negeri Bantaeng, dengan adanya Aplikasi Antrian ini maka dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat jauh lebih baik. Banyak kelebihan sehingga digunakan aplikasi antrian ini, diantaranya petugas PTSP tidak perlu lapor-repot memanggil atau mengurutkan antrian dengan manual, sehingga aplikasi ini akan mencatat sesuai dengan urutan dan memanggil nomor antrian jika sudah sampai gilirannya.	Pimpinan, Pegawai Pengadil, Masyarakat Pencari Keadilan
		6. e-Brosur	Mempermudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi pelayanan pada Pengadil Negeri Bantaeng. Masyarakat hanya tinggal melakukan scan pada QR code yang tercantum kemudian akan langsung terbuka brosur yang memberikan informasi mengenai layanan pengadil	Masyarakat

		7. One Day Service	Inovasi One Day dan One Stop Service Permohonan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan yang bekerjasama dengan DISDUKCAPIL Kab.Bantaeng di Mal Pelayanan Publik Bantaeng 1.Layanan informasi (Konsultasi, informasi pembuatan surat keterangan, pendaftaran perkara e-court, dan permohonan informasi publik lainnya. 2.Layanan Eraterang 3.Layanan E-Court 4.Layanan persindangan Online melalui Mal Pelayanan Publik dan Pengadilan Negeri Bantaeng	Masyarakat
7	PN MAROS	1. PTSP Online	Menerima layanan dari petugas PTSP tanpa datang ke pengadilan	Masyarakat pencari keadilan
		2. ANDALAN (Antar Produk Layanan Pengadilan)	Kemudahan menerima hasil penetapan tanpa ke kantor pengadilan (penetapan diantar)	Masyarakat pencari keadilan
8	PN PANGKAJENE	1. Aplikasi Pengontrol Jaringan	mengetahui sejak dini jaringan eror	Internal
		2. E - Brosur	Kemudahan mengakses layanan pn	Masyarakat pencari keadilan
		3. Aplikasi Si Cakep	Monev kinerja PPNNP	Internal
		4. Aplikasi e- Tilang	Kemudahan mengakses tilang	Masyarakat pencari keadilan
		5. Prodeo On Ilne	kemudahan pengajuan form prodeo	Masyarakat pencari keadilan
		6. Posbakum On line	Kemudahan konsultasi	Masyarakat pencari keadilan
		7. Aplikasi Si Nanas	Kemudahan tata naskah	Internal
		8. Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pengawasan PTSP	Kemudahan pengawasan monev PTSP	Internal
9	PN BARRU	1. AVRIL	Infomasi Layanan Melalui Aplikasi WhatsApp	Masyarakat Pencari Keadilan

		2. E - Brosur	Kemudahan mengakses layanan PN Barru	Masyarakat pencari keadilan
		3. e-PPID https://leppid.pn-barru.go.id/	Permohonan informasi Secara elektronik	Masyarakat Pencari Keadilan
10	PN PAREPARE	1. SI-Pare	Kemudahan Mengakses Layanan Kantor Pengadilan Negeri Parepare	Masyarakat Pencari Keadilan
		2. e-Gratifikasi	Pengaduan	Masyarakat Pencari Keadilan
		3. C - Eks	Informasi Layanan Kepaniteraan	Masyarakat Pencari Keadilan
		4. Sipakatau	Layanan Disabilitas	Masyarakat Pencari Keadilan
11	PN SIDRAP	VISI (Virtual Assistant PN SIDRAP)	VISI merupakan aplikasi berbasis WhatsApp Bot yang dapat menjawab secara otomatis maupun manual mengenai informasi, kritik, dan saran untuk Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.	Masyarakat pengguna layanan dan pencari keadilan
12	PN PINRANG	1. e-Posbakum	mempromudah masyarakat pencari keadilan, mendapatkan layanan posbakum melalui daring/online, tanpa datang langsung ke posbakum pengadilan negeri pinrang	Masyarakat Pencari Keadilan
		2. PTSP Online	mempromudah masyarakat/instansi mendapatkan layanan permintaan salinan putusan, penelitian, permintaan informasi, dan pengaduan melalui daring/online tanpa datang ke ptsp pengadilan negeri pinrang	Masyarakat, instansi pemerintah, instansi swasta, dan peneliti
13	PN ENREKANG	SIMANIS	AKSES LAYANAN MASYARAKAT	MASYARAKAT PENCARI KEADILAN
14	PN WATANSOPPENG	Platform Link Pelayanan Terpadu	Infomasi Layanan Melalui Aplikasi Whats Up	Masyarakat Pencari Keadilan
		Antrian PTSP	Aplikasi Antrian PTSP	Pengguna Layanan PTSP

		WA Gateway	Infomasi Layanan Melalui Aplikasi Whats Up	Masyarakat Pencari Keadilan
15	PN BULUKUMBA	1. PINISI Whatsapp Assistant	Asisten Virtual layanan masyarakat	Masyarakat Pencari Keadilan
		2. PTSPGo	Aplikasi Antrian PTSP yang terintegrasi dengan buku tamu digital serta dibuat khusus untuk memudahkan petugas PTSP untuk memonitoring durasi pelayanan yang diberikan	Masyarakat Pencari Keadilan
		3. SILAKAN (Aplikasi Layanan Suarat Kuasa Online)	Memudahkan pengguna layanan mengajukan permohonan surat kuasa secara online	Pengguna Layanan
		4. E-PANRITA	Memudahkan masyarakat mengajukan permohonan prodeo	Masyarakat Pencari Keadilan
		5. E-PANJAR	Aplikasi yang bermanfaat untuk menghitung estimasi biaya panjar perkara	Pengguna Layanan
		6. SALAMA	Aplikasi yang bermanfaat untuk mengetahui informasi terkait tilang	Pengguna Layanan
		7. KASSIPUTE	Aplikasi POSBAKUM Online	Pengguna Layanan
		8. PTSP ONLINE	Memudahkan pengguna layanan memperoleh layanan secara online	Pengguna Layanan
		9. E-PPID	media layanan informasi, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik pada PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA dengan fitur permohonan informasi secara elektronik	Pengguna Layanan
		10. SATU JEMPOL	Bertujuan memudahkan dalam memonitoring kinerja, kepatuhan, kelengkapan, dan kesesuaian SIPP pada Pengadilan Negeri Bulukumba	Internal
16	PN SELAYAR	1. PTSP Online	layanan PTSP secara online melalui zoom yang selalu aktif setiap saat. Penerima layanan bisa secara langsung berkomunikasi ke petugas yang bersangkutan.	Pengguna Layanan

		2. Aplikasi PORTAL (Pelaporan Digital)	Aplikasi Pelaporan Digital (PORTAL) PTSP merupakan inovasi Pengadil Negeri Selayar dalam bidang tata kelola arsip secara digital yang dimulai dengan Pelaporan PTSP dan dikembangkan fitur baru yaitu arsip digital Laporan Monitoring masing-masing bagian serta notulensi, daftar hadir, dan dokumen Rapat Bulanan. Arsip digital ini sebagai backup arsip pelaporan yang akan dikembangkan secara berkelanjutan terhadap digitalisasi pelaporan bagian kesekretariatan pada Pengadil Negeri Selayar. Dalam pengembangannya, aplikasi PORTAL sekarang menjadi media absensi digital bagi PPNNP sebagai fungsi pengawasan kedisiplinan PPNNP	Internal	
		3. SILAJARA	Silajara (Sistem Informasi Layanan dan Jaminan Prioritas) adalah inovasi bagi stakeholder Pengadil Negeri Selayar yang memiliki kebutuhan khusus/prioritas berupa pendaftaran kebutuhan peralatan secara online sebelum datang ke pengadilan.	Pengguna Layanan	
		4. SISTEM INFORMASI ABSEN DIGITAL (ADI)	Inovasi absensi secara digital melalui aplikasi ADI yang memberikan kemudahan akses melalui PC maupun smartphone masing-masing pegawai dalam mengisi daftar hadir kegiatan baik kegiatan apel pagi, apel sore, daftar hadir rapat yang hanya dapat diakses melalui jaringan internet lokal kantor.	Internal	

		5. BARCODE RUANGAN (COGAN)	Mengembangkan perubahan data secara digital sehingga terwujud penghematan anggaran melalui paperless dengan menciptakan aplikasi COGAN (Barcode Ruangan) yang memuat data DIR (Daftar Inventaris Ruangan), Struktur Organisasi, Kartu Kontrol barang elektronik, informasi lainnay yang ada dalam ruangan, serta kartu kontrol kebersihan Toilet.	Internal
17	PN SINJAI	1. Notifikasi& Informasi Sidang Elektronik NOISE	memudahkan para pihak berperkara majelis Hakim dan panitera pengganti petugas sidang yang akan mengupdate status sidang menjadi sedang berlangsung , hal ini untuk menjaga integritas dengan persidangan tepat waktu	1. Majelis Hakim 2. Panitera Pengganti 3. Jaksa Penuntut Umum 4. Penasihat Hukum 5. Penggugat 6. Tergugat 7. Petugas Sidang
		2. Layanan Penerimaan dan Pengelolaan PNBPN Berbasis Digital	Penerimaan layanan PNBPN secara digital untuk menjaga Integritas SDM peradilan khususnya PTSP	Pengguna Layanan PNBPN
		3. Sistem Informasi Pelayanan Pengadilan Negeri Sinjai SILANJAI	memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang perkara, jadwal sidang, sidang perkara lalulintas dll.	Masyarakat Pencari Keadilan
		4. Berita Acara Serah Terima Online BAST Online	untuk membantu petugas kontrol barang persediaan kantor operator aplikasi persediaan dalam pencatatan dan penyimpanan bukti pengambilan barang persediaan kantor	Internal Bagian Umum dan Keuangan
		5. Elektronik Perencanaan dan Rekapitulasi ATK E- PRATKA	Perencanaan dan Rekapitulasi ATK. Sistem yang berbasis web	seluruh Pegawai maupun PPNPN yang adan DI PN Sinjai
18	PN WATAMPONE	Monalisa	monitoring ketertiban SIPP intern	majelis hakim, PP, JS, Panmud

		maccani		virtual assistant akses layanan	Masyarakat Pencari Keadilan
		e-tilang		akses denda tilang online	Masyarakat Pencari Keadilan
		e-siyandi		akses layanan ramah disabilitas	Masyarakat Pencari Keadilan
19	PN SENGKANG	VIRA		Whatsapp Bot	Masyarakat Pencari Keadilan
		E-Tilang		Akses denda tilang online	Masyarakat Pencari Keadilan
		E-Brosur		Brosur layanan pengadilan elektronik	Masyarakat Pencari Keadilan
		Aplikasi Antrian PTSP dan Antrian Sidang		Untuk menertibkan pengguna layanan pengadilan	Masyarakat Pencari Keadilan
		Papan informasi digital		digitalisasi papan informasi	Masyarakat Pencari Keadilan
20	PN PALOPO	Primatoda		Mempermudah pegawai dalam beberapa hal seperti membuat PKT dan PKP, daftar gaji dan cetak slip gaji, distribusi SK, presensi untuk PPNPN, jadwal piket, permohonan cuti, konfigurasi whatsapp autorespon, history chat whatsapp autorespon, rangkuman data perkara dari SIPP, monitoring SIPP untuk monev (pelengkap EIS untuk melihat history)	Pegawai Pengadilan Negeri Palopo
		e-PTSP		memudahkan masyarakat untuk bermohon layanan posbakum, layanan prioritas, melihat taskiran panjar biaya perkara (sebelum menggunakan ecourt), mendapatkan template gugatan dan permohonan, melihat sisa panjar biaya perkara	Masyarakat pencari keadilan
		Stevi (Asisten Virtual Whatsapp)		Memudahkan masyarakat mencari informasi terkait perkara	Masyarakat pencari keadilan

21	PN MAKALE	Virtual Asisten	Akses Layanan Masyarakat	Masyarakat Pencari Keadilan
22	PN MALILI	ILAGALIGO	AKSES LAYANAN	MASYARAKAT PENCARI KEADILAN DALAM WILAYAH HUKUM PN MALILI
23	PN MASAMBA	Office Corner	Memudahkan masyarakat menggandakan dokumen berkas pendaftaran pelayanan perkara	Masyarakat Pencari Keadilan
		Flash Service	Memudahkan masyarakat dalam pemberian layanan secara cepat / singkat	Masyarakat Pencari Keadilan
24	PN BELOPA	SIPARATA	Layanan antrian sidang	Masyarakat Pencari Keadilan
		SIPPADA	Akses layanan Disabilitas	Masyarakat Pencari Keadilan
		E-BROSUR	Akses layanan Masyarakat	Masyarakat Pencari Keadilan
		E-TILANG	Akses denda tilang online	Masyarakat Pencari Keadilan

BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar melakukan pengawasan bidang oleh Hakim Pengawas Bidang baik di Kepaniteraan dan Kesekretariatan dilingkungan Pengadilan Tinggi Makassar. Pengawasan Daerah pada Pengadilan Negeri dilakukan oleh Hakim Pengawas Daerah.

Untuk melakukan Pengawasan Bidang dan Pengawasan Daerah Ketua Pengadilan Tinggi Makassar menunjuk Hakim Tinggi dengan Surat Keputusan. Selama Tahun 2024 karena ada mutasi Hakim Tinggi maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tentang Pengawas Daerah dan Pengawas Bidang terdapat beberapa revisi sebagai berikut:

1. Pengawas Bidang:

Untuk Pengawasan Bidang dilakukan secara berkala setiap bulan dan hasilnya dilaporkan pada saat pelaksanaan Rapat setiap bulan dan dilakukan pembahasan atas temuan yang ada untuk dilakukan perbaikan dan mencari solusinya.

- SK Pengawas Bidang tanggal 8 Januari 2024 Nomor 7/KPT.W22-U/SK.KP3.4/1/2024.
- SK Pengawas Bidang tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 140/KPT.W22-U/SK.KP3.4/VIII/2024

2. Pengawas Daerah:

Pengawasan Daerah dilakukan pada 23 (Dua Puluh Tiga) Satuan Kerja Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, namun apabila diperlukan dapat dilakukan pengawasan secara esidentil kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Untuk pelaksanaannya baik Pengawasan Bidang maupun Pengawasan Daerah Hakim Tinggi dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Struktural serta staf.

- SK Pengawas Daerah tanggal 8 Januari 2024 Nomor 9/KPT.W22-U/SK.KP3.4/1/2024.
- SK Pengawas Daerah tanggal 12 Agustus 2024 Nomor 143/KPT.W22-U/SK.KP/VIII/2024

Berikut ini Data Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Wilayah PT Makassar Tahun 2024;

Tabel VI.1 Data Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Wilayah PT Makassar

No	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan	Satuan Kerja	Pelaksana	Jabatan
1	Selasa s/d Jumat 27 Februari 2024 s/d 1 maret 2024	-PN Masamba -PN Malili	Hari Widodo. S.H., M.H.	Hakim Tinggi
			Rerung Patongloan S.H.	Hakim Tinggi
			Dermawan Tahir, S.H.	Panitera Pengganti
			Rio Rakhmat Anugrah, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian & TI
			Yuli Harianto	PPNPN
2	Minggu s/d rabu	-PN Palopo -PN Belopa	Pudji Tri Rahadi, S.H.	Hakim Tinggi

	25 s/d 28 Februari 2024			
			Andi Safri, S.E., M.H.	Panitera Pengganti
			Hamsiah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
			Hernawati, S.H.	Panitera Pengganti
			Sitti Sohorah Hannan, S.H.	Panitera Pengganti
			Dr. Inggou David Purba, S.kom., S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan
			Aisya Rizki Astari, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
			Hasrul	PPNPN
			Nur Syamsi Hasan, S.Si	PPNPN
3	Sabtu s/d Minggu 24 Februari 2024 s/d 3 Maret 2024	-PN Palopo -PN Malili -PN Masamba -PN Belopa	Sandi, S.H., M.H.	Panitera Pengganti / Ajudan
			Andi Kurniawan	PPNPN
4	Minggu, 25 Februari 2024 s/d 3 Maret 2024	-PN Palopo -PN Malili -PN Masamba -PN Belopa	Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi
			H. Makassau, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi
			Marten Teny Pietersz, S.Sos., S.H., M.H.	Panitera
			Andi Baso K. S.H.	Sekretaris
			Mustafa	PPNPN
5	Rabu s/d Kamis 27 s/d 28 Maret 2024	PN Makale	Marten Teny Pietersz, S.Sos., S.H., M.H.	Panitera
			Mustafa	PPNPN
6	Senin s/d Selasa 3 s/d 4 Juni 2024	PN Makassar	Ferdinandus B. S.H	Hakim Tinggi
			Achmad Guntur. S.H.	Hakim Tinggi
			Dwi Purwadi. S.H. M.H	Hakim Tinggi
			Hongkun Otoh, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
			Setyanto Hermawan S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi
			Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.	HakimTinggi
			Mulijanto, S.H., M.H.	Hakim AdHoc Tipikor
			Marten Teny Pietersz, S.Sos., S.H., M.H.	Panitera
			Andi Baso K., S.H.	Sekretaris
			Mursyid Saleh S.E., S.H.	Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian
			H. Syahrir Dahlan, S.H.	Panitera Muda Perdata
			H. Muh Taufiq	Panitera Pengganti
			Herdianto S.Kom	Kepala Bagian Umum Dan Keuangan
			Ahyadi Jusaeman S.Kom	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

			Dr. Inggou David Purba, S.kom., S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan
			Yuli Harianto	PPNPN
7	Senin, 3 Juni 2024	PN Makassar	Dr. H. Zainuddin S.H., M.Hum.	Ketua
			Dr. Djaniko M.H. Girsang, S.H., M.Hum	Wakil Ketua
			Fradia Muninggrat Fararit, S.Kom	Pranita Komputer Ahli Pertama
			Hasrul	PPNPN
			Wahyu Zaldi Basa	PPNPN
8	Senin s.d Kamis 1 s.d. 4 Juli 2024	-PN Watampone -PN Sinjai	Dr. Djaniko M.H. Girsang, S.H., M.Hum	Wakil Ketua
			Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi
			Dr. Inggou David Purba, S.kom., S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan
			Wahyu Zaldi Basa	Klerek – Analisis Perkara Peradilan
9	Kamis s/d Jumat 27 s/d 28 Juni 2024	PN Parepare	Dr.Zainuddin, S.H., M.Hum.	Ketua
			Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi
			Marten Teny Pietersz, S.Sos., S.H., M.H.	Panitera
			Wahyu Mulyadi, A.md	Panitera Pengganti / Ajudan
			Fradia Muninggrat Fararit, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama
			Hasrul	PPNPN
10	Selasa s/d Rabu 9 s/d10 Juli 2024	-PN Pangkajene -PN Barru	Dr. Djaniko M.H. Girsang, S.H., M.Hum	Wakil Ketua
			Dwi Purdadi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
			Aisya Rizki Astari, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
			Hasbullah	Klerek – Pengadministrasi Perkantoran
			Wahyu Saldi Basa	PPNPN
			Wahyuni Zakaria	PPNPN
11	Kamis s/d Jumat 11 s/d 12 Juli 2024	PN Bulukumba	Dr.Zainuddin, S.H., M.Hum.	Ketua
			Wahyu Mulyadi, A.md	Panitera Pengganti / Ajudan
			Fradia Muninggrat Fararit, S.Kom.	Penata Komputer Ahli Pertama
			Hasrul	PPNPN
12	Selasa s/d Jumat, 9 s/d 12 Juli 2024	-PN Bulukumba -PN Sinjai	Dr. Parulian Lumbanturoan, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
			H. Mustari S.H.	Hakim Tinggi
			Achmad Guntur, S.H.	Hakim Tinggi
			Marten Teny Pietersz, S.Sos., S.H., M.H.	Panitera

			Andi Baso K, S.H.	Sekretaris
			Herdiyanto, S.Kom.	Kabag Umum Dan Keuangan
			Kasmawati, S.Kom.	Kasubag Keuangan Dan Pelaporan
			Hamsiah, S.H., M.H.,	Panitera Pengganti
			Dr. Inggou David Purba, S.kom., S.H., M.H.	Klerek – Analisis Perkara Peradilan
13	Selasa s/d Jumat 30 Juli s/d 02 Agustus 2024	PN Pangkajene	Andi Baso K, S.H.	Sekretaris
			Herdiyanto, S.Kom.	Kepala Bagian Umum Dan keuangan
			Kasmawati, S.Kom	Kepala Sub Bagian Dan Pelaporan
			Thomas Raditya Bagaskara, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi, Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan
14	Selasa s/d Sabtu 20 s/d 24 Agustus 2024	-PN Pinrang -PN Sidrap -PN Enrekang -PN Makale	Tahsin S.H., M.H	Hakim Tinggi
			Akhmad Rosidin, SH., MH.	Hakim Tinggi
			Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
			Martinus Bala, S.H.	Hakim Tinggi
			Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi
			Rita Lati, S.E., M.H.	Hakim Tinggi
			Kasmawati, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
			Rio Rakhmat Anugrah, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan TI
			Yuli Harianto	PPNPN
15	Senin s/d Rabu 26 s/d 28 Agustus 2024	-PN Takalar -PN Jeneponto -PN Bantaeng	Nusryam, S.H., M.Hum	Wakil Ketua
			Siswatmono Radiantoro, S.H	Hakim Tinggi
			Frangki Tambuwun, S.H., M.H	Hakim Tinggi
			H.Budhy Hertantiyo, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
			Dwi Purwadi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
			H. Syahrir Dahlan, S.H.	Panitera Muda Perdata
			H.Muh.Taufiq T, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
			Yusi Triany Sinaga, S.E., M.H.	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

			Dr. Inggou David Purba, S.kom., S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan
			Aisya Rizki Astari, S.Kom	Penata Komputer Pertama
			Andi Kurniawan	PPNPN
16	Selasa s/d Sabtu 20 s/d 24 Agustus 2024	-PN Pinrang -PN Sidrap -PN Enrekang -PN Makale	Dr.Zainuddin, S.H., M.Hum.	Ketua
			Marten Teny Pietersz, S.Sos., S.H., M.H.	Panitera
			Wahyudi Mulyadi, A.Md	Panitera Pengganti / Ajudan
			Fradia Muninggrat Fararit, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
			Hasrul	PPNPN
			Nursyamsi Hasan, S.Si	PPNPN
17	Rabu s/d Jumat 21 s/d 23 Agustus 2024	-PN Pangkep -PN Barru -PN Parepare	Acice Sendong, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
			Yunus Sesa, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
			Martin Ponto Bidara, S.H.	Hakim Tinggi
			Achmad Guntur, S.H.	Hakim Tinggi
			Herdiyanto, S.Kom	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
			H. Syahrir Dahlan, S.H.	Panitera Muda Perdata
			Dr. Inggou David Purba, S.kom., S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan
			Thomas Raditya Bagaskara, A.Md	Pengelola Barang Milik Negara
18	Jumat, 11 Oktober 2024	PN Sungguminasa	Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.	Ketua
			Achmad Guntur, S.H.	Hakim Tinggi
			Dwi Purwadi, S.H.	Hakim Tinggi
			Hongkun Otoh, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
			Marten Teny Pietersz., S.sos., S.H., M.H.	Panitera
			Andi Baso K., S.H.	Sekretaris
			Yusi Triany Sinaga, S.E., S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran.
			Ahyadi Jusaeman., S.E., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
			Drs. H. M. Chandra Parenrengi Sjahrir, S.H.	Panitera Pengganti
			Dermawan Tahir, S.H.	Panitera Pengganti
			Dr. Inggou David Purba, S.Kom., S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan
			Wahyudi Mulyadi, A.Md.	Panitera Pengganti / Ajudan
			Fradia Muninggarat Fararit, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama

			Hasrul	PPNPN
			Mustafa	PPNPN
19	Kamis, 10 Oktober 2024	PN Maros	Lenny Wati Mulasmadhi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
			Acice Sendong, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
			Achmad Guntur, S.H.	Hakim Tinggi
			Herdiyanto. S.Kom.	Kepala Bagian Umum dan keuangan
			H. Syahrir Dahlan, S.H.	Panitera Muda Perdata
			Meiman Perlindungan Dachi, S.Ip.	Penata Layanan Operasional
			Nur Alqadri, A.Md.	Pengelola Data
			Hasbullah	Pengadministrasi Umum
20	Jumat, 11 Oktober 2024	PN Sungguminasa	Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.	Ketua
			Achmad Guntur, S.H.	Hakim Tinggi
			Dwi Purwadi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
			Hongkun Otoh S.H., M.H.	Hakim Tinggi
			Marten Teny Pietersz., S.Sos., S.H., M.H	Panitera
			Andi Baso K., S.H.	Sekretaris
			Yusi Triany Sinaga, S.E., S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Renacana Program dan Anggaran
			Ahyadi Jusaeman, S.E., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
			Drs. H. M. Chandra Parenrengi Sjahrir, S.H.	Panitera Pengganti
			Dermawan Tahir, S.H.	Panitera Pengganti
			Dr. Inggou David Purba, S.Kom., S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan
			Wahyu Mulyadi, A.Md.	Panitera Pengganti / Ajudan
			Fradia Muninggarat Fararit, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama
			Hasrul	PPNPN
21	Rabu s/d Sabtu 16 s/d 19 Oktober 2024	-PN Watampone -PN Watansoppeng -PN Sengkang	Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
			Hongkun Otoh, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
			H. Winarno, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
			Mursyid Saleh, S.E.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
			Muh. Taufiq T. S.H., M.H.	Panitera Pengganti
			Abd. Latif, S.H.	Panitera Pengganti
			Yusi Triany Sinaga, S.E., S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Rencana

				dan Program dan Anggaran
			Dr. Inggou David Purba, S.Kom., S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan
			Meiman Perlindungan Dachi, S.Ip.	Penata Layanan Operasional
22	Senin s/d Jumat 21 s/d 25 Oktober 2024	-PN Watansoppeng -PN Selayar	Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.	Ketua
			Marten Teny Pietersz., S.Sos., S.H., M.H	Panitera
			Wahyudi Mulyadi, A.Md.	Panitera Pengganti / Ajudan
			Hasrul	PPNPN
			Mustafa	PPNPN
23	Selasa s/d Jumat 22 s/d 25 Oktober 2024	PN Selayar	Merry Taat Anggarasih, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
			Hastopo, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
			Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi
			Mahdalena Rehulina Ginting, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
			Dr. Inggou David Purba, S.Kom., S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan
			Fradia Muninggarat Fararit, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama
			Rezky Amaliah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan

B. Evaluasi

Evaluasi Pengadilan Tinggi Makassar dilakukan secara berkala terhadap semua unsur baik Hakim Tinggi, Tenaga Kepaniteraan maupun Kesekretariatan baik pejabat maupun staf juga Tenaga Honorer dilakukan setiap bulan pada saat Rapat Bulanan, selain membahas temuan hasil pengawasan bidang, juga tentang disiplin kerja, disiplin waktu, hasil kerja/kinerja baik perkara, kepaniteraan maupun kesekretariatan dan hasil evaluasi tersebut harus ditindak lanjuti sebagai langkah perbaikan dan dibuat dokumen notulen rapat. Untuk Tenaga Honorer/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) juga dilakukan Penilaian secara tertulis terdiri dari beberapa kriteria termasuk daftar hadir masing - masing oleh pejabat yang berwenang setiap akhir tahun. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar pertimbangan untuk dapat atau tidaknya yang bersangkutan diperpanjang sebagai tenaga PPNPN pada Pengadilan Tinggi Makassar untuk tahun berikutnya.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Uraian yang ada dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan telah melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Terdapat 4 (empat) satuan kerja di bawah Pengadilan Tinggi Makassar telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi yaitu PN Maros, PN Masamba, PN Parepare dan PN Bantaeng;
3. Seluruh sisa perkara Perdata, Pidana, Tipikor dan Pidana Anak tahun 2023 telah diputus di tahun 2024;
4. Seluruh Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan mendapatkan anggaran POSBAKUM dan rata-rata realisasi mencapai 99,90%;
5. Untuk anggaran Sidang Keliling hanya ada 9 (sembilan) satuan kerja yang mendapat anggaran dengan rata-rata realisasi sebesar 95,83% di Tahun Anggaran 2024, tidak maksimalnya realisasi disebabkan karena pada akhir tahun terdapat pemblokiran anggaran perjalanan dinas;
6. Untuk anggaran Prodeo terdapat 16 (enam belas) satuan kerja yang mendapat anggaran dengan rata-rata realisasi sebesar 47,16% di Tahun Anggaran 2024;
7. Untuk DIPA 01 Tahun Anggaran 2024 dari anggaran Badan Urusan Administrasi penyerapan pada Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal mencapai 98,96%;
8. Untuk DIPA 03 Tahun Anggaran 2024 dari Anggaran Direktorat Jenderal Badilum penyerapan pada Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar mencapai 96,22%;
9. Barang Milik Negara berupa Tempat Sidang Tidak Tetap/Setting Plat yang ada di beberapa Pengadilan Negeri wilayah Pengadilan Tinggi Makassar dalam kondisi rusak berat dan perlu anggaran untuk pemeliharaan atau renovasi guna peningkatan fungsi;
10. Rumah dinas dimasing-masing satker belum mencukupi kebutuhan terutama untuk para hakim pengadilan dan belum dilengkapi dengan inventaris/meubelair;
11. Beberapa satuan kerja belum tersedia Rumah Dinas untuk Sekretaris;
12. Untuk gedung Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan rata-rata masih belum seluruhnya sesuai prototype gedung pengadilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI;
13. Pengadilan Negeri Se- Sulawesi Selatan sudah menggunakan sistem keterbukaan informasi dengan fasilitas website dan email;
14. Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan di Pengadilan Negeri sudah hampir semuanya lengkap namun belum mendukung performa aplikasi e-court dan e-berpadu.
15. Setiap satker yang berada pada wilayah Pengadilan Tinggi Makassar sudah menerapkan aplikasi Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-court baik untuk pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding.
16. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara rutin berdasarkan Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Makassar.

B. Rekomendasi

1. Perlu adanya anggaran khusus untuk menunjang jalannya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada pengadilan tingkat pertama, yaitu salah satunya mengenai infrastruktur pada jaringan baik jaringan lokal maupun internet;
2. Perlu adanya pelatihan secara rutin bagi operator IT di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar mengenai perawatan dan pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk membantu menunjang kerja operator IT;
3. Perlu adanya anggaran khusus untuk renovasi gedung sesuai prototype pengadilan guna terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor;
4. Perlu adanya penambahan ruang kerja hakim khususnya hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar dikarenakan ruang kerja hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar kurang memadai demikian pula dengan meubelairnya;
5. Tambahan anggaran untuk kebutuhan yang diperlukan sebagai sarana dan prasarana pelaksanaan tupoksi agar diprioritaskan guna pelaksanaan tugas yang efisien dan efektif dengan harapan bisa mencapai hasil optimal;
6. Personil yang ada di setiap unit organisasi/satker hendaknya ditugaskan pada bidang yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan guna hasil yang optimal, efektif dan efisien;
7. Dalam rangka pembinaan menuju profesionalisme pegawai perlu adanya Diklat Pegawai sesuai dengan sasarannya;
8. Perlunya penambahan tenaga IT seiring penggunaan aplikasi-aplikasi terkait inovasi satuan kerja dan Pengadilan Tinggi Makassar sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI di wilayah Sulawesi Selatan.
9. Untuk menunjang tupoksi dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di Kepaniteraan, dengan jumlah personil yang ada saat ini dibutuhkan tambahan ASN guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
10. Diharapkan peningkatan kelas Pengadilan Negeri yang ada di Sulawesi Selatan.